



**DINAMIKA DAN PROSPEK
PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

**DINAMIKA DAN PROSPEK
PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

Penulis

**Eniarti Djohan
Dewi Harfina S.
Nawawi
Tri Handayani**

Editor

Prijono Tjiptoherijanto



Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia

LIPI

© 2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan*

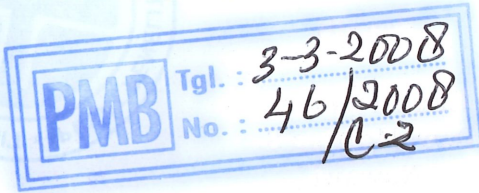
Katalog dalam Terbitan

Dinamika dan Prospek Penyerapan Tenaga Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak Provinsi Riau/Eniarti Djohan, Dewi Harfina S., Nawawi, Tri Handayani – Jakarta : LIPI Press, 2007.

xvii + 150 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-145-6

1. Tenaga kerja 2. Kelapa sawit



331

Layout isi : Sutarno
Desain cover/Perwajahan : Puji Hartana

Editor : Prijono Tjiptoherijanto
Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp. : (021) 5207205, 5225711, 5251542
Fax. : (021) 5207205
E-mail : ppk-lipi@rad.net.id

PRAKATA EDITOR

Buku dengan judul ‘Dinamika dan Prospek Penyerapan Tenaga Kerja Di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau’ yang ditulis oleh para peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini memberikan bahan kajian yang menarik, karena analisisnya berdasarkan hasil penelitian lapangan di Provinsi Riau, tepatnya di masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit Sei Buatan – Kabupaten Siak. Kajian dalam studi ini terfokus kepada kondisi dan isu penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR, serta prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian. Oleh karena itu, selain dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan diharapkan buku ini dapat melengkapi bahan literatur bagi berbagai pihak yang tertarik terhadap kajian tentang pengembangan ketenagakerjaan dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dalam studi ini ditemukan, bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit mempunyai peran besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lokasi penelitian. Kondisi tersebut dapat dilihat pada berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat, baik yang menyangkut pendapatan keluarga petani, pendapatan masyarakat setempat secara keseluruhan, serta pendapatan sebagai akibat *backward linkages* dan *inward linkages* dari aktivitas perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pengolahan lahan di perkebunan kelapa sawit meliputi penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama, pembersihan lingkungan, pembersihan pohon sampai pada pemanenan, terbukti memberikan lapangan kerja baik kepada tenaga kerja petani, keluarga dan penduduk di sekitarnya. Hadirnya perkebunan kelapa sawit juga telah menciptakan kesempatan terhadap terbukanya lapangan kerja yang lain, seperti kesempatan kerja di pabrik pengolahan, usaha pembibitan, usaha angkutan, usaha perdagangan, usaha perbengkelan, usaha pendidikan, usaha telekomunikasi, dan jasa jasa lainnya. Pada gilirannya, penyerapan tenaga kerja di perkebunan plasma kelapa

sawit juga telah memberikan pendapatan yang cukup baik bagi penduduk di perkebunan. Sebaliknya petani yang tidak berhasil di plasma, berusaha untuk bekerja di luar perkebunan dengan harapan dapat menambah pendapatan rumah tangga.

Prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian diperkirakan masih terbuka luas. Gambaran ini terutama terkait dengan masih luasnya ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terkait dengan kendala yang saat ini sedang dihadapi sebagian besar petani kelapa sawit di lokasi penelitian, yaitu keharusan melakukan *re-planting* terhadap tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif. Di tingkat yang lebih luas, pengembangan komoditas kelapa sawit perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih besar. Diversifikasi produk buah kelapa sawit harus dikembangkan, tidak hanya menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO), namun juga produk lain seperti *oleokimia*, kompos, pakan ternak, dan arang.

Untuk memaksimalkan peluang tersebut, dalam konteks makro, diperlukan kinerja pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara terpadu dan didukung oleh berbagai faktor yang terintegrasi secara baik. Sementara pada tingkat mikro, perlu dilakukan re-orientasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas para petani dan peningkatan efisiensi sistem agribisnis komoditi kelapa sawit. Kelembagaan pertanian di tingkat primer (petani) dan lembaga pedesaan perlu ditata dan dikembangkan sesuai dengan kerukunan petani dan masyarakat pedesaan, disertai dengan pengembangan kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan KUD yang mandiri. Jika semua hal tersebut dapat dilakukan, maka tidak mustahil jika di masa-masa mendatang pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi penyedia kesempatan kerja yang cukup besar dan sekaligus menjadi alternatif peningkatan pendapatan masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap penerbitan buku ini, khususnya kepada tim penulis yang telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan buku ini. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat semakin memacu kreativitas dan memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian di Indonesia.

Jakarta, Desember 2007

Prijono Tjiptoherijanto
Guru Besar Tetap
Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia

PRAKATA PENULIS

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dinamika dan prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang menerapkan Pola PIR dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit Sei Buatan, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tahun 2004. Perkebunan ini salah satu dari banyaknya perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau yang merupakan sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Kabupaten Siak. Penduduk di lokasi ini sebagian besar adalah para transmigran yang mengikuti program perkebunan kelapa sawit dengan Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) binaan PTPN V Riau.

Keberadaan sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak sangat berperan bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, karena dapat memberi peluang penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peluang terserapnya sekitar 84.327 orang tenaga kerja dari perkiraan perkebunan kelapa sawit di delapan kecamatan Kabupaten Siak (195.939 hektar). Pada gilirannya, dilihat dari sisi kesejahteraan terlihat adanya peningkatan tingkat pendapatan petani plasma dibandingkan pendapatan yang diperoleh di daerah asal. Kesuksesan kehidupan petani ini juga berdampak terhadap pola pemikiran generasi muda dalam pilihan pekerjaan. Mereka cenderung lebih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih menjamin hidup dibanding bekerja sebagai buruh pabrik.

Untuk mendukung keberadaan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Siak, pemerintah daerah Kabupaten Siak menetapkan pertanian modern berwawasan agribisnis dan agroindustri sebagai *leading*

sector perekonomian daerah. Beberapa kebijakan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan isu ketenagakerjaan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Di antaranya adalah penetapan daerah Buton sebagai kawasan industri terpadu dalam mendukung kesiapan daerah menghadapi era globalisasi yang diharapkan memiliki prospek penyerapan ketenagakerjaan di Kabupaten Siak. Dalam memaksimalkan peluang tersebut, usaha perkebunan kelapa sawit di tingkat makro membutuhkan kinerja pengelolaan perkebunan secara terpadu yang didukung berbagai aspek secara terintegrasi. Di tingkat mikro, dilakukan re-orientasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas petani dan peningkatan efisiensi agribisnis komoditi kelapa sawit.

Tiga hal yang dikaji dalam buku ini, yaitu: 1) Hubungan inti-plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai permasalahannya; 2) Kondisi kemandirian petani plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja; dan 3) Prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Ketiga hal tersebut terapkan dalam enam bab, yaitu *bab pertama* merupakan pendahuluan yang mengantarkan kenapa studi ini dilakukan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. *Bab kedua*, menggambarkan kondisi dan situasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau umumnya dan Kabupaten Siak khususnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. *Bab ketiga* menggambarkan dan mengkaji kondisi petani plasma perkebunan kelapa sawit pada saat ini setelah melewati masa sekitar dua puluh tahun menggeluti kegiatan di perkebunan kelapa sawit. *Bab keempat* mengkaji hubungan di perusahaan kelapa sawit yang mengikuti pola PIR, yaitu antara perusahaan sebagai 'inti' dan petani sebagai 'plasma', yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. *Bab Kelima* merupakan pembahasan prospek penyerapan tenaga kerja pada komoditi kelapa sawit, baik pada sektor hulu maupun sektor hilir, dilihat dari aspek kesiapan dan dukungan pemerintah, perusahaan/swasta dan petani sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam pengembangan usaha ini.

Bab keenam adalah kesimpulan yang diikuti dengan alternatif kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit baik di sektor hulu maupun hilir.

Buku ini terwujud berkat dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, baik pada saat persiapan, pengumpulan data, maupun penyusunannya. Dalam pengumpulan data kami banyak dibantu berbagai pihak di tingkat provinsi, kabupaten hingga lokasi penelitian dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan informasi yang diberikan dari pihak terkait tersebut, untuk kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada pihak dari PTPN V, KUD Mandiri Palma Jaya, kelompok pemuda yang telah banyak membantu selama kegiatan penelitian di lokasi Perkebunan Sei Buatan berlangsung.

Kami juga mengucapkan terma kasih yang tak terhingga kepada mereka yang telah sudi membaca dan memberi komentar pada naskah ini sebelum terbit, yaitu Dr. Yulfita Rahardjo, APU, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Haning Romdiati, MA., Dr. Sunarti dan rekan rekan peneliti Puslit Kependudukan – LIPI yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Terima kasih kami ucapkan juga kepada rekan-rekan di bidang komputer yang membantu *me-layout* naskah ini secara berulang-ulang dan rekan-rekan administrasi yang telah membantu kelancaran penelitian ini sejak awal hingga buku ini terbit.

Akhirnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Ir. Aswatini sebagai kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang selalu mendorong kami untuk mewujudkan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat terbit menjadi sebuah buku sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait maupun masyarakat umumnya.

Kehadiran buku ini yang merupakan hasil penulisan bersama disadari masih banyak kekurangan seperti kata pepatah '*tak ada gading yang tak retak*' dalam setiap langkah kehidupan manusia. Walaupun demikian, penulis bertanggung jawab atas isi buku ini yang selalu

mengharapkan kritik dan saran membangun untuk peningkatan kualitas kajian yang akan kami lakukan kemudian hari.

Jakarta, Desember 2007

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA EDITOR	iii
PRAKATA PENULIS	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	4
	1.3. Ruang Lingkup	6
	1.4. Alur Pikir	7
	1.5. Metode Penelitian	10

BAB II	KABUPATEN SIAK DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	15
	2.1. Pengantar	15
	2.2. Potensi Geografis	16
	2.3. Dinamika Perkebunan Dalam Perspektif Sejarah	18
	2.3.1. Sekilas sejarah perkebunan di Indonesia	18
	2.3.2. Perkembangan perkebunan kelapa sawit	20
	2.3.3. Perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian	23
	2.4. Potensi Sumber Daya Manusia	28
	2.4.1. Jumlah dan Komposisi	28
	2.4.2. Kualitas Sumber Daya Manusia	30
	2.5. Potensi Ekonomi	33
	2.5.1. Pertumbuhan Ekonomi	33
	2.5.2. Sarana dan Prasarana Ekonomi	35
	2.6. Penutup	39

BAB III	PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT:	
	Kondisi Sosio Demografi, Pengelolaan dan Strategi Kelangsungan Hidup	41
3.1.	Kondisi Sosio-Demografi Petani Perkebunan Kelapa Sawit	41
3.2.	Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	51
3.3.	Kepemilikan dan Strategi Kelangsungan Hidup	61
3.4.	Penutup	68
BAB IV	KINERJA PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	71
4.1.	Pengantar	71
4.2.	Perkembangan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Lokasi Penelitian	73
4.3.	Kinerja Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit : Studi Kasus di Tingkat Petani	77
4.3.1.	Kinerja Kegiatan Produksi	78
4.3.2.	Kinerja Kegiatan Pemasaran	82
4.4.	Peran Kelembagaan Pertanian di Tingkat Desa	85
4.4.1.	Koperasi Unit Desa (KUD).	86
4.4.2.	Kelompok Tani	88
4.5.	Hubungan Kerja Plasma dan Inti : Suatu Kecenderungan	90
4.6.	Penutup	92
BAB V	PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA KOMODITI KELAPA SAWIT: Sektor Hulu dan Hilir	97
5.1.	Keberlangsungan Usaha Kelapa Sawit: Pemeliharaan, Pemasaran dan Peremajaan (<i>Re-planting</i>)	98
5.2.	Prospek Pengelolaan Kelapa Sawit: Hulu dan Hilir	109

5.3. Prospek Penyerapan Tenaga Kerja: Peluang dan Tantangan	115
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	129
6.1. Kesimpulan	129
6.2. Rekomendasi dan Alternatif Kebijakan	134
DAFTAR PUSTAKA	139
INDEKS	145

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pencapaian Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Perkembangan Kelapa Sawit Menurut Propinsi Riau dan Kabupaten Siak, Tahun 2000 – 2004	25
Tabel 2.2. Distribusi Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2002	31
Tabel 2.3. Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2002	32
Tabel 2.4. IPM, IPJ, dan IDJ, 2002	32
Tabel 2.5. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak Atas Dasar Harga konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1998 – 2002 (Tanpa Migas)	34
Tabel 3.1. Luas Kepemilikan Lahan Kebun Kelapa Sawit Menurut Tahun Kedatangan Petani Plasma	43
Tabel 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Petani Perkebunan Sei Buatan, Kabupaten Siak, 2004	45
Tabel 3.3. Pemilikan Barang Menurut Tahun Kedatangan ke Lokasi Penelitian	51
Tabel 3.4. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Jenis Kelamin	56
Tabel 3.5. Jenis Kegiatan Menurut Upah yang Diterima Buruh Perkebunan	60
Tabel 4.1. Perusahaan Penyelenggara Program PIR di Propinsi Riau	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pikir	9
Gambar 2.1. Perkembangan Luas Areal Perkebunan (hektar) pada Tiga komoditi terbesar di Provinsi Riau	26
Gambar 4.1. Rantai Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit di Lokasi Penelitian	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat)¹ di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Fokus kajian adalah penyerapan tenaga kerja di perkebunan dengan menitikberatkan pada dinamika ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit dan prospek penyerapan tenaga kerja, baik di sektor hulu (pengelolaan perkebunan) maupun sektor hilir (produk olahan dari kelapa sawit). Pilihan studi ini mengingat usaha perkebunan kelapa sawit berpotensi untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan memberi efek ganda, baik pada industri hulu maupun industri hilir (Dwinita, 1999). Pada industri hulu, khususnya di perkebunan kelapa sawit, tahun 2002 di Indonesia diperkirakan sekitar 3,5 juta orang tenaga kerja terlibat secara langsung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Apabila diasumsikan per pekerja memiliki satu orang istri dan 2 anak, maka terdapat sekitar 14 juta orang yang kehidupannya tergantung dari kegiatan usaha kelapa sawit (Dewan Riset Nasional, 2002). Tingkat penyerapan tenaga kerja akan lebih tinggi bila industri hilir yang menggunakan bahan dasar *Crude Palm Oil* (CPO) makin berkembang, misalnya pabrik minyak goreng, sabun, dan kosmetik. Namun informasi yang berkaitan dengan permasalahan penyerapan tenaga kerja tersebut, khususnya di Provinsi Riau, masih kurang.

Sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia hingga saat ini tetap diakui sebagai salah satu sektor yang banyak menyediakan lapangan kerja bagi penduduk, terutama di daerah perdesaan. Kondisi ini

¹ Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai 'inti' yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai 'plasma' dalam sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. (Departemen Pertanian, 1996).

semakin nyata terlihat ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi pada tahun 1997, dimana sektor pertanian kembali menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, selama 5 tahun sejak krisis ekonomi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 7 persen yaitu dari 35,8 juta orang (1970) menjadi 38,5 juta orang (2002). Situasi ini diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif sekitar 1,74 persen per tahun, karena distribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional cenderung meningkat dari 14,8 persen (1997) menjadi 17,5 persen (BPS, 2003). Kinerja ekonomi sektor pertanian ditingkat nasional cenderung berkembang baik tersebut tentu tidak terlepas dari peran kegiatan sub sektor dibawahnya seperti sub sektor perkebunan kelapa sawit, di mana dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dilihat dari pembukaan luas lahan, jumlah produksi maupun penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks sejarah perkebunan Indonesia, perhatian terhadap pengembangan kelapa sawit telah dilakukan sejak zaman Belanda, khususnya di Pulau Sumatera Bagian Timur, yang diawali oleh Maskapai Perdagangan Hindia Belanda tahun 1911 (Lubis, 1992:3-4). Dalam perkembangannya, terutama setelah masa penjajahan Belanda, perluasan perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera makin meningkat dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Lampung sekitar tahun 70-an. Pada tahun 80-an mulai merambah ke provinsi lain, baik di dalam maupun di luar Pulau Sumatera seperti di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Khusus di Pulau Sumatera, usaha perkebunan kelapa sawit dapat dijumpai hampir di seluruh provinsi Sumatera yang umumnya dikaitkan dengan pelaksanaan program transmigrasi.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang mengembangkan tanaman kelapa sawit, tingkat perkembangan perkebunan kelapa sawit terlihat mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Pada tahun 2002 meningkat mencapai 1.024.500 hektar yang terdiri dari 1.020.000 hektar di Riau Daratan dan 4.500 hektar di Riau Kepulauan (BPS Provinsi Riau, 2003).

Hingga saat ini diperkirakan perkebunan kelapa sawit di seluruh Propinsi Riau mencapai seluas 70 persen hingga 80 persen yang meliputi hampir seluruh kabupaten. Keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian daerah ini telah menjadi salah satu sub sektor penting yang diharapkan dapat berkontribusi untuk pembangunan ekonomi Provinsi Riau, baik sektor hulu maupun hilir dengan menitikberatkan pada produk ekspor.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau juga tergambarkan di Kabupaten Siak sebagai kasus studi ini. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini dimulai sekitar awal tahun 1980 (pada waktu Siak masih termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis), yang terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi. Perhatian ini makin berkembang setelah Siak menjadi daerah tingkat II Provinsi Riau seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pada saat ini, dari sebelas (11) kecamatan yang termasuk Kabupaten Siak ada delapan (8) kecamatan mengembangkan perkebunan kelapa sawit, baik dalam bentuk perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Luas areal kelapa sawit di delapan kecamatan tersebut sekitar 131.128 hektar atau 66,92 persen dari total lahan perkebunan di Kabupaten Siak, yaitu 195.939 hektar (BPS Kabupaten Siak, 2003).

Keberadaan perkebunan kelapa sawit pola PIR di Kabupaten Siak yang diawali dengan program transmigrasi diharapkan dapat memberi peluang kerja bagi peserta transmigrasi dan masyarakat setempat. Ada tiga tujuan strategis yang akan dicapai melalui pola ini, yakni: 1) peningkatan produksi perkebunan; 2) peningkatan pendapatan petani plasma dan pemerataan produksi perkebunan; 3) peningkatan pendapatan petani plasma dan pemerataan pembangunan dengan pengembangan wilayah (Jamhari, 2001). Di samping itu, kelapa sawit juga sebagai devisa utama dari sub sektor perkebunan dan sumber bahan baku berbagai industri pengolahan (agroindustri).

Selain pen-*suplay* utama kebutuhan industri minyak sawit CPO, perkebunan kelapa sawit secara tidak langsung juga berpeluang memberikan multiplier ekonomi yang cukup besar. Adanya kemungkinan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dan

kebelakang (*backward linkages*) dari kegiatan ekonomi yang terlibat pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya, maka keberadaan perkebunan kelapa sawit dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta berpotensi untuk dikembangkan pada sektor agroindustri dan agribisnis (Simanjuntak, 2001). Kondisi ini akan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, yang akhirnya akan banyak menyediakan kesempatan kerja yang ditawarkan.

Dalam pandangan lain, keberadaan perkebunan kelapa sawit di suatu daerah tidak hanya berfungsi ekonomis atau bisnis (*fresh market*), namun juga fungsi sosial dan lingkungan (*non market*). Gambaran ini menunjukkan, bahwa dari sisi penyerapan tenaga kerja pada komoditi kelapa sawit perlu diantisipasi pengembangan sektor kelapa sawit dari tingkat industri hulu hingga industri hilir secara berkelanjutan dengan diikuti oleh ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja yang akan mengisinya. Dengan demikian, fungsi sosial dari keberadaan komoditi kelapa sawit akan terlaksana, yaitu dalam penciptaan kesempatan kerja yang dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pendukung utama kegiatan ini.

1.2. Perumusan Masalah

Sejak tahun 1976, pemerintah telah mengembangkan program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagai pola dari pengembangan subsektor perkebunan yang memadukan perusahaan perkebunan dengan petani plasma dalam suatu proses produksi. Keberadaan perkebunan kelapa sawit pola PIR meskipun dirancang dan berpotensi menyerap tenaga kerja, namun dalam dinamikanya terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan: 1) keharmonisan hubungan plasma dan inti sebagai mitra, 2) keberadaan plasma sebagai unit yang mandiri, 3) kesiapan pemerintahan untuk keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) merupakan sub sektor pertanian yang

dirancang untuk dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan peluang terciptanya kesempatan kerja baru di berbagai sektor, khususnya sektor agroindustri dan agribisnis. Hal ini tergambarkan pada tujuan keberadaan perkebunan pola PIR-BUN yang diharapkan dapat memberi peluang kerja sehingga dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi petani plasma. Prinsip dari pola ini adalah kerja sama antara inti dan plasma pada satu sistem yang akan saling menguntungkan, membutuhkan dan berkesinambungan. Sebagai inti perusahaan perkebunan memberi dukungan dalam berbagai kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran, sebagai plasma menghasilkan bahan olah yang dijual kepada intinya. Kedua lembaga tersebut melakukan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Dalam perkembangannya, posisi petani plasma sering menjadi pihak yang lemah dibandingkan pola perkebunan Milik Negara dan Swasta Nasional (Akatiga, 1994). Lemahnya posisi petani plasma tersebut tercermin dari rendahnya akses mereka terhadap pengembangan pengetahuan, pengelolaan dan pasar. Hal tersebut menyebabkan hubungan keharmonisan antara petani plasma dan inti yang seharusnya sebagai mitra mengalami perubahan yang cenderung berjalan secara sendiri-sendiri. Pada kenyataannya petani plasma hanya sebagai pemasok kebutuhan Tandan Buah Segar (TBS) bagi perusahaan inti, dan masih lemahnya kontrol petani plasma terhadap penentuan harga TBS dan kualitas TBS. Kontribusi terbesar dalam konsorsium penentuan harga adalah pada pihak inti. Petani (KUD) walaupun diikutsertakan dalam penentuan harga, namun tidak memiliki kekuatan besar². Di sisi lain, rendahnya kualitas TBS yang dihasilkan dari petani plasma dibandingkan inti merupakan manifestasi dari akses, kemampuan dan partisipasi petani plasma. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di plasma.

² Sampai saat ini penentuan harga TBS masih diputuskan sesuai dengan SK menteri kehutanan dan perkebunan no. 627/kpts-II/1998 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Pertanian No.839/kpts/KB.320/8/97 (Sawit Watch, 2004).

Kemampuan Pola PIR–BUN dalam menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sangat memerlukan kesiapan dan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk mewujudkannya. Keseriusan pemerintah daerah memang tertuang dalam arah kebijakan pembangunan dalam pengembangan sektor agroindustri dan agribisnis, yaitu membangun Kawasan Industri Buton yang menitikberatkan pada sektor industri hilir dengan memanfaatkan bahan baku CPO. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Siak sebagai daerah tingkat II yang baru terbentuk pada tahun 2002.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka buku ini bertujuan untuk mengkaji dinamika dan prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam hal ini ada tiga hal yang diungkapkan pada buku ini, yaitu: (1) hubungan inti-plasma dalam pengelolaan kelapa sawit dengan berbagai permasalahannya; (2) kondisi kemandirian petani plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja; (3) kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam usaha perkebunan kelapa sawit dan implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, keberadaan buku ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan tentang dinamika dan prospek penyerapan tenaga kerja di sektor hulu maupun sektor hilir kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ada dua aspek yang menjadi substansi tulisan ini, yaitu dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan prospek dalam penyerapan tenaga kerja. Dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit terkait dengan kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tingkat petani plasma yang membahas latar belakang sosial demografi petani plasma dan kecenderungan hubungan kemitraan antara petani plasma dengan pihak perusahaan (inti). Latar belakang sosial demografi petani plasma meliputi gambaran kehidupan petani perkebunan kelapa sawit dilihat dari

kondisi rumah tangga petani plasma, kegiatan di perkebunan kelapa sawit, peran kelembagaan dan strategi yang dilakukan untuk kelangsungan usaha kelapa sawit. Sementara hubungan inti dan plasma terkait dengan kemandirian petani plasma dalam mempunyai akses terhadap kegiatan produksi, permodalan, pemasaran dan alih pengetahuan atau teknologi. Isu yang ada di tingkat petani plasma sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha kelapa sawit, khususnya di sektor hulu.

Aspek kedua, yaitu prospek penyerapan tenaga kerja yang mengacu kepada peluang terciptanya kesempatan kerja dalam usaha kelapa sawit dilihat dari sektor perkebunan kelapa sawit (hulu) maupun produksi turunannya (hilir). Dalam kaitan ini, dilihat sejauh mana dukungan kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada pembahasan prospek tidak hanya bersifat perkiraan besaran angka, namun juga kecenderungan peluang pengembangan kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam perspektif kegiatan perekonomian yang lebih luas, yaitu agroindustri dan agribisnis.

Untuk menggambarkan dan mengkaji bahasan tersebut, dilakukan studi pada masyarakat petani plasma di Perkebunan Kelapa Sawit Sei Buatan, di mana PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sebagai inti dan masyarakat transmigran sebagai plasma. Perkebunan kelapa sawit ini mempunyai cukup luas di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak, dan telah berkembang dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Penduduknya yang sebagian besar adalah para transmigran umumnya telah mengawali kegiatan ini sejak awal dibukanya perkebunan Sei Buatan, yang sekarang sedang memasuki tahap peremajaan (*re-planting*).

1.4. Alur Pikir

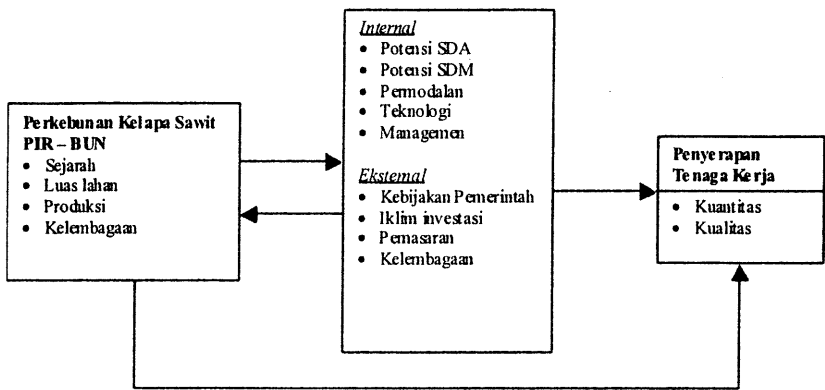
Pengkajian tentang penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR tidak dapat lepas dari pola kemitraan antara inti dan plasma. Kedua bentuk hubungan kelembagaan tersebut memiliki tujuan jangka panjang dengan menciptakan suatu sistem kerjasama

kemitraan yang saling membutuhkan, menguntungkan dan berkesinambungan. Pihak inti yang dianggap memiliki kemampuan dalam permodalan, teknologi dan kelembagaan yang lebih mapan diharapkan dapat membantu dan membimbing perkebunan rakyat sebagai plasma. Sementara plasma diharapkan dapat menjadi mitra inti, yaitu dengan memasarkan produk perkebunan yang dihasilkan petani plasma kepada perusahaan inti, sehingga dapat mengembangkan perkebunannya sendiri.

Pola kemitraan dan keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan prospek pengembangan dari usaha kelapa sawit. Kondisi tersebut dapat terjadi jika didukung oleh variabel antara yang terdiri dari dua faktor penting, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi potensi SDA (Sumber Daya Alam), potensi SDM (Sumber Daya Manusia), teknologi, dan permodalan. Potensi SDA meliputi luas lahan yang dimiliki dan kemungkinan perluasannya, topografi, iklim dan kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit. Potensi SDM meliputi jumlah penduduk yang dilihat dari angkatan kerja, tingkat pendidikan, jenis dan lapangan pekerjaan. Teknologi meliputi peralatan dan material yang digunakan oleh petani plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit mulai dari tahap pemeliharaan, pemanenan sampai pemasaran, serta rencana peremajaan tanaman.

Di antara berbagai aspek faktor internal tersebut, aspek ketersediaan potensi lahan (SDA) dan tenaga kerja (SDM) merupakan determinan utama bagi pengembangan dan keberlangsungan usaha perkebunan mengingat sifat dari pengelolaan perkebunan di Indonesia hingga saat ini masih tradisional dan belum pada tahap penggunaan teknologi modern seperti halnya terjadi pada pengembangan perkebunan di negara maju. Namun demikian dengan potensi ketersediaan lahan yang masih luas sementara tenaga kerja yang akan terserap juga cukup besar, maka pengembangan perkebunan merupakan strategi yang cukup signifikan dalam peningkatan pembangunan dan mengurangi tingkat pengangguran yang selama ini terjadi.

Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, iklim investasi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjamin kelancaran pengembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya pola PIR-BUN, agar pembinaan usaha perkebunan pada pola ini tetap berlanjut dan berkembang. Iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dana bagi perkebunan baru dan peremajaan tanaman bagi petani plasma yang lama. Sementara pemasaran hasil TBS diperkirakan merupakan aspek yang sangat penting untuk dilihat, terutama dalam melihat kecenderungan hubungan inti dan plasma. Semakin terbuka peluang pemasaran di luar perusahaan inti, diperkirakan akan mempengaruhi kinerja kerjasama pemasaran antara inti dan plasma yang selama ini telah dibangun. Di samping itu, peran kelembagaan ekonomi (seperti KUD) sangat penting untuk mempersatukan para petani plasma agar mampu mandiri dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dari pemeliharaan hingga pemasaran.



Gambar 1.1.
Kerangka Pikir Penelitian

Hubungan kemitraan yang baik antara inti dan plasma serta didukung oleh faktor internal dan eksternal yang positif akan berdampak terhadap kemandirian petani plasma. Pola kemitraan yang harmonis serta kemandirian petani plasma dengan sendirinya akan mendorong

peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit di suatu daerah.

1.5. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Provinsi Riau dengan pertimbangan sebagai provinsi kedua yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia sesudah Provinsi Sumatera Utara. Data terakhir menyebutkan, bahwa pada tahun 2002 luas perkebunan kelapa sawit di Riau daratan adalah 1.020.000 hektar dan Riau kepulauan 4.500 hektar (BPS Riau 2002). Menurut rencana pemerintah daerah Provinsi Riau, pada tahun 2020 areal kelapa sawit akan dikembangkan menjadi 2,6 juta hektar (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2003). Luasnya areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang hampir ada di setiap daerah tingkat II, maka studi ini hanya dilakukan pada satu kabupaten, yakni Kabupaten Siak. Pilihan kabupaten ini dengan mempertimbangkan: 1) memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang relatif luas, 2) adanya kebun kelapa sawit yang dikelola negara dan swasta, 3) masih berjalannya hubungan inti dan plasma pada pola PIR, 4) adanya pabrik pengolahan CPO milik negara dan swasta, 5) kelapa sawit merupakan andalan yang berpotensi untuk dikembangkan, dan 6) mudah dijangkau.

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak tersebar di delapan kecamatan, namun dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya maka kajian ini hanya berfokus pada satu areal perkebunan kelapa sawit milik negara (PTPN V), yaitu wilayah perkebunan kelapa sawit Sei Buatan. Pada tingkat struktur administrasi pemerintahan, Perkebunan Sei Buatan ada dalam Kecamatan Dayun. Dari sebelas (11) desa yang termasuk Kecamatan Dayun, fokus penelitian hanya dilakukan di Desa Sialang Sakti. Namun kami juga melakukan pengamatan dan wawancara sepintas pada penduduk di desa lain yang masih masuk dalam Kecamatan Dayun.

Responden/Informan

Penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit, baik pada tingkat pemerintahan maupun pelaksana di lapangan. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan terhadap 100 responden dari petani plasma yang dipilih secara *purposive quato sampling*. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan dari berbagai *informan* yang dianggap dapat memberikan berbagai informasi dalam menjelaskan makna dari tujuan penelitian, khususnya tentang isu-isu pengembangan usaha kelapa sawit (dari hulu ke hilir) dalam kaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Informan atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) diperoleh melalui sistem *snowballing sampling* sehingga data yang diperoleh dapat komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, khususnya dinamika dan prospeknya, telah dikumpulkan data primer dan sekunder dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Data primer kuantitatif diperoleh melalui teknik survei terhadap responden terpilih dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Survei ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum kondisi sosial-ekonomi dari kehidupan petani PIR kelapa sawit di lokasi penelitian.

Pengumpulan data primer yang bersifat kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), FGD (*focus group discussion*) dan pengamatan lapangan (*field observation*). Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang relevan dalam studi ini dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun dengan mengacu kepada tujuh kata kunci pertanyaan (*seven magic words*), yaitu apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa dan sejauh mana. FGD dilakukan pada koordinator kelompok petani kelapa sawit sebanyak delapan (8) orang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh makna penelitian menurut pemahaman kelompok berdasarkan hasil diskusi yang

terfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan keberlangsungan usaha ini (Bungin, 2003:131). Pengumpulan data kualitatif ini dilakukan oleh tim peneliti yang dibantu alat perekam (*tape recorder*), dan hasilnya berupa catatan lapangan (*field note*). Sedangkan teknik pengamatan dilakukan untuk saling melengkapi informasi yang diperoleh, khususnya berkaitan dengan kegiatan petani kelapa sawit, agar lebih memahami isu yang muncul di masyarakat tersebut. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, lingkungan tempat tinggal petani kelapa sawit, dan lingkungan pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO).

Data sekunder (makro dan mikro) dikumpulkan sebelum dan selama penelitian lapangan melalui berbagai sumber, antara lain BPS, Kantor Statistik Daerah, Departemen/Dinas terkait, Bappeda, Perguruan Tinggi, Kantor Desa, KUD, dan Perpustakaan. Keberadaan data ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran konsep, teori atau informasi yang relevan dengan subyek penelitian; terutama dalam memahami peluang dan tantangan pada penyerapan tenaga kerja di sektor usaha kelapa sawit.

Analisa Data

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, baik data kuantitatif maupun kualitatif, dianalisa secara deskriptif analitik. Kedua bentuk data tersebut akan saling mengisi dalam memahami isu-isu yang muncul pada masyarakat petani pola PIR perkebunan kelapa sawit, khususnya di daerah yang menjadi fokus kajian. Analisa data kuantitatif, terutama untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi sosial-ekonomi tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, data kualitatif dianalisis untuk menjawab fenomena dan isu-isu ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit di lokasi penelitian. Selain kedua data primer tersebut, digunakan pula data sekunder sebagai penunjang dan pembanding dalam menganalisis temuan-temuan di lapangan. Keterpaduan data-data tersebut diharapkan dapat memperkaya analisis dalam menjawab

permasalahan yang muncul pada penelitian ini, sehingga mencerminkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2004 yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) tahap persiapan pada bulan Februari hingga Bulan Mei; 2) tahap penelitian lapangan pada Bulan Mei; dan 3) tahap pengolahan data hingga penulisan pada Bulan Juni hingga Bulan Nopember. Kegiatan lapangan dilaksanakan selama 14 hari kerja dengan pembagian waktu di Kota Provinsi, Kota Kabupaten dan lokasi penelitian. Pengumpulan data primer melalui survei dilakukan oleh kelompok pemuda setempat sebagai pewawancara yang terlebih dahulu dilatih oleh peneliti. Kegiatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam, FGD dan pengamatan dilakukan oleh peneliti. Struktur pembagian kerja di antara peneliti dan tenaga pewawancara tersebut dimaksudkan agar waktu yang sangat singkat dapat diperoleh data yang cukup sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Sistimatika Penulisan

Buku ini terdiri dari enam bab, yaitu *bab pertama* pendahuluan yang mengantarkan kenapa studi ini dilakukan yang diawali dengan latar belakang penelitian, permasalahan dan tujuan, ruang lingkup, kerangka pikir dan metode penelitian. *Bab kedua* menggambarkan kondisi dan situasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau umumnya dan Kabupaten Siak khususnya dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang kondisi geografi dan sejarah perkebunan, kondisi sumber daya alam dan potensi perkebunan kelapa sawit, kondisi sumber daya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, serta sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang mendukung usaha perkebunan kelapa sawit. *Bab ketiga* adalah pembahasan tentang kondisi petani plasma perkebunan kelapa sawit saat ini dilihat dari latar belakang sosial demografi, pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta kepemilikan dan strategi kelangsungan hidupnya. *Bab keempat*

membahas hubungan inti dan plasma dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada bagian ini aspek yang dikaji meliputi kemandirian petani plasma dalam pengelolaan usaha kelapa sawit, hubungan inti-plasma dan kelembagaan ekonomi yang mendukung pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit. Pada aspek hubungan inti-plasma akan dijelaskan kinerja pengelolaan, produksi dan pemasaran perkebunan kelapa sawit di tingkat inti dan plasma. Sedangkan kemandirian petani plasma dilihat dari kemampuan permodalan, penggunaan teknologi dan keberlangsungan pengusahaan perkebunan. Sementara itu, aspek kelembagaan akan dibahas tentang peran dan fungsi kelembagaan pertanian di tingkat desa terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit. *Bab kelima* adalah pembahasan tentang prospek penyerapan tenaga kerja pada komoditi kelapa sawit baik pada sektor hulu, maupun sektor hilir dilihat dari aspek kesiapan dan dukungan pemerintah, perusahaan/swasta dan petani sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam pengembangan usaha ini. *Bab keenam* merupakan kesimpulan yang diikuti dengan alternatif kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit, di sektor hulu maupun hilir.

BAB II

KABUPATEN SIAK DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2.1. Pengantar

Bab ini akan menguraikan gambaran umum perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak dan Propinsi Riau yang merupakan sebagai dasar penjelasan untuk bagian bagian berikutnya. Dalam hal ini, perkembangan perkebunan kelapa sawit akan dilihat dari pemanfaatan lahan dan sejarah perkebunan, serta potensinya yang dibedakan atas potensi sumber daya manusia dan potensi ekonomi.

Kabupaten Siak dibentuk tahun 1999 berdasarkan Undang - Undang No. 53 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Luas Kabupaten Siak 8.556,09 km² yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Bengkalis yang terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Untuk mencapai Kabupaten ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui darat dengan jarak tempuh \pm 100 km dan Sungai Siak dengan waktu tempuh kurang lebih sama sekitar tiga jam.

Dalam usia yang masih muda, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupaya meningkatkan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor yang terungkap pada visi pembangunan Kabupaten Siak, yaitu sebagai pusat Kebudayaan Melayu didukung dengan sektor agribisnis dan agroindustri. Visi pembangunan tersebut merupakan implementasi dari visi pembangunan Provinsi Riau, yaitu sebagai pusat perekonomian dan pusat Kebudayaan Melayu. Dasar gerak pembangunan Kabupaten ini adalah memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berupa pertanian dan perkebunan dalam arti luas pengembangan kegiatan ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri dengan tujuan akhir adalah peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi tersebut diharapkan mampu mendorong Kabupaten Siak menjadi pusat perekonomian di wilayah Provinsi Riau pada tahun 2020. Selain pembangunan ekonomi, Kabupaten Siak juga mendorong kegiatan pariwisata dengan menetapkan Kabupaten Siak sebagai pusat Kebudayaan Melayu karena pada abad ke-16 hingga abad ke-20 merupakan pusat Kerajaan Melayu terbesar yang disebut Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sisa-sisa kejayaan Kerajaan Melayu di Kabupaten Siak masih tampak pada beberapa bangunan seperti Istana Siak, Mesjid dan makam raja-raja Siak yang dijadikan objek pariwisata.

Secara umum, bab ini akan menggambarkan daerah penelitian dilihat: 1) Potensi Geografis meliputi kondisi geografi, iklim dan topologi wilayah, 2) Dinamika Perkebunan dalam perspektif sejarah, 3) Potensi Sumber Daya Manusia dilihat dari kuantitas, komposisi dan kualitasnya, dan 4) Potensi ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kelembagaan ekonomi yang ada.

2.2. Potensi Geografis

Keberhasilan komoditi kelapa sawit sangat ditentukan oleh potensi geografis di daerah tersebut. Mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Selardi (2003:11-14), ada tiga syarat kondisi yang mendukung tumbuh kembangnya kelapa sawit yaitu: *pertama* curah hujan yang merata di sepanjang tahun; *kedua* penyinaran matahari yang cukup; dan *ketiga* jenis tanah *latosol* dan *aluvial*. Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memenuhi ketiga syarat tumbuh kembangnya kelapa sawit, sehingga tidak mengherankan bila komoditi ini akan diusahakan untuk dikembangkan oleh berbagai pihak. Curah hujan dan penyinaran matahari yang cukup bagi tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Siak yang berada pada posisi 1° LU - 0° LU dan 100° - 102° BT. Dilihat dari gambaran geologi wilayah ini tersusun dari batuan sedimen, batuan lanau, lignit dan endapan *aluvium* yang terdiri dari lipatan *antiklin* dan *sinklin* dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah *podlik* berwarna merah kekuningan

berasal dari bebatuan dan tanah basah berbentuk rawa-rawa (KPDE Kabupaten Siak, 2003). Berdasarkan kondisi geografis tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai salah satu sektor unggulan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Pemanfaatan lahan sebagai perkebunan di Propinsi Riau telah dilakukan sejak tahun 70-an yang diawali dengan komoditi karet yang sejak saat itu tren perkebunan mengalami peningkatan. Kabupaten Siak yang awalnya termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis, pembukaan lahan perkebunan sejak tahun 1982 seluas 7.000 hektar hingga saat ini terus memperlihatkan peningkatan luas dengan laju peningkatan per tahun mencapai 7,88 persen. Namun di sisi lain persentase pemanfaatan lahan hutan mengalami penurunan ditunjang dengan semakin maraknya HPH di Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan menunjukkan, bahwa lahan yang belum dimanfaatkan di kabupaten ini sebesar 1,6 persen atau sekitar 13.658 hektar (BPS Kabupaten Siak, 2003). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka wilayah Kabupaten Siak masih memiliki peluang pengembangan perkebunan dengan komoditi utama kelapa sawit. Kondisi ini juga didukung oleh potensi geografis Kabupaten Siak, hingga saat ini penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 15 persen per tahun. Titik peningkatan perkebunan terjadi pada tahun 98-an seiring dengan mudahnya investor masuk ke Indonesia.

Selain kondisi geografi di atas, posisi Kabupaten Siak yang berada di kawasan *Hinterland Area* kerja sama ekonomi regional “SIJORI” (Singapura, Johor, Riau) dan kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Singapura (*Growth Triangle/GT – IMS*) sebagai salah satu alternatif tempat persinggahan kapal niaga dari kawasan tersebut turut mendukung kabupaten ini dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit. Secara langsung maupun tidak langsung, posisi tersebut memberi peluang bagi Kabupaten Siak untuk pengembangan relokasi industri dan perdagangan internasional.

2.3. Dinamika Perkebunan Dalam Perspektif Sejarah

Pembahasan tentang dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah sangat relevan bila terlebih dahulu memahami sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia. Informasi tersebut menjadi penting untuk mengetahui keberadaan perkebunan dan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, di Indonesia yang telah melalui proses sejarah cukup panjang. Selain itu, dengan memahami sejarah latar belakang perkembangan perkebunan diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih runtut dan jelas, antara perkembangan perkebunan secara umum dan perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebagai inti dalam pembahasan buku ini. Sub bagian ini akan diawali gambaran sekilas sejarah perkebunan di Indonesia, yang dilanjutkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan di lokasi penelitian.

2.3.1. Sekilas sejarah perkebunan di Indonesia

Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia diawali sejak lebih dari 400 tahun yang lalu, ketika Nusantara menjadi salah satu jalur lalu lintas dan tujuan perdagangan komoditi rempah-rempah oleh bangsa Asia dan Eropa (Pakpahan, 2004:277-291). Pada awalnya produk utama perkebunan yang diperjualbelikan adalah lada, pala, cengkeh, kina dan kayu manis yang kemudian semakin berkembang pada komoditi perkebunan seperti tembakau, kopi, kakao, karet, gula dan kelapa sawit. Perdagangan komoditas perkebunan ini mengalami perubahan ketika Bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka sebagai bentuk *imperialisme* untuk menguasai perdagangan di kawasan nusantara, yaitu pada tahun 1511. Jalur perdagangan ini dikuasai sekitar 86 tahun dan makin melemah sebagai akibat kekalahan dalam perebutan daerah kekuasaan dengan negara lain.

Kemudian, pada tahun 1569 kekuasaan Bangsa Portugis tersebut diambil alih oleh Bangsa Belanda yang saat itu mulai memperluas daerah kolonialnya di wilayah nusantara. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan *Verenigde Oud Compagny* (VOC) yang bertujuan untuk

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui monopoli perdagangan komoditas rempah-rempah dan perkebunan di daerah Jawa dan Sumatera. Setelah melewati berbagai peperangan dengan raja-raja di Jawa dan Sumatera seperti Perang Padri, lahirlah sejarah perkembangan baru perkebunan di wilayah nusantara dengan diberlakukannya *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) oleh Johannes Van Den Bosch (1830-1870). Salah satu dampak dari pelaksanaan tanam paksa pada saat itu adalah meningkatnya pembukaan lahan perkebunan di Jawa dan Sumatera, seiring dengan terbukanya jalur transportasi darat di dua daerah tersebut. Selama periode tanam paksa, kegiatan perdagangan hasil komoditi perkebunan dikuasai penuh oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.³

Lalu lintas perdagangan komoditi perkebunan dari Nusantara kembali semakin ramai terutama setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, yang mempersingkat jalur pelayaran kapal-kapal dari Eropa ke Asia dan sebaliknya. Dibukanya jalur pelayaran melalui terusan Suez pada saat itu telah berdampak terhadap masuknya investasi swasta asing (di luar pemerintah kolonial) untuk mengembangkan perkebunan-perkebunan besar (*onderneming*) di daerah Jawa dan Sumatera. Awal masa tersebut dikenal dengan pemberlakuan reformasi agraria (*Agrarian Arch*) oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Inti dari reformasi agraria tersebut adalah mengizinkan swasta asing mengusahakan tanah dengan komoditas tertentu yang mempunyai manfaat ekonomi dan dapat diperdagangkan di pasar internasional. Sejak saat itu perkembangan pengelolaan perkebunan di wilayah nusantara (termasuk perkebunan kelapa sawit) berkembang pesat ditandai dengan pembukaan lahan perkebunan baru oleh perusahaan besar dari negara-negara Eropa termasuk oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri.

³ *et Arbeidesregime op de grootlandbouwondernimengen aan Sumatera's Oostkust in bet begin van de twintigste eeuw*" yang diterjemahkan oleh Koesalah Subgyo Toer "Menjinakkan Sang Kuli : Politik Kolonial, Tuan Tanah dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke 20" Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

2.3.2. *Perkembangan perkebunan kelapa sawit*

Pada dasarnya tanaman kelapa sawit bukan tanaman asli dari Indonesia. Menurut catatan sejarah habitat asli tanaman kelapa sawit berasal dari kawasan Afrika Barat khususnya di bagian timur Nigeria yang terkenal dengan sebutan "*The West African Palm Belt*". Tidak ditemukan catatan pasti sejak kapan tanaman kelapa sawit telah menjadi komoditi perdagangan di wilayah tersebut. Namun pada awal abad ke-16 diketahui perkembangan penanaman kelapa sawit semakin meluas ke Brazil seiring dengan berkembangnya perdagangan budak perkebunan (Chan, 2003:22-23). Sedangkan di kawasan Asia Tenggara tanaman kelapa sawit pertama kali ditanam pada tahun 1848, tepatnya di *Botanical Garden Buitenzorg*, yang saat ini dikenal dengan Kebun Raya Bogor. Pada awal penanaman di Kebun Raya Bogor tersebut adalah sebagai tanaman hias (*ornament*) karena karakteristik pohon kelapa sawit yang memiliki nilai seni keindahan.

Di Indonesia, pembukaan perkebunan kelapa sawit besar pertama kali pada tahun 1911 yang diprakarsai oleh Maskapai Perdagangan Hindia Belanda di daerah Sumatera Timur. Sejak saat itu pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit meluas ke daerah lain seperti di Aceh, Sumatera Selatan dan Jawa sebagai perkebunan kelapa sawit milik Belanda, Perancis, Inggris dan Belgia. Pada saat itu jumlah perkebunan kelapa sawit makin meningkat dan pada tahun 1925 mencapai 25 perkebunan di Sumatera Timur, 8 perkebunan di Aceh, 3 perkebunan di Jawa dan 1 perkebunan di Sumatera Selatan. Pada tahun 1939 jumlah perusahaan besar yang mengembangkan perkebunan besar kelapa sawit tersebut meningkat menjadi 66 perusahaan dengan luas areal seluruhnya 105.100 hektar, termasuk sekitar 76.000 hektar adalah tanaman menghasilkan (Lubis, 1992:3-4).

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) perkebunan kelapa sawit di Indonesia banyak yang diganti dengan komoditas tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan persediaan pangan bangsa Jepang selama Perang Dunia II. Kebijakan ini praktis berdampak terhadap perkebunan dan pabrik minyak sawit yang sebagian besar tersebar di

wilayah Sumatera tidak berjalan. Pada tahun 1947 ketika Indonesia memasuki era kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi semua perusahaan perusahaan kolonial dan swasta asing, termasuk perkebunan kelapa sawit milik pemerintah Belanda. Perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasikan tersebut kemudian dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Pada tahun 1960 pemerintah Indonesia menetapkan UU Pokok Agraria tentang Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan besar kelapa sawit. Tujuh tahun kemudian Pemerintah Indonesia menindaklanjuti keputusan tersebut, di mana beberapa perusahaan milik Inggris, Perancis, Belgia dan Amerika (seperti PT London Sumatera dan Sucofindo) yang sebelumnya dinasionalisasikan dikembalikan kepada pemiliknya semula (Dam, 1998 :57-58).

Sejak dikelola oleh pemerintah melalui perluasan perkebunan kelapa sawit oleh PTPN perkembangan perkebunan kelapa sawit meningkat pesat, terutama di wilayah Sumatera yang dikenal sebagai daerah basis kelapa sawit. Apabila pada awal tahun 1960-an luas perkebunan yang diusahakan oleh PTPN sekitar 65.573 hektar, maka pada tahun 2000 jumlahnya telah mencapai 523.447 hektar. Untuk mendukung pengembangan lebih luas, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia turut merangsang perkembangan perkebunan kelapa sawit swasta dengan pemberian kredit perkebunan yang dikenal dengan Program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); berlangsung sejak tahun 1977 hingga tahun 1989. Dampak dari program ini, jumlah perkebunan kelapa sawit swasta meningkat pesat, bahkan melebihi luas yang dikelola oleh PTPN. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan, pada awal tahun 1960-an luas perkebunan kelapa sawit swasta mencapai 40.237 hektar, meningkat dengan tajam pada tahun 2000 menjadi 1.776.284 hektar.

Selain melalui pengembangan perkebunan besar kelapa sawit oleh PTPN dan perkebunan swasta, sejak awal tahun 70-an pemerintah juga merangsang pengembangan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat; dikenal perkebunan kelapa sawit rakyat. Salah satu program

yang dikembangkan adalah pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat)⁴ pada pengelolaan beberapa komoditas perkebunan seperti karet, tebu, gula, kelapa hibrida, coklat, dan tembakau. Penerapan pola PIR ini dengan pertimbangan untuk peningkatan nilai ekspor non migas, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, dan adanya negara donor yang membiayai program tersebut (Dirjen Perkebunan, 1992). Pada awalnya program pengembangan perkebunan semacam PIR disponsori oleh lembaga internasional *Commonwealth Development Cooperation (CDC)* yang dikenal dengan *Nucleus Estate and Smallholders System (NES-System)*⁵. Kemudian muncul program swadana dan swadaya perkebunan dengan sumber dana dari APBN atau APBD, sehingga dalam perkembangannya muncul istilah dan konsepsi baru seperti PIR-Bun, PIR-Trans dan PIR-lokal untuk membedakan bentuk pengelolaan perkebunan dan status asal peserta PIR.

Seperti telah disinggung pada bagian pertama, pengembangan perkebunan pola PIR mempunyai tujuan utama untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi petani perkebunan dengan memadukan perusahaan perkebunan (inti) dan petani perkebunan (plasma) dalam suatu proses produksi. Dalam pola ini baik inti dan plasma merupakan mitra sejajar dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai inti, perusahaan perkebunan berkewajiban memberi dukungan dalam berbagai kegiatan pengembangan perkebunan sejak dari tahap pemeliharaan, produksi hingga pemasaran komoditi kelapa sawit. Sementara petani sebagai plasma berperan sebagai penghasil bahan baku hasil perkebunan yang dijual kepada perusahaan inti.

Pada praktek pelaksanaan pola PIR, khususnya di perkebunan kelapa sawit, diawali dengan pembukaan daerah perkebunan baru di suatu

⁴ Sejak tahun 1970-1989, strategi pemerintah dalam pengembangan perkebunan dilakukan melalui 4 pola pengembangan, yaitu Pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), Pola Swadaya, Pola Pengembangan Perkebunan Besar, dan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

⁵ Program serupa juga pernah diujicobakan di sejumlah perkebunan di Malaysia melalui proyek *Federal Land Development Authority (FELDA)*.

wilayah yang ditentukan oleh pejabat di tingkat provinsi (gubernur) dengan mempertimbangkan perencanaan tata guna lahan di daerah bersangkutan. Pemerintah pusat berperan sebagai penyedia dana, yang umumnya sebagian besar dana berasal dari bantuan lembaga donor, dengan menunjuk perusahaan perkebunan yang berada dekat lokasi perkebunan sebagai pelaksana. Pada proses pembangunan perkebunan peserta PIR dilibatkan sejak awal seperti pembukaan lahan, pemeliharaan bibit, penanaman, pemupukan, hingga saat tanaman perkebunan siap menghasilkan. Keterlibatan ini merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran bagi calon petani kelapa sawit yang umumnya di daerah asal bukan petani.

Berdasarkan ketentuan umum, setiap peserta PIR memperoleh total tanah seluas 3 hektar dengan rincian lahan kebun 2 hektar, pekarangan (termasuk rumah) 0,25 hektar, dan lahan tanaman pangan 0,75 hektar. Ketika tanaman perkebunan telah menghasilkan komoditi yang dapat dijual, pengelolaan perkebunan diserahkan kepada petani plasma dalam bentuk konversi. Proses selanjutnya adalah penandatanganan akad kredit antara pihak petani plasma, pemerintah (perusahaan perkebunan) dan pihak perbankan yang telah ditunjuk sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan proyek PIR tersebut. Mengacu kepada seluruh proses tersebut dapat diartikan, bahwa pengembangan perkebunan dengan pola PIR baru terwujud apabila konversi telah dilaksanakan. Dengan demikian keberhasilan dalam keberlangsungan konversi tersebut merupakan salah satu tolak ukur, apakah pengembangan perkebunan dengan pola PIR telah berhasil dilaksanakan.

2.3.3. Perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian

Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Riau telah ada sejak tahun 70-an. Khusus Kabupaten Siak yang dulunya bagian dari Kabupaten Bengkalis, pembukaan pertama perkebunan kelapa sawit pada tahun 1982 seluas 7.000 hektar. Sejak saat itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit terus menunjukkan peningkatan dengan laju peningkatan mencapai 15 persen per tahun. Dalam perkembangannya, Provinsi

Riau masih akan melakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara memanfaatkan hutan menjadi perkebunan atau mengkonversikan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pertanahan Daerah Provinsi Riau, saat ini lahan yang telah dimanfaatkan sebagai perkebunan mencapai 22,9 persen atau 195.939 hektar dengan kelapa sawit sebagai komoditi utama. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak sebagai wilayah kajian ini telah mencapai 10 persen dari total seluruh perkebunan Kelapa Sawit yang terdapat di Provinsi Riau, yaitu sekitar 131.168 hektar. Dengan luas areal tersebut, diperkirakan pada tahun 2004 luas areal perkebunan di Kabupaten Siak akan menjadi 168.665 hektar atau mencapai peningkatan 28, 5 persen dari tahun 2003.

Hasil perkebunan kelapa sawit berupa CPO merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Siak. Dilihat dari nilai produksi tahun 2001 adalah 400.639 ton TBS dengan asumsi akan mengalami peningkatan sebesar 25 persen per tahun maka diperkirakan pada tahun 2004 mencapai 817.565 ton TBS. Pada tahun 2002 produksi CPO di Kabupaten Siak mencapai 2,06 juta ton CPO yang berasal dari luas areal tanaman menghasilkan seluas 90.031 hektar maka nilai produktivitas CPO mencapai 2-3 ton per hektar. Sentra kelapa sawit di Kabupaten Siak terdapat di Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Dayun dan Siak Sri Indrapura memiliki potensi CPO mencapai 5,57 ton CPO/hektar/tahun (Dinas Perkebunan Prop. Riau tahun 2002). Lihat tabel 2.1. mengenai proyeksi pencapaian luas areal produksi perkebunan kelapa sawit tahun 2001 hingga tahun 2004.

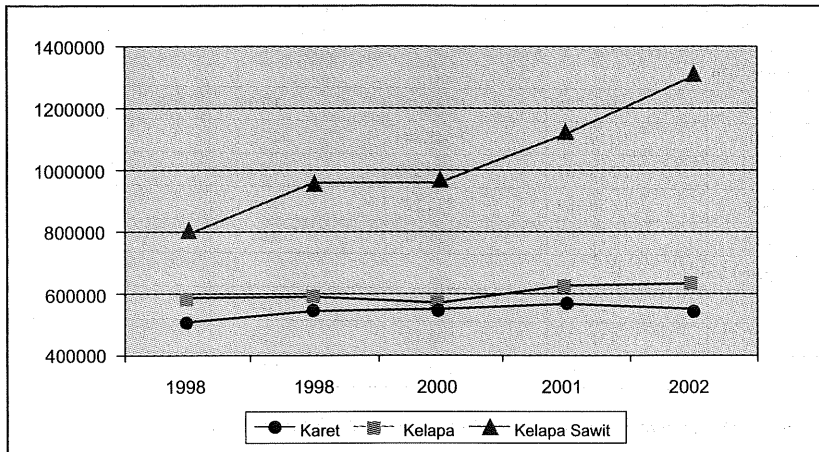
Tabel 2.1.
Pencapaian Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Perkembangan Kelapa Sawit Di
Propinsi Riau dan Kabupaten Siak, Tahun 2000 – 2004

Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Perkembangan Luas Lahan
Provinsi Riau				
2000	966.786	1.792.481	1,85	
2001	1.119.798	2.645.844	2,36	15,83
2002	1.313.467	3.679.552	2,80	17,29
2003	1.486.989	3.832.228	2,58	13,21
2004	1.517.996	4.641.943	3,06	2,09
Kabupaten Siak				
2001	120.246	400.693	3,33	
2002	131.128	508.171	3,88	9,05
2003	131.168	420.031	3,20	0,03

Sumber : Diolah berdasarkan data BPS Propinsi Riau, 2003 dan BPS Kabupaten Siak, 2002.

Dilihat dari luas areal Kabupaten Siak yang masih banyak belum dimanfaatkan serta kondisi perkebunan karet yang sudah tidak produktif lagi, maka kabupaten ini masih memiliki peluang cukup besar untuk pengembangan lahan baru, khususnya perkebunan kelapa sawit. Potensi pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit yang masih tersedia sekitar 118.349 hektar yang berasal dari usulan pengembangan masing-masing kecamatan tahun 2003; dengan target perluasan sekitar 17.000 hektar. Di antara kecamatan tersebut, Kecamatan Dayun memiliki perkebunan kelapa sawit terluas mencapai 23.224 hektar atau hampir 3 persen dari total luas kabupaten dengan produksi pertahun sekitar 276.414 ton CPO. Hal ini menunjukkan, tingkat kesuburan tanah di kecamatan ini sangat sesuai untuk pengembangan perkebunan sehingga sebagian besar lahan di wilayah ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pola perkebunan Kelapa Sawit yang terdapat di Kecamatan Dayun umumnya adalah Pola PIR Trans sebagai salah satu Pola PIR yang dikelola oleh PTPN V melalui program transmigrasi.

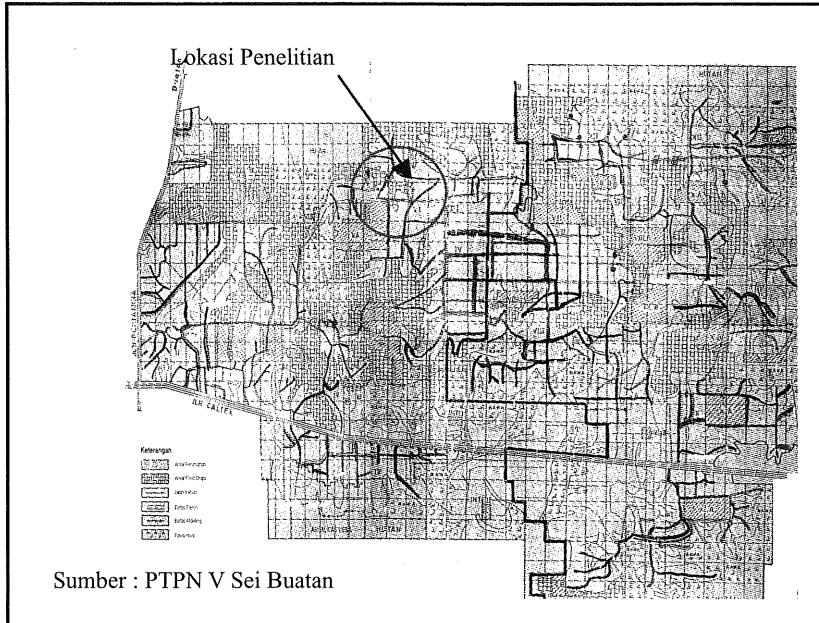
Gambar 2.1.
Perkembangan Luas Areal Perkebunan (hektar) pada
Tiga komoditi terbesar di Provinsi Riau



Sumber : Diolah berdasarkan data BPS Provinsi Riau, 2003

Di lokasi penelitian, tepatnya perkebunan kelapa sawit Sei Buatan Kecamatan Dayun, pembukaan lahan pertama kali dilakukan pada sekitar awal tahun 1980-an. Berdasarkan data tahun 2000, perkebunan ini memiliki luas lahan sekitar 8.002 hektar dengan jumlah petani plasma 4.001 orang yang melingkupi 12 *afdeling*. Pembukaan lahan tersebut terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi melalui pengembangan perkebunan pola PIR yang dibiayai sepenuhnya oleh bantuan dana *Asian Development Bank* (ADB). Pembukaan lahan perkebunan pertama di lokasi ini adalah di Desa Sialang Sakti, sedangkan di desa lain yang termasuk perkebunan ini kegiatan pembukaan lahan dimulai pada sekitar tahun 1986-1989. Perbedaan waktu dalam pembukaan lahan perkebunan tersebut tergantung dari asal pendanaan PIR tersebut, sehingga masyarakat di lokasi perkebunan mengenal pembagian wilayah kebun dengan sebutan PIR ADB, PIR Bank Dunia, PIR Swadana dan sebutan lainnya. Lihat peta 1 peta kawasan perkebunan kelapa sawit Sei Buatan tahun 1993.

Peta 1
Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Sei Buatn
Tahun 1993



Pelaksanaan program PIR di lokasi penelitian melibatkan pengiriman ratusan keluarga transmigran yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Transmigran dari Pulau Jawa diantaranya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara transmigran dari wilayah Sumatera sebagian besar berasal dari Sumatera Utara yang disebut sebagai peserta PIR transmigran lokal (translok) yang terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok asal Jawa-Medan dan kelompok asal suku Batak yang ditandai dengan sebutan marga pada nama mereka.

Pada awalnya sebagian besar peserta PIR dari Pulau Jawa belum memahami teknik budidaya kelapa sawit dengan baik. Bahkan di antara mereka mengakui baru mengenal budidaya tanaman kelapa sawit pada saat tiba di lokasi penempatan. Untuk memperoleh

pengetahuan teknik pengelolaan kelapa sawit, selain melalui bimbingan perusahaan inti, mereka juga banyak mendapatkan pengetahuan tersebut dari para translok asal Sumatera Utara. Hal tersebut karena peserta PIR asal Sumatera Utara tersebut telah memiliki pengetahuan tentang teknik pengelolaan kelapa sawit dengan baik, karena sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga petani kelapa sawit. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri jika saat ini mereka yang dikenal sebagai petani kelapa sawit yang “sukses” di daerah penelitian selalu dikaitkan dengan petani asal Sumatera Utara.

2.4. Potensi Sumber Daya Manusia

Sub bagian ini akan menggambarkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lokasi penelitian, baik dilihat pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Gambaran ini dianggap penting mengingat potensi SDM merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan pembangunan daerah. Ada dua hal yang akan diuraikan, yaitu: 1) potensi penduduk dilihat dari sisi jumlah dan komposisi penduduk; dan 2) kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.4.1. Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Siak adalah 272.986 jiwa dengan sex ratio 110. Dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten lain di daratan Riau, maka jumlah penduduk Kabupaten Siak relatif rendah yang mencapai 5,02 persen dari total keseluruhan penduduk Provinsi Riau. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak pada periode 2000-2002, yaitu 6,92 persen, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau. Namun tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, karena Kabupaten Siak termasuk kabupaten dengan tingkat kepadatan yang rendah, yaitu 32 jiwa/km² (BPS Propinsi Riau, 2003).

Komposisi umur penduduk Provinsi Riau dan Kabupaten Siak tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Mayoritas penduduk Kabupaten Siak berusia 15 tahun ke atas dengan proporsi 68,7%. Keadaan tersebut menunjukkan, bahwa komposisi penduduk usia tua dan usia muda (berusia 15 tahun ke bawah) tidak memperlihatkan perbedaan proporsi yang mencolok. Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk Provinsi Riau dan Kabupaten Siak termasuk kategori konstruktif⁶. Hal tersebut menggambarkan, bahwa Provinsi Riau dan Kabupaten Siak secara kuantitas memiliki SDM yang cukup memadai dilihat dari banyaknya penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas. Nilai ratio ketergantungan umur (*age dependency ratio*) di kedua wilayah tersebut juga tidak terlalu berbeda, yaitu masing-masing 53 untuk Provinsi Riau dan 49 untuk Kabupaten Siak. Gambaran tersebut menunjukkan, bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja maka terdapat 53 dan 49 orang penduduk bukan usia kerja atau penduduk berusia kurang 15 tahun dan penduduk berusia lebih dari 65 tahun.

Dalam kaitannya dengan angkatan kerja menunjukkan, bahwa persentase angkatan kerja Kabupaten Siak sebesar 49,8 persen (Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2002). Angka ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau, yakni mencapai 87 persen. Berdasarkan nilai di atas, maka angka partisipasi angkatan kerja (APAK) di Kabupaten Siak cukup tinggi, yaitu 57,6 persen. Tingginya APAK tersebut sangat dirasakan oleh pihak pemerintah daerah, karena tidak sebanding antara penyerapan tenaga kerja dengan *supply* tenaga kerja. Masalah ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply* disebabkan oleh usia Kabupaten Siak yang baru berumur empat tahun, sehingga program-program pembangunan yang menarik investasi masih sangat terbatas. Selain itu juga, masalah tersebut sangat berkaitan dengan posisi Kabupaten Siak sebagai sentral industri yang menyebabkan tingkat migrasi menjadi tinggi, yaitu

⁶ Konstruktif adalah karakteristik penduduk suatu daerah jika penduduk yang berada dalam kelompok termudah jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada suatu daerah dimana angka kelahiran turun dengan cepat, dan angka kematian rendah (Bagoes, 2000:39).

dengan pertumbuhan angkatan kerja hampir mencapai 6 persen. Dari 995.701 penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja, sebesar 50,3 persen bekerja di sektor pertanian; terbanyak di pertanian pangan dan perkebunan. Gambaran tersebut memperlihatkan, bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk Kabupaten Siak selain di sektor industri pengolahan.

Berdasarkan survei tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau tahun 2000, di Kabupaten Siak terdapat 15.000 orang penganggur yang diperkirakan akan meningkat menjadi 19.000 orang pada tahun 2005. Estimasi angka pengangguran tersebut tidak termasuk dengan peristiwa yang sifatnya tidak biasa seperti PHK karena perusahaan gulung tikar. Data jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak sampai tahun 2002 mencapai 5.344 orang, dengan perbandingan dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Dari empat laporan perusahaan Industri di Kabupaten Siak, per Januari 2002 tercatat telah menerima tenaga kerja sebanyak 530 orang. Dilihat secara perbandingan sederhana, maka penyerapan tenaga kerja lokal yang terpantau mencapai 14,88 persen.

2.4.2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM pada suatu daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator pengukuran, yang diantaranya adalah angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan hasil Sensus Sosial Ekonomi Nasional tahun 2002, mayoritas penduduk Kabupaten Siak berusia 10 tahun ke atas memiliki tingkat pendidikan tamat SLTA sederajat (39 persen) dan tamat SLTP sederajat (28 persen). Keadaan tersebut sangat berbeda, apabila dibandingkan dengan angka tingkat Provinsi Riau yang mayoritas berpendidikan tamat SD (32 persen) dan masih banyak yang penduduk yang tidak tamat SD. Gambaran tersebut memperlihatkan, bahwa SDM di Kabupaten Siak termasuk dalam katagori yang berkualitas bila dilihat dari persentase

penduduk yang berpendidikan minimal tamat SLTA sederajat mencapai 45,9 persen (lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2
 Distribusi Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut
 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2002

Tingkat Pendidikan	Kabupaten Siak		Provinsi Riau	
	N	%	N	%
Tidak/belum tamat SD	8.696	4,2	941.791	22,7
Tamat SD	43.170	21,0	1.333.385	32,1
Tamat SLTP sederajat	59.410	28,9	766.373	18,4
Tamat SLTA sederajat	81.475	39,6	970.286	23,4
Tamat Diploma/PT	13.138	6,4	143.007	3,4
Jumlah	205.889	100,0	4.154.842	100,0

Sumber : Diolah berdasarkan data BPS Provinsi Riau, 2003 dan BPS Kabupaten Siak, 2003.

Dilihat dari angka melek huruf, penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Siak tahun 2002 adalah 98,2 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka melek huruf di tingkat Provinsi Riau tahun 1999 dan 2002. Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka angka melek huruf untuk laki laki dewasa lebih tinggi dibandingkan angka melek huruf perempuan dewasa. Berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS), dengan semakin bertambahnya usia maka APS pun mengalami penurunan. Di Kabupaten Siak penurunan tertajam pada APS usia 16 – 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan angka putus sekolah tertinggi pada umur 16 – 18 tahun (lihat Tabel 2.3).

Tabel 2.3
Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah
Menurut Kelompok Umur, 2002

	Kabupaten Siak	Provinsi Riau
Angka Partisipasi Sekolah		
Umur 7 - 12 tahun	96,1	96,8
Umur 13 - 15 tahun	94,4	84,5
Umur 16 - 18 tahun	57,1	53,9
Umur 19 - 24 tahun	6,0	8,8
Angka Putus Sekolah		
Umur 7 - 15 tahun	0,9	1,9
Umur 16 - 18 tahun	4,6	7,4
Umur 19 - 24 tahun	2,6	6,9

Sumber : Diolah berdasarkan data BPS Provinsi Riau, 2003.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kualitas SDM di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Provinsi Riau pada tahun 2002 relatif tinggi dibandingkan dengan tahun 1999, namun masih lebih tinggi angka IPM Kabupaten Siak yakni 71,2 yang berada pada peringkat keempat setelah Kota Pekanbaru, Kota Batam, dan Kota Dumai. Bahkan nilai IPM Kabupaten Siak juga masih lebih tinggi dari pada Kabupaten Bengkalis yang merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran. Selain itu, Indeks Pembangunan Jender (IPJ) dan Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) di Kabupaten Siak termasuk cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada diperingkat tiga besar (lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4
IPM, IPJ, dan IDJ, 2002

Indikator	Kabupaten Siak	Provinsi Riau
IPM	71,2	69,0
IPJ	59,2	56,7
IDJ	47,3	40,3

Sumber : Diolah berdasarkan data BPS Provinsi Riau, 2003

Gambaran indikator SDM di Kabupaten Siak di atas memperlihatkan, bahwa kualitas SDM di kabupaten tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi. Kondisi ini juga tercermin di Kecamatan Dayun yang menjadi fokus penelitian karena umumnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yaitu tamat SLTA sederajat. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran orang tua untuk mendorong anaknya agar memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak mengalami kesulitan seperti mereka. Bahkan di beberapa desa telah ada masyarakat yang bergelar sarjana, misalnya sarjana pendidikan, ekonomi dan hukum. Namun belum tampak dari para orang tua yang berkeinginan untuk pendidikan anaknya di bidang pertanian dengan alasan agar dapat memasuki lapangan pekerjaan di luar pertanian. Hal ini juga didorong oleh minat generasi muda yang kurang tertarik pada bidang pertanian.

2.5. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi di Kabupaten Siak dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan sarana-prasarana ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah indikator keberhasilan pembangunan daerah, sedangkan lembaga ekonomi adalah sarana yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kedua aspek ini saling berhubungan serta keterkaitan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Siak.

2.5.1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah. Distribusi PDRB tanpa migas menurut lapangan usaha di Kabupaten Siak sebagian besar berasal dari sektor industri pengolahan mencapai hampir 50 persen. Sektor kedua terbesar yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Kabupaten Siak adalah sektor pertanian dengan persentase 31 persen pada tahun 2002. Dilihat dari perkembangan PDRB dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, sektor industri pengolahan memperlihatkan penurunan kontribusi dari tahun ke

tahun, sedangkan kontribusi sektor pertanian terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2001 dan mengalami penurunan pada tahun 2002. Akan tetapi, apabila dilihat dari laju pertumbuhannya sektor industri pengolahan masih berada di tingkat pertama (7,23 % per tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian (7 % per tahun) dengan kontribusi terbesar pada subsektor perkebunan dengan laju pertumbuhan mencapai 10,09 % per tahun.

Dilihat dari perkembangan proporsi PDRB pertahun menunjukkan persentase yang cenderung meningkat, khususnya setelah tahun 1998. Apabila dibandingkan dengan sub sektor pertanian lainnya perkebunan memberikan laju pertumbuhan per tahun yang cukup tinggi setelah perikanan, yakni 7,69 persen. Gambaran tersebut menunjukkan, bahwa sub sektor perkebunan membuka peluang investasi yang besar di masa datang. Perhatian pemerintah melalui program pembangunan daerah pun semakin terlihat, dengan memberikan kemudahan kepada pihak masyarakat maupun swasta untuk melakukan pengembangan perkebunan. Lihat tabel 2.5 mengenai distribusi dan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Siak berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha.

Tabel 2.5.
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak Atas
Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1998 – 2002
(Tanpa Migas)

Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	Laju (98-02)
1. Pertanian, Perternakan, Kehutanan dan Perikanan	22,57	24,39	25,06	24,69	24,60	6,50
Tanaman pangan	4,01	4,06	3,81	3,65	6,54	2,30
Perkebunan	13,64	15,04	16,04	15,84	15,75	7,69
Perternakan	0,50	0,60	0,58	0,56	1,55	6,85
Kehutanan	4,39	4,62	4,57	4,58	4,69	6,10
Perikanan	0,06	0,07	0,07	0,07	1,07	7,71
2. Pertambangan dan Penggalian	1,28	1,36	1,31	1,33	1,33	5,52
3. Industri Pengolahan	58,58	56,66	56,78	57,43	57,55	4,43
4. Listrik dan Air Bersih	0,14	0,16	0,15	0,14	0,14	3,92
5. Bangunan	0,69	0,69	0,67	0,10	0,70	5,07
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,11	7,06	6,83	6,76	6,79	3,85
7. Pengangkutan dan Konsumsi	2,22	2,41	2,36	2,33	2,37	6,03
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,22	3,02	2,84	2,74	2,70	1,25
9. Jasa-jasa Service	4,18	4,25	3,99	3,88	3,33	3,04
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Diolah berdasarkan data BPS Kabupaten Siak, 2002.

Gambaran dari peningkatan sub sektor perkebunan pada PDRB Kabupaten Siak di atas sejalan dengan peningkatan kontribusi perkebunan di tingkat Provinsi. Secara umum, hampir seperempat luasan wilayah Provinsi Riau (2,1 juta hektar) telah mengalami konversi menjadi hutan homogen (perkebunan). Peningkatan ini terutama terlihat pada tiga komoditi utama, yaitu kelapa sawit, kelapa dan karet (lihat Gambar 2.1). Luasnya pemanfaatan perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dari peningkatan tahun ke tahun yang cukup drastis apabila dibandingkan dengan kedua komoditi lainnya. Pada tahun 2002 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau telah mencapai 1,3 juta hektar. Artinya 62 persen lahan telah ditanami oleh kelapa sawit dan sisanya komoditi kelapa, karet dan jenis tanaman keras lainnya (BPS Provinsi Riau, 2003). Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa sub sektor perkebunan masih memiliki peluang investasi yang cukup besar di Provinsi Riau sehingga menjadi sumber daya alam yang diandalkan untuk memberi kontribusi bagi pembangunan, baik sekarang maupun akan datang.

2.5.2. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Sarana ekonomi adalah sarana transportasi darat, koperasi, pasar dan bank. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun kelangsungan perkembangan usaha kelapa sawit.

Transportasi

Secara umum, transportasi di Kabupaten Siak terbagi dua, yaitu transportasi melalui sungai dan darat. Pada awalnya, transportasi sungai merupakan transportasi utama bagi masyarakat di Kabupaten Siak. Sungai Siak merupakan penghubung beberapa wilayah di Kabupaten Siak, bahkan pada sebagian wilayah jalur sungai sebagai sarana utama transportasi. Dengan berlakunya otonomi daerah dan pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Siak merupakan jalan meningkatnya laju pembangunan di Siak. Program

pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Siak adalah pembangunan sarana prasarana transportasi darat yang semakin memperlancar perhubungan antar daerah.

Transportasi darat (sarana jalan) merupakan sarana vital sebagai penghubung antara masyarakat di perkebunan dengan pihak luar lokasi perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya lokasi perkebunan berada jauh dari pusat keramaian dan jalan utama baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Padahal sarana ini merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi penentu berputarnya urat nadi perekonomian masyarakat perkebunan. Baik buruknya sarana jalan dan lancarnya alat transportasi yang menghubungkan antara pusat pemerintahan Kabupaten Siak dan Provinsi Riau juga menjadi salah satu faktor pendorong kesejahteraan masyarakat.

Pemukiman masyarakat di Perkebunan Sei Buatan terletak antara 15 – 35 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Dayun. Lokasi tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi roda dua atau mobil dengan waktu tempuh sekitar setengah jam dari pusat kecamatan. Untuk menuju pusat pemerintah Kabupaten Siak di Kota Siak Sri Indra dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Kecamatan dengan jarak 21 km. Transportasi publik hanya ada dari Kota Pekanbaru ke Kota Siak Sri Indrapura yang dapat ditempuh dengan dua cara. Cara pertama menggunakan transportasi sungai/laut dengan alat transportasi kapal ferry dari Pekanbaru, Bengkalis, Selat Panjang, Batam dan Tanjung Pinang. Cara kedua menggunakan jalur darat dengan bus, mini bus (travel atau kendaraan pribadi) melalui jalur Pekanbaru – Perawang – Siak Sri Indrapura, Pekanbaru – Kerinci Kanan – Simpang Lago – Siak, dan Pelabuhan Buton – Siak.

Secara umum kondisi sarana jalan di perkebunan Sei Buatan adalah jalan tanah yang diperkeras dan berbatu. Pada musim kemarau kondisi jalan akan dipenuhi oleh tanah/debu, terutama ketika iringan truk pengangkut kelapa sawit melewati daerah perkebunan. Pada musim hujan kondisi jalan umumnya menjadi licin, berlobang dan berlumpur sehingga dapat mempengaruhi proses kegiatan pengiriman hasil TBS kelapa sawit ke Perusahaan Kelapa sawit (PKS). Jauhnya

lokasi perkebunan dengan PKS ditambah dengan kondisi jalan, terutama bila hujan, akan membutuhkan waktu tiba di pabrik sehingga berdampak terhadap tingkat *rendemen* kelapa sawit. Untuk menghindari permasalahan tersebut, petani melalui KUD akan menjual TBS ke pabrik terdekat (PTPN V). Buruknya sarana transportasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat perkebunan yang tidak hanya untuk kegiatan perkebunan, namun juga usaha lain yang mendukung pengembangan perkebunan. Untuk mengatasi sarana transportasi tersebut, masyarakat berusaha memperbaiki jalan secara swadana walaupun dengan kemampuan yang sangat terbatas.

Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu sarana ekonomi yang secara langsung sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. KUD pada awalnya terbentuk atas anjuran pemerintah yang berfungsi sebagai sarana penghubung dalam pendistribusian hasil TBS kepada PKS dan pendistribusi pupuk dari perusahaan Inti kepada petani plasma. Dalam rangka peningkatan hasil, maka fungsi KUD pun semakin luas yang tidak hanya mendistribusikan pupuk namun juga mengatur waktu penyiangan, pemupukan, dan panen, bahkan hingga menentukan PKS yang akan menerima TBS dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan hasil penjualan TBS.

Sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat didukung dengan semakin membaiknya pengelolaan KUD, maka usaha KUD pun semakin luas. Salah satu usaha KUD yang berkembang dan menjadi wadah petani adalah sebagai pengganti bank. Selain itu, KUD juga mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk *re-planting* mengingat dana yang dibutuhkan cukup besar di masa yang akan datang. Usaha tersebut kemudian berkembang menjadi usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang cukup memberikan keuntungan yang besar kepada semua anggota. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka KUD dapat mengembangkan usaha lain, yaitu "warserda". Tujuan didirikannya warserda adalah untuk dapat mencukupi kebutuhan para anggota tidak hanya untuk kegiatan

perkebunan namun juga untuk kebutuhan rumah tangga, baik yang dapat diperoleh secara tunai maupun kredit.

Perusahaan Swasta

Di Kabupaten Siak, terdapat sekitar 32 buah perusahaan swasta yang bergerak aktif pada subsektor perkebunan Kelapa Sawit dengan tingkat kapasitas yang berbeda-beda, seperti PT Astra International, PT Indosawit, dan lain-lain. Pada umumnya, perusahaan swasta tersebut tidak memiliki perkebunan sendiri, dan apabila perusahaan tersebut memiliki perkebunan umumnya usia tanaman relatif muda sehingga hasil perkebunan masih rendah. Dengan semakin banyaknya perusahaan swasta ini membuat petani plasma memiliki alternatif lain dalam menjual komoditinya sehingga tidak hanya ke perusahaan negara (PTPN V). Terutama perusahaan swasta yang tidak mempunyai kebun kelapa sawit akan berusaha mengadakan hubungan dengan petani melalui KUD dengan mendatangi, menawarkan, serta membeli hasil perkebunan masyarakat.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional yang terdapat di Kecamatan Dayun merupakan satu-satunya pasar yang terdapat di wilayah tersebut dan hanya ada pada setiap hari Rabu (pasar mingguan). Pasar tradisional tersebut hanya menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti sayur-mayur, ikan segar dan lain-lain. Karena letak pasar yang jauh dari pemukiman penduduk dan keberadaan pasar yang sangat terbatas, maka umumnya masyarakat perkebunan Sei Buatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya tahan lama seperti gula, kopi, teh dan lain-lain membeli dalam jumlah besar (menyetok) untuk kebutuhan beberapa minggu atau sebulan.

Bank

Lembaga perbankan hanya terdapat di Kota Siak Sri Indrapura, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Dalam

pemanfaatannya, hanya sebagian masyarakat perkebunan saja yang menggunakan jasa bank secara langsung dengan alasan aksesibilitas kelembagaan yang sangat sulit dijangkau dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan jasa tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat perkebunan Sei Buatn lebih memilih untuk memanfaatkan jasa perbankan di Kota Pekanbaru. Pilihan tersebut karena Kota Pekanbaru sebagai urat nadi perekonomian Provinsi Riau telah tersedia pelayanan jasa perbankan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis Bank yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, dengan keterbatasan kemampuan masyarakat di lokasi penelitian mendorong masyarakat perkebunan Sei Buatn lebih menggunakan jasa KUD sebagai lembaga alternatif perbankan yang memutar roda perekonomian masyarakat desa.

2.6. Penutup

Keberadaan komoditi kelapa sawit di Propinsi Riau telah ada sejak tahun 70-an yang merupakan pengembangan usaha dari Provinsi Sumatera Utara. Komoditi ini masih menjadi andalan yang memiliki peluang investasi yang cukup besar bagi pembangunan daerah, sehingga pemerintah Provinsi Riau sangat serius untuk makin mengembangkan perkebunan yang tertuang dalam visi dan misi pemerintahnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat melalui pertanian. Kabupaten Siak sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau memprioritaskan perkebunan dalam rancangan pembangunan daerahnya. Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mengabdosi Pola PIR yang dimodifikasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal kelompok miskin merupakan salah satu cerminan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Siak pada usaha perkebunan kelapa sawit. Ide awal pengembangan perkebunan kelapa sawit ini terinspirasi dari keberhasilan petani plasma yang *notabene* merupakan transmigran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui produksi kelapa sawit.

Aspek pendukung lainnya yang menyebabkan kelapa sawit masih menjadi primadona adalah kondisi geografis di Provinsi Riau. Dilihat dari iklim, topografi, struktur tanah, tata air dan kesuburan, wilayah Kabupaten Siak pada khususnya memiliki kesesuaian bagi pertumbuhan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pemanfaatan lahan untuk perkebunan yang awalnya didominasi oleh komoditi karet beralih ke komoditi kelapa sawit, hal tersebut terlihat dari laju peningkatan perkebunan kelapa sawit yang cukup besar mencapai 15 persen per tahun dan terjadi penurunan luas lahan pada perkebunan karet. Aspek lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Siak memiliki tingkat kesadaran untuk berpendidikan yang cukup tinggi semakin mendukung upaya pengembangan sektor perkebunan dalam arti luas, termasuk sektor industri hilir terkait.

Keberadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada dasarnya turut mendukung bagi pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan penduduk. Makin meningkat kesejahteraan dan pengetahuan penduduk, maka makin beragam kebutuhan sarana dan prasarana yang diharapkan ada di lokasi permukiman penduduk khususnya, di ibukota kabupaten umumnya. Khusus bagi masyarakat di perkebunan kelapa sawit, kendala yang sangat dirasakan adalah keterbatasan sarana dan prasarana transportasi darat atau jalan yang merupakan urat nadi masyarakat perkebunan untuk mencapai tingkat keberhasilan petani kelapa sawit. Kerusakan jalan akibat hujan dan struktur jalan yang tidak berimbang untuk kendaraan besar pengangkut TBS ke pabrik, sangat mengganggu proses pemasaran hasil perkebunan dan peluang investasi masuk ke desa di wilayah perkebunan. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah memanfaatkan potensi yang terdapat di daerah tersebut disertai perbaikan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Siak perlu merencanakan segala program pembangunan daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan penduduk agar bermanfaat maksimal dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: Kondisi Sosio- demografi, Pengelolaan dan Strategi Kelangsungan Hidup

Keberadaan perkebunan kelapa sawit Sei Buatan membentuk petani kelapa sawit yang diawali dengan keikutsertaannya pada program transmigrasi, yakni sekitar tahun 80'an. Di antara para transmigran tersebut, pada umumnya ada yang berhasil dan bertahan sampai saat ini, namun ada pula yang putus di tengah jalan dan kembali ke daerah asal. Permasalahan tersebut sangat terkait dengan latarbelakang sosial budaya mereka di daerah asal seperti pekerjaan yang umumnya berbeda seperti guru agama, tukang becak dan sektor *in-formal* lainnya. Mengacu kepada perbedaan tersebut, bab ini akan mendeskripsikan dan mengkaji aspek kehidupan petani perkebunan kelapa sawit dilihat dari kondisi sosio-demografi, pengelolaan perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dan strategi petani dalam mengatasi permasalahan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan memahami kehidupan para petani di perkebunan kelapa sawit, maka diharapkan dapat mengetahui gambaran penyerapan tenaga kerja baik di sektor hulu —kegiatan di perkebunan — maupun prospek tenaga kerja di sektor hilir masa datang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan kelapa sawit di masa datang.

3.1. Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit: kondisi Sosio-demografi

Petani perkebunan kelapa sawit Sei Buatan dilihat dari kondisi sosio-demografi menunjukkan keragamannya karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami kehidupan mereka maka sub bab ini akan menggambarkan kondisi sosio-

demografi para petani tersebut yang meliputi daerah asal, umur dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan mereka.

Daerah asal

Terbentuknya masyarakat perkebunan kelapa sawit di kawasan Sei Buatan sangat terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit pola PIR. Perkebunan ini pertama kali dibuka pada tahun 1980-an dengan dana dari ADB (*Asian Development Bank*), yang dalam pelaksanaannya melibatkan ratusan keluarga transmigran berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dari daerah asal para petani di mana persentase terbesar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu sebesar 36 persen. Kelompok kedua terbesar adalah dari Sumatera Utara sebesar 13 persen, dan sisanya dari D.I. Yogyakarta, Riau, Lampung, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pada umumnya petani yang berasal dari Sumatera Utara di daerah asal mereka juga melakukan kegiatan di perkebunan seperti perkebunan kopi, karet dan kelapa sawit. Latar belakang pekerjaan ini yang membuat petani kelapa sawit asal Sumatera Utara lebih memiliki pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Dilihat dari tahun kedatangan penduduk kawasan perkebunan Sei Buatan dapat dikelompokkan atas tiga tahap, yaitu tahap pertama antara tahun 1983 – 1985, tahap kedua tahun 1986 – 1990, dan tahap ketiga tahun 1991 – 1998. Dari total penduduk yang berhasil diwawancara, sebesar 54,3 persen datang pada tahap pertama, 34,4 persen pada tahap kedua dan 11,3 persen pada tahap ketiga. Kelompok transmigran pada tahap pertama turut berpartisipasi dalam kegiatan awal perkebunan kelapa sawit di Sei Buatan, antara lain dalam kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman bibit dan pemupukan hingga tiba tahap penyerahan kepada petani.

Mengacu kepada tahun kedatangan para petani plasma tersebut berpengaruh terhadap luas lahan yang dimiliki saat ini. Mereka yang datang lebih awal cenderung memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan, bahwa petani plasma yang

lebih awal memasuki lokasi ini lebih mempunyai kemampuan untuk menambah luas lahan sehingga saat ini telah mempunyai lahan kelapa sawit lebih luas dari dua (2) hektar. Data memperlihatkan, bahwa petani yang telah berdiam di lokasi ini sejak antara tahun 1983 hingga tahun 1985 ada 61,9 persen telah memiliki lahan kebun kelapa sawit lebih dari enam (6) hektar. Lahan baru tersebut tidak hanya terdapat di lingkungan tempat tinggalnya namun ada yang telah mengembangkan di luar Kabupaten Siak, bahkan provinsi lain seperti Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Pada umumnya petani plasma yang berhasil adalah mereka yang cukup tahan akan kehidupan awal yang sangat ‘keras’ pada saat tiba di lokasi transmigrasi tersebut. Lihat tabel 3.1 mengenai kepemilikan lahan menurut tahun kedatangan petani plasma.

Tabel 3.1.
Luas Kepemilikan Lahan Kebun Kelapa Sawit
Menurut Tahun Kedatangan Petani Plasma

Tahun Kedatangan	Luas Lahan Plasma (hektar)			Jumlah
	Kurang dari 3	3 - 6	Lebih dari 6	
1983 - 1985	53 (54,1)	16 (50,0)	13 (61,9)	82 (54,3)
1986 - 1990	36 (36,7)	11 (34,4)	5 (23,8)	52 (34,4)
1991 - 1996	9 (9,2)	5 (15,6)	3 (14,3)	17 (11,3)
Jumlah	98 (100,0)	32 (100,0)	21 (100,0)	151 (100,0)

Sumber: Data Primer, Penelitian Ketenagakerjaan Di Perkebunan Kelapa Sawit oleh PPK - LIPI, 2004.

Umur dan Jenis Kelamin

Dalam menganalisa isu ketenagakerjaan, karakteristik umur dan jenis kelamin merupakan faktor penting untuk mengetahui potensi tenaga kerja dan besarnya tenaga produktif yang tersedia, baik laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari jenis kelamin penduduk yang

mengaku sebagai petani kelapa sawit, dari 151 responden hanya satu orang perempuan dan selebihnya adalah laki-laki. Kondisi menunjukkan bahwa laki-laki memiliki peran yang dominan di kegiatan perkebunan kelapa sawit. Sementara seorang perempuan yang mengaku sebagai petani kelapa sawit karena setelah suaminya meninggal dia berperan sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk kelangsungan perkebunan kelapa sawitnya.

Dilihat dari sisi usia petani plasma di perkebunan kelapa sawit menunjukkan, bahwa persentase terbesar adalah mereka berusia di atas 50 tahun (34,4 persen). Pada umumnya kelompok usia ini adalah peserta transmigrasi tahap pertama maupun tahap kedua yang datang sekitar tahun 1983-an dan tahun 1986-an. Sementara itu, petani yang berusia di bawah 40 tahun (20,6 persen) kemungkinan adalah petani pengganti seperti melanjutkan pekerjaan orang tuanya karena sudah meninggal atau sudah tua, keluarga muda atau keluarga anak dari transmigran awal, pendatang baru yang membeli lahan perkebunan kelapa sawit dari petani plasma asli.

Pada 151 rumah tangga terpilih yang mencakup 713 orang (50,4 persen laki-laki dan 49,4 persen perempuan) dilihat dari kelompok umur menunjukkan, bahwa 24,4 persen berumur 0-14 tahun, 15-49 sebanyak 63,7 persen dan 11,9 persen berumur 50 tahun ke atas. Bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, ternyata proporsi laki-laki dan perempuan yang berumur 0-14 tahun hampir sama yaitu berkisar 20 persen dan yang berumur 15-49 tahun berkisar 60 persen. Gambaran ini menunjukkan, bahwa di masyarakat perkebunan kelapa sawit Sei Buatan penduduk usia produktif cukup tinggi yang membutuhkan lapangan pekerjaan agar tidak terjadi tingkat pengangguran di kalangan masyarakat perkebunan kelapa sawit, khususnya pada penduduk usia remaja atau muda.

Pendidikan

Tingkat pendidikan petani plasma di perkebunan kelapa sawit Sei Buatan mayoritas SD ke bawah, yaitu sebesar 70,7 persen dari 151 responden. Sedangkan mereka yang berpendidikan tamat SLTP ada

12,6 persen dan tamat SLTA 16,7 persen. Namun tampaknya tingkat pendidikan ini tidak berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, kecuali untuk mereka yang akan bekerja di luar kegiatan tersebut. Pada umumnya petani plasma memperoleh pengetahuan tentang kegiatan di perkebunan kelapa sawit adalah dengan cara ikut berpartisipasi pada kegiatan pengelolaan kelapa sawit bersama pihak PTPN V, terutama saat baru tiba di lokasi ini. Di samping itu, mereka juga mengikuti kegiatan kelompok tani/KUD untuk mengetahui perkembangan usaha kelapa sawit agar menghasilkan buah kelapa sawit yang baik (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2.
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Petani Perkebunan Sei Buat, Kabupaten Siak, 2004

Umur	Pendidikan yang Ditamatkan			Jumlah	
	Tamat SD ke bawah	SLTP	SLTA	%	N
25-29	-	100,0	-	100,0	1
30-34	-	33,3	66,7	100,0	6
35-39	62,5	16,7	20,8	100,0	24
40-44	60,6	18,2	21,2	100,0	33
45-49	79,4	8,8	11,8	100,0	34
50+	84,7	5,8	9,6	100,0	53
Jumlah	70,7	12,7	16,7	100,0	151

Sumber: Data Primer, Penelitian Ketenagakerjaan Di Perkebunan Kelapa Sawit oleh PPK - LIPI, 2004.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan petani dan peningkatan ekonomi petani plasma kelapa sawit di Sei Buat tampaknya juga berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak-anak mereka. Setelah lebih kurang 30 tahun menjadi petani kelapa sawit, ada kecenderungan tingkat pendidikan kelompok usia muda meningkat. Gambaran ini menunjukkan, bahwa tingkat kesadaran masyarakat petani kelapa sawit di Sei Buat akan pentingnya arti pendidikan

sudah cukup tinggi. Kondisi ini didukung juga dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai dari TK hingga SLTA, baik negeri maupun swasta. Adanya keinginan untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya tercetus dari ungkapan salah seorang peserta FGD sebagai berikut :

“ meninggalkan ilmu lebih baik dari pada meninggalkan harta, Sebagai orang tua berharap agar anak bisa melanjutkan sekolah hingga setinggi-tingginya. Kalau sudah punya ilmu, ciptakan pekerjaan, jangan mencari pekerjaan”.

Pekerjaan

Pada studi ini yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan utama yang dilakukan seminggu yang lalu oleh anggota rumahtangga responden. Dari 151 rumahtangga responden ada 132 orang yang memiliki pekerjaan seminggu yang lalu. Di antara mereka terbanyak mempunyai jenis pekerjaan utama di perkebunan kelapa sawit (78 persen), dan sisanya di luar perkebunan kelapa sawit; walaupun mereka memiliki kebun kelapa sawit. Gambaran tersebut menunjukkan, bahwa telah terjadi mobilitas pekerjaan di masyarakat perkebunan kelapa sawit Sei Buatan karena mereka yang bekerja di luar perkebunan kelapa sawit awalnya juga melakukan kegiatan di perkebunan.

Masyarakat perkebunan kelapa sawit yang bekerja di luar sektor perkebunan ada yang bergerak di sektor formal maupun *in-formal*. Hal ini tergambarkan pula pada anggota keluarga responden yang tidak melakukan kegiatan di perkebunan, yaitu di sektor perdagangan sebesar 6,1 persen, jasa 3,8 persen, profesional 3,8 persen, tata usaha 3,0 persen, peternakan dan perikanan 2,3 persen, produksi/operator 1,5 persen dan kepemimpinan tata laksana 1,5 persen. Apabila dilihat dari sudut lapangan pekerjaan mereka umumnya adalah di sektor non-formal mengusahakan warung kelontong atau makanan, sektor jasa pendidikan dan tata usaha administrasi pemerintah dan non

pemerintah, teknisi produksi/operator seperti sopir, buruh pabrik dan tukang ojek.

Di antara lapangan pekerjaan di luar pertanian tersebut di atas, sektor pendidikan sebagai guru cenderung diminati masyarakat perkebunan kelapa sawit Sei Buatan. Hal ini disebabkan adanya persepsi masyarakat, bahwa status sosial guru masih tinggi dibanding petani kelapa sawit; walaupun dari sisi pendapatan masih rendah. Di samping itu, peluang kerja sebagai guru untuk daerah ini juga didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia memadai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan, baik di pendidikan formal maupun sekolah agama (Madrasah), yang membutuhkan tenaga pendidik. Di antara mereka menganggap kerja petani lebih “rendah” dan berhasil menjadi guru mengungkapkan:

“ ... yah, saya bekerja sebagai guru karena ingin merubah nasib, masak mau jadi pekerja kebun sawit terus”.

Pendapatan Rumah Tangga

Tingkat produksi yang dihasilkan sebuah pohon sawit sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rumah tangga petani plasma perkebunan kelapa sawit. Pada umumnya petani plasma memiliki luas lahan sekitar 2 hektar, dengan produksi antara 1 hingga 1,5 ton TBS per sekali panen (seminggu sekali). Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hasil TBS kelapa sawit yang diperoleh petani plasma satu minggu yang lalu mayoritas (72,8 persen) adalah antara satu hingga 2,1 ton. Sedangkan petani yang menghasilkan TBS di atas 2,5 ton, bahkan mencapai 20 ton ada 27,1 persen, yaitu kelompok petani yang memiliki lahan lebih dari dua hektar. Namun demikian ada petani plasma yang produksi TBSnya di bawah 1 ton, yaitu 11,2 persen responden. Hal tersebut terjadi karena pada saat penelitian dilakukan kondisi perkebunan sedang menghadapi ‘masa trek’. Artinya pohon kelapa sawit sedang tidak banyak menghasilkan buah sawit.

Mengacu kepada beragamnya lapangan pekerjaan anggota rumahtangga petani kelapa sawit tentu berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rumahtangga mereka. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendapatan rumahtangga petani plasma kelapa sawit adalah penghasilan yang diterima kepala rumah tangga dan anggota keluarganya, baik yang berasal dari perkebunan kelapa sawit maupun pekerjaan tambahannya. Pada umumnya pendapatan tambahan rumah tangga petani plasma diperoleh dari hasil pekarangan yang juga ditanami kelapa sawit dan kegiatan non pertanian. Berdasarkan pengakuan responden, pendapatan sebulan terakhir yang diperoleh rumahtangga mereka terbesar antara satu juta sampai empat juta rupiah (59,4 persen) dan di atas empat juta rupiah (22,6 persen). Sedangkan rumahtangga petani plasma yang memperoleh pendapatan di bawah satu juta rupiah ada 18 persen. Ilustrasi 1 di bawah ini menggambarkan salah satu kasus penerimaan petani kelapa sawit, yakni Bapak I pada bulan Februari 2004.

Ilustrasi 1:

Penerimaan Bapak I dari perkebunan kelapa sawit pada dua minggu pertama bulan Pebruari 2004

Harga jual 2.171 Kg TBS (Tandan Buah Segar)	Rp. 1.646.467,-
Bentuk potongan:	
• Angkutan	Rp. 46.676,-
• Ongkos Penimbangan	Rp. 26.052,-
• Idaperta*)	Rp. 31.000,-
• APPKD	Rp. 8.000,-
• Karang Taruna	Rp. 2.000,-
• H. Bendahara	Rp. 1.000,-
• Keamanan	Rp. 1.800,-
• Arisan**)	Rp. 200.000,-
• Iuran Mesjid	Rp. 15.000,-
• Upah buruh panen	<u>Rp. 86.840,-</u>
Total Potongan	<u>Rp. 418.844,-</u>
Total Penerimaan Bersih	Rp. 1.227.623,-

Gambaran total penerimaan bersih di atas, yakni Rp 1.227.623,-, adalah hasil yang diterima seorang petani plasma untuk satu kali panen. Pada bulan Pebruari 2004 bapak I menghasilkan dua kali panen dengan total TBS hampir sama setiap kali panen. Penjualan dilakukan melalui KUD yang saat itu harga TBS Rp. 758,39 per kilogram. Jadi untuk bulan Pebruari bapak I memperoleh pendapatan bersih sekitar dua setengah juta rupiah yang diterima dari KUD setiap transaksi penjualan dilakukan. Pada bulan tersebut termasuk masa paceklik (*trek*), sedangkan pada saat panen TBS berlimpah (*banjir*) pendapatan petani kelapa sawit akan lebih tinggi.

Pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit selain berasal dari hasil plasma sawit cukup besar yang memperoleh pendapatan dari kegiatan lain di luar hasil perkebunan kelapa sawit. Dari 151 rumah tangga yang diteliti, ada 55,0 persen yang memiliki pendapatan tambahan seperti guru, pelayan toko, pegawai KUD, tukang kayu dan sebagainya. Misalnya rumah tangga Bapak M selain memperoleh pendapatan dari kebun kelapa sawit, juga dari pekerjaan lain sebagai tukang kayu dan anaknya sebagai sopir. Pada bulan terakhir pendapatan tambahan Bapak M dari sebagai tukang kayu adalah Rp. 2.00.000,-, sedangkan anaknya Rp. 700.000,- per bulan. Gambaran di bawah ini mencerminkan kasus rumah tangga yang memperoleh pendapatan tambahan, yakni rumah tangga Bapak S, di mana dia dan isterinya bekerja sebagai guru. Rincian gambaran pendapatan rumah tangga Bapak S dapat dilihat pada ilustrasi 2 di bawah ini.

Ilustrasi 2:**Pendapatan Rumah Tangga Bapak S Sebulan Terakhir (Februari 2004)**

Sumber Pendapatan	Jumlah
1. Kebun Kelapa Sawit	Rp. 2.300.000,-
2. Pendapatan Tambahan (KRT)	Rp. 1.000.000,-
3. Pendapatan Tambahan (Istri)	Rp. 1.000.000,-
Total Pendapatan 1 Bulan	Rp. 4.300.000,-

Sumber: Data Primer Penelitian Ketenagakerjaan Perkebunan Kelapa Sawit, PPK-LIPI, 2004

Meningkatnya pendapatan petani plasma kelapa sawit juga tercermin dari kepemilikan barang-barang berharga seperti televisi, alat transportasi (sepeda dan sepeda motor), ternak dan perhiasan. Gambaran ini menunjukkan, bahwa para transmigran yang mengikuti program perkebunan kelapa sawit pola PIR berdasarkan kepemilikan barang 'berharga' yang dimiliki rumah tangga mereka telah terjadi peningkatan. Dilihat dari tahun kedatangan para petani plasma ke lokasi ini, peningkatan kepemilikan barang terutama terlihat pada petani yang telah berdiam cukup lama, yakni sejak lokasi ini dibuka pada tahun 1985. Sedangkan untuk petani yang datang pada tahap akhir, yakni sekitar tahun 1996, paling tidak telah memiliki barang elektronik dan alat transportasi. Gambaran kepemilikan barang berharga pada rumah tangga petani plasma kelapa sawit menurut tahun kedatangannya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3.
Pemilikan Barang Menurut Tahun Kedatangan
Ke Lokasi Penelitian

Jenis Barang	Tahun Datang		
	1985	1990	1996
Elektronik	v	v	v
Alat Transportasi	v	v	v
Ternak	v	-	-
Perhiasan	v	v	-

Sumber: Data Primer Penelitian Ketenagakerjaan Perkebunan Kelapa Sawit, PPK-LIPI, 2004.

3.2. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Para petani plasma perkebunan kelapa sawit dalam mengelola perkebunannya dilakukan petani secara berkelompok yang dikoordinir oleh “kelompok tani”. Di masyarakat perkebunan ini (afdeling 5 dan 6), kelompok tani dibentuk tahun 1987 yang secara struktural berada di bawah KUD Mandiri Palma Jaya dan bertujuan agar kegiatan pengelolaan perkebunan dapat terkoordinir. Di lokasi ini terdapat 28 kelompok tani yang beranggotakan sekitar 16 hingga 28 kepala keluarga per kelompok. Secara struktur merupakan kepanjangan tangan KUD Mandiri Palma Jaya yang membawahi. Selama perjalanannya, jumlah anggota kelompok tidak berubah kecuali nama anggota yang berubah antara lain disebabkan balik nama lahan plasma karena pemilik awal memindahtangankan pada orang lain. Sub bagian ini akan menguraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan di perkebunan kelapa sawit meliputi pengetahuan pengelolaan kebun kelapa sawit, rangkaian kegiatan di perkebunan kelapa sawit, waktu berkebun, teknologi perkebunan kelapa sawit dan sistem pengupahan buruh perkebunan plasma.

Pengetahuan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Masyarakat perkebunan kelapa sawit Sei Buatan yang berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya umumnya sangat sedikit yang mengetahui tentang cara pengelolaan tanaman kelapa sawit. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada beberapa lembaga yang pernah memberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan tanaman kelapa sawit seperti perusahaan perkebunan milik negara maupun swasta, balai pelatihan perkebunan Riau dan kelompok tani bersama KUD. Balai pelatihan perkebunan memberikan pelatihan kepada petani atau kelompok tani kelapa sawit langsung di lokasi karena balai ini belum mempunyai fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu, pelatihan diberikan selama tiga hari namun hanya pada tingkat pelatihan budidaya dan belum pada usaha pengembangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada kelompok petani plasma perkebunan kelapa sawit Pola PIR, khususnya di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Sei Buatan, pada umumnya pengetahuan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit diperoleh PTPN V. Gambaran ini juga terlihat dari jawaban responden (45,7 persen) mengatakan, bahwa pengetahuan tentang pengelolaan kelapa sawit diperoleh dari PTPN V sebagai pembina masyarakat transmigran yang datang ke lokasi ini dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pelatihan diberikan sekitar tahun 1987 hingga tahun 1988, yaitu tentang sistem perawatan kelapa sawit seperti *nunas*, *nyiang*, *mupuk* dan peremajaan. Pemberian pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan petani kelapa sawit agar dapat mengelola perkebunan plasma kelapa sawitnya agar produksi TBS yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan.

Di samping dari PTPN V, pengetahuan pengelolaan perkebunan kelapa sawit juga diperoleh dari kelompok tani dengan jawaban responden sebesar 24,5 persen. Perolehan pengetahuan dari kelompok tani terutama pada usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit selanjutnya atau petani baru yang menggantikan pemilik awal;

terutama setelah PTPN tidak lagi terlalu banyak mencampuri kegiatan petani. Selain itu, ada juga responden yang mengaku bahwa ketrampilan pengelolaan kelapa sawit diperoleh dari pengalaman bekerja di perkebunan kelapa sawit milik orang lain atau perusahaan, orang tua atau belajar sendiri. Berikut ini adalah penuturan Bapak P mengenai perolehan pengetahuan tentang pengelolaan kelapa sawit:

“ saya berasal dari Medan, sehingga sudah tahu tentang kelapa sawit, walaupun saya bekerja sebagai petani karet. Ketrampilan saya tentang berkebun kelapa sawit saya peroleh melalui “ilmu katon” yang artinya pengetahuan diperoleh cukup dari melihat atau memperhatikan sehari-hari cara orang mengelola perkebunan kelapa sawit”.

Rangkaian Kegiatan Di Perkebunan Kelapa Sawit

Pada saat penelitian ini berlangsung kegiatan di perkebunan kelapa sawit hanya meliputi tahap pemeliharaan dan pengambilan TBS (panen). Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah pemupukan dengan cara menyebarkan pupuk secara melingkar di sekitar pohon, mencabut rumput atau alang-alang yang mengganggu pertumbuhan pohon kelapa sawit (*nyiang*), dan memotong pelepah pohon yang sudah tua (*mlepah*). Sedangkan kegiatan memanen TBS (Tandan Buah Segar) biasanya dilaksanakan dua minggu sekali yang dilakukan oleh laki-laki, baik pemilik maupun buruh tani. Pemanen akan mengangkut TBS dengan menggunakan *angkong* ke tempat pengumpul yang terletak di pinggir jalan untuk memudahkan truk pengangkut yang akan membawa ke pabrik pengolahan CPO. Pada saat ini kegiatan penimbangan TBS, pencatatan sebagai bukti pembayaran pihak pabrik ke petani dan pengangkutan dilakukan oleh KUD.

Berdasarkan jawaban dari 151 responden sebesar 46,4 persen mengatakan, bahwa pada saat ini yang hanya melakukan kegiatan pemeliharaan dan panen cukup dilakukan oleh dua orang. Bahkan cukup besar responden (28,5 persen) yang menyatakan, bahwa saat

ini dalam pengelolaan kebun sawit cukup dilakukan oleh satu orang. Kondisi ini disebabkan karena tahap pemeliharaan dan panen tidak membutuhkan tenaga dan waktu namun dilakukan secara bertahap atau bergilir dari satu pokok ke pokok yang lain. Misalnya tahap pemberian pupuk cukup tiga bulan sekali dan *nunas* cukup dua kali dalam satu tahun.

Pada umumnya mereka yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pemilik kebun (Kepala Keluarga), anggota rumah tangga dan orang lain sebagai pekerja upahan. Penelitian ini menunjukkan, pada umumnya kedua tahap kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yakni pemeliharaan dan panen dilakukan oleh pemilik (KK) dengan dibantu tenaga upahan yang diungkapkan oleh 41 persen responden. Sedangkan responden yang melibatkan anggota keluarga lainnya ada 38 persen. Bagi pemilik kebun yang masih kuat secara fisik akan dapat mengelola kebunnya sendiri, dan hal ini diungkapkan oleh 18 persen responden. Walaupun secara angka sangat kecil tingkat penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, khususnya pada tahap pemeliharaan, namun dengan banyaknya petani yang telah memiliki lahan perkebunan dengan sendirinya akan memberi peluang kerja lebih besar di sektor ini. Terutama pada tahap-tahap pembukaan lahan, penanaman dan pemeliharaan awal.

Pada saat ini, dengan tingginya nilai jual kelapa sawit berdampak terhadap besarnya minat generasi muda, terutama laki-laki, dalam kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit. Mereka ada yang bekerja di kebun milik keluarga dan ada pula di kebun milik orang lain sebagai tenaga kerja upahan. Kaum pemuda yang melakukan kegiatan di perkebunan kelapa sawit tidak hanya mereka yang putus sekolah namun juga yang masih sekolah; bahkan ada yang telah tamat perguruan tinggi. Kegiatan ini dianggap tidak banyak menyita waktu, sehingga dapat juga mengerjakan kegiatan lain seperti sekolah dan pekerjaan di luar perkebunan. Mereka tidak merasa malu untuk melakukan kegiatan di perkebunan karena dilihat dari penghasilan yang diterima cukup lumayan bila dibandingkan misalnya dengan pekerjaan di pabrik. Apabila sebagai buruh, pekerjaan tersebut biasanya dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari dua atau tiga

orang. Bagi mereka yang bukan buruh adalah mengelola kebun sendiri milik orangtua atau milik sendiri yang diperoleh dari orangtuanya.

Jenis kegiatan tahap pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang umum dilakukan petani kelapa sawit saat ini adalah:

- *Miang* atau *mbabat* adalah kegiatan membersihkan rumput dari tumbuhan liar di sekitar pohon kelapa sawit kemudian dibentuk lingkaran (*piringan*) untuk menabur pupuk. Biasanya kegiatan *miang* dilakukan sekitar 18 hari dan sangat tergantung dari kondisi kebun tersebut.
- *Mupuk* adalah kegiatan pemberian pupuk di *piringan* pohon. Kegiatan ini dilakukan setelah tanaman dibersihkan dari tumbuh-tumbuhan liar yang membutuhkan waktu selama dua jam untuk lahan seluas 1 kavling (2 hektar). Dalam satu tahun kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak dua kali.
- *Nunas* atau *mlepah* adalah kegiatan membuang pelepah yang tidak perlu agar tanaman cepat berbuah yang dilakukan selama seminggu. Dalam satu tahun kegiatan ini juga dilakukan sebanyak dua kali.
- *Manen* atau *ngegrek* adalah memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Istilah “*ngegrek*” biasanya digunakan untuk mengambil TBS dari pohon kelapa yang sudah tinggi. Bila pohon kelapa sawit masih pendek, tidak menggunakan istilah *ngegrek*, namun lazim disebut “*dodos*”. Setelah itu TBS diangkut ke tempat pengumpulan TBS yang terletak di pinggir jalan untuk di timbang oleh petugas dari KUD dan selanjutnya dibawa ke pabrik. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pemilik kebun yang dikoordinir oleh kelompok tani.
- *Brondol* adalah mengumpulkan biji-biji buah kelapa sawit yang terlepas dari tandan waktu jatuh dari ketinggian pohon.
- *Nyutit kepompong* adalah kegiatan mencari ulat yang terdapat pada pohon kelapa sawit.

Dilihat dari konteks *gender*, pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya kegiatan *mlepah*, *dodos* dan *ngagrek* dilakukan oleh laki-laki karena pekerjaan ini dianggap cukup sulit bagi perempuan; terutama pada pohon kelapa sawit yang sudah tinggi. Sedangkan perempuan melakukan kegiatan seperti *brondol*, *nyutit* kepompong, *miang*, *mbabat* dan *mupuk*. Lihat tabel 3.4 mengenai kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut jenis kelamin.

Tabel 3.4.
Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kegiatan	P	L	Keterangan
1.	Persiapan	-	v	Dilakukan oleh pemilik atau buruh tani
2.	Pembibitan	v	v	Menanam biji KS di Polybeck
3.	Miang/babat	v	-	Mencabut rumput sekitar pohon
4.	Nunas/mlepah	v	v	1. Perempuan pada bagian yang rendah 2. Laki-laki pada bagian yang tinggi
5.	Mupuk	v	v	1. Perempuan melakukan dengan sistem sebar 2. Laki-laki melakukan dengan sistem semprot
6.	Ngegrek	-	v	Mengambil TBS pada pohon yang tinggi
7.	Dodos	v	-	Mengambil TBS pada pohon yang rendah
8.	Brondol	v	-	Mengumpulkan biji-biji yang rontok waktu panen
9.	Mengangkut ke tempat pengumpulan TBS	v	-	Menggunakan angkong
10.	Penimbangan	v	-	Dilakukan oleh petugas pengambil TBS dibantu petani kelapa sawi

Sumber: Data Primer, Penelitian Ketenagakerjaan Di Perkebunan Kelapa Sawit oleh PPK - LIPI, 2004.

Catatan : P = Perempuan ; L = Laki-laki.

Waktu Kerja Di Perkebunan Kelapa Sawit

Pada setiap kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit, yaitu pemeliharaan dan panen, terdapat perbedaan waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan tersebut. Pada kegiatan pemeliharaan seperti *nyiang*, *mlepah/nunas* dan *mupuk* umumnya dilakukan dari jam 7

pagi hingga jam 2 siang. Sementara itu, pada tahap panen biasanya dilakukan dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Kegiatan ini hanya setengah hari karena yang dipanen hanya pohon sawit yang buahnya sudah masak. Pada setiap pohon hanya diambil satu atau dua buah tandan kelapa sawit. Pemanfaatan jam kerja sangat terkait dengan jumlah orang yang terlibat, di mana makin banyak yang terlibat maka jumlah jam kerja yang digunakan pada kegiatan tersebut semakin menurun.

Dalam satu tahun kegiatan pemeliharaan pokok kelapa sawit tidak dilakukan setiap hari. Pada kegiatan pemeliharaan seperti *nyiang*, *mlepah* dan *mupuk*, masing-masing dilakukan enam bulan sekali. Sementara itu, untuk kegiatan panen dilakukan sejak pohon kelapa sawit berumur 5 tahun yakni 2 minggu sekali. Kegiatan ini akan dilakukan hingga pohon tersebut tidak menghasilkan TBS lagi, yang biasanya ketika telah berusia 25 tahun. Pemahaman tentang penggunaan waktu pemeliharaan pokok kelapa sawit sesuai dengan pelatihan yang pernah diberikan oleh PTPN V.

Teknologi Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pemeliharaan dan panen, teknologi yang digunakan masih sederhana seperti ember, alat semprot pupuk (*keep*), cangkul, parang babat, sabit, arit, *tajak*, *egrek*, *dodos*, *angkong*, *ganco* dan kampak. Walaupun sederhana peralatan tersebut masih didatangkan dari luar Kabupaten Siak, bahkan luar Provinsi Riau, karena belum ada pabrik yang membuat perlengkapan perkebunan di wilayah ini. Kondisi ini membuat petani sangat tergantung dengan adanya pemasokan alat-alat tersebut sampai di desa ini, terutama pada masa awal-awal kegiatan perkebunan ini dijalankan. Pada saat ini dengan adanya koperasi peralatan tersebut dapat dipesan melalui koperasi, atau membeli sendiri ke kota.

Pada kegiatan pemupukan alat yang diperlukan selain pupuk adalah ember dan alat penyemprot pupuk (*keep*). Penggunaan alat penyemprot pupuk ini dengan menggendong di pundak pekerja. Alat ini cukup berat sehingga umumnya hanya laki-laki yang

menggunakannya, sedangkan perempuan cukup dengan menggunakan ember dan gayung. Namun akhir-akhir ini perempuan ada juga yang menggunakan *keep*, terutama perempuan usia muda. Kegiatan penyiangan (*nyiang*) dibutuhkan beberapa jenis alat yaitu cangkul, parang babat, sabit, arit dan *tajak* untuk membersihkan rumput atau alang-alang sekitar pohon agar pupuk yang disebar dapat langsung diserap pohon kelapa sawit di samping faktor keindahan karena bersih. Khusus cangkul digunakan untuk memabat rumput atau alang-alang yang ada di sekitar pohon dan membuat lingkaran di sekitar pohon untuk menabur pupuk. Kegiatan *mlepah* hanya diperlukan batang bambu yang cukup panjang dengan arit yang sangat tajam (*egrek*) di ujungnya, untuk memotong pelepah pohon kelapa sawit yang tinggi. Bambu panjang dengan *egrek* di ujungnya juga digunakan sebagai alat waktu panen TBS. Sedangkan untuk *mlepah* pada pohon yang masih rendah cukup dengan arit atau sabit dan dapat dilakukan oleh perempuan.

Sementara itu, teknologi yang digunakan pada tahap memanen kelapa sawit cukup bervariasi yang terdiri dari *dodos*, *egrek*, *angkong*, *ganco* dan *kampak* yang memiliki fungsi berbeda. *Dodos* adalah sejenis linggis yang digunakan untuk melepas tandan kelapa sawit pada pohon kelapa sawit yang masih rendah⁷. Bila pohon kelapa sawit sudah mulai tinggi, maka untuk melepas tandan kelapa sawit dari pohonnya digunakan *egrek* yang disangga dengan batang bambu agar dapat mencapai ketinggian tempat buah sawit berada. Masa pemakaian *egrek* dapat mencapai dua tahun. Kemudian, untuk kegiatan mengangkut tandan kelapa sawit ke tempat pengumpulan di pinggir jalan digunakan *angkong*, yaitu sejenis gerobak dorong yang terbuat dari besi. Alat lain yang digunakan untuk panen adalah *ganco* yang digunakan untuk mengait tandan kelapa sawit pada pohon yang masih rendah dan mengait TBS pada waktu akan ditimbang. *Ganco* ini adalah sejenis alat yang ujungnya runcing berbentuk kait untuk

⁷ Pada saat penelitian, di pasar harga peralatan *dodos* sekitar Rp 50.000,-, batang bambu sepanjang 10 hingga 12 meter Rp. 15.000,- - Rp. 20.000,-, *egrek* seharga Rp. 75.000,- - Rp. 250.000,-, *angkong* Rp. 180.000,- (kredit Rp. 250.000,-), *ganco* Rp. 15.000,- dan *kampak* sekitar Rp. 50.000,-.

memudahkan petani dalam melakukan kegiatan pengambilan tandan kelapa sawit baik dari pohon maupun pada waktu akan memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada tahap panen ini juga digunakan kampak untuk memotong pangkal TBS yang masih menempel.

Sistem Pengupahan Buruh Perkebunan

Penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma umumnya dilakukan oleh kepala keluarga, anggota rumah tangga lain dan orang lain yang bukan anggota rumah tangga tersebut. Keterlibatan anggota rumah tangga dalam kegiatan tersebut mempunyai arti, bahwa mereka juga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan lahan kelapa sawit mereka. Berbeda dengan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai tenaga upahan, di mana mereka akan menerima upah sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Misalnya buruh miang di perkebunan plasma sawit milik orang lain, dengan upah Rp. 300.000,- per kavling (2 hektar). Responden yang mengaku bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan menerima upah adalah sebesar 38,4 persen.

Sistem pengupahan lainnya adalah sistem borongan yang dikemukakan oleh 9,3 persen responden dan sistem bagi hasil dikemukakan oleh 2 persen responden. Sistem bagi hasil dapat diterapkan pada tahap panen, yaitu misalnya dengan perhitungan 1 ton TBS (sekitar 50 tandan/*janjang*) yang dihasilkan, si pemanen akan menerima 3 *janjang* (sekitar 100 kilogram). Sedangkan sistem borongan dapat dilakukan pada kedua tahap kegiatan perkebunan kelapa sawit, yaitu bisa dilakukan pada tahap pemeliharaan maupun masa panen. Misalnya pada kegiatan *ngegrek* pada lahan seluas 2 hektar dengan kondisi pohon sudah tinggi diberikan upah sebesar Rp. 45.000,- - Rp. 50.000,- per ton TBS. Sementara untuk kegiatan *dodos*, yaitu mengambil tandan sawit pada pohon yang masih pendek diberikan upah sebesar Rp. 40.000,- per ton TBS. Upah *dodos* lebih

rendah dari pada *ngegrek* karena adanya perbedaan tingkat kesulitan yang dihadapi pada saat pengambilan TBS⁸.

Pada kegiatan pemeliharaan seperti *nunas* atau *nyiang* dapat juga diterapkan sistem borongan dan harian. Untuk sistem borongan besar upah yang diterima adalah Rp. 300.000,- per kavling, sedangkan sistem harian Rp. 20.000,- per hari. Kegiatan ini biasanya dilakukan 6 bulan sekali. Sistem pengupahan pada kegiatan *mupuk* diperhitungkan berdasarkan banyaknya pupuk yang digunakan, yaitu Rp. 3.500,- per kantong pupuk. Untuk 1 kavling lahan sawit dibutuhkan antara 10 - 15 kantong pupuk, maka upah yang diterima pekerja untuk 1 kavling lahan sawit adalah antara Rp. 35.000,- - Rp. 52.500,-. Dalam satu tahun kegiatan pemupukan dilakukan dua kali pemupukan. Sedangkan kegiatan *mlepah* menggunakan sistem pengupahan secara borongan, yaitu Rp. 400.000,- untuk 1 kavling kebun kelapa sawit. Dalam satu tahun kegiatan *mlepah* dilakukan sebanyak dua kali. Untuk setiap kegiatan di atas cukup dilakukan oleh dua orang dengan waktu kerja tiga hari. Lihat Tabel 3.5. tentang jenis kegiatan menurut upah yang diterima.

Tabel 3.5.
Jenis Kegiatan Menurut Upah Yang Diterima
Buruh Perkebunan

No.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Miang/mbabat	300.000*	Per kavling
2.	Mupuk	3.500*	Per sak
3.	Nunas/mlepah	400.000*	Per kavling
4.	Manen	45.000*	Per ton

Sumber: Data Primer Penelitian Ketenagakerjaan Di Perkebunan Kelapa Sawit, PPK - LIPI, 2004.

Catatan: *Miang*, mupuk dan *nunas* dilakukan 6 bulan sekali. Kegiatan panen dilakukan seminggu sekali.

Dilihat dari tingkat pendapatan buruh tani perkebunan kelapa sawit bila dapat bekerja di empat sampai lima kavling akan memperoleh

⁸ Per kavling (2 hektar) panen TBS dapat mencapai 2 hingga 3 ton TBS.

pendapatan sekitar Rp. 700.000,- per bulan. Mengacu kepada tingkat UMP tahun 2004 di Provinsi Riau (Rp. 476.875,-) atau UMP DKI Jakarta (Rp. 671.550,-) memperlihatkan, bahwa tingkat pendapatan buruh tani di perkebunan kelapa sawit Sei Buatan lebih tinggi (Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial, 2004). Pendapatan para buruh tani perkebunan tersebut tersebut tidak termasuk pendapatan yang diperoleh dari kebunnya sendiri (apabila ada) atau kegiatan anggota rumah tangga di luar perkebunan kelapa sawit.

3.3. Kepemilikan dan Strategi Kelangsungan Hidup

Pada dasarnya kondisi ekonomi rumah tangga petani plasma perkebunan kelapa sawit saat ini lebih baik dibanding dengan kondisi sebelum krisis ekonomi. Apabila dikaitkan dengan program transmigrasi, kondisi ini cukup menggembirakan karena sesuai dengan salah satu tujuan transmigrasi yaitu agar peserta program mempunyai kehidupan yang lebih baik dibanding dengan keadaan di daerah asal. Agar kondisi tersebut tetap berlanjut (*sustained*), bahkan diharapkan meningkat, strategi yang dilakukan petani plasma adalah memperluas lahan dan mencari pinjaman bila mengalami kesulitan keuangan. Sub bab ini akan menggambarkan dan mengkaji kepemilikan petani plasma kelapa sawit di Sei Buatan dan strategi yang dilakukan bila menghadapi kesulitan keuangan dalam rumahtangganya.

Kepemilikan Rumahtangga Petani Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun berdiam di kawasan perkebunan kelapa sawit Sei Buatan kehidupan para transmigran telah mengalami banyak perubahan. Bagi mereka yang dapat menyesuaikan kehidupan di daerah baru yang sangat keras di awal-awal berdiam di lokasi ini memperlihatkan ada yang taraf kehidupan ekonominya meningkat. Pada sub bagian ini akan dilihat tingkat ekonomi petani plasma

perkebunan kelapa sawit dari sisi kepemilikan, antara lain kepemilikan lahan, rumah dan barang berharga.

- *Kepemilikan Lahan*

Pada dasarnya petani plasma perkebunan kelapa sawit akan memiliki 2 hektar lahan perkebunan sesuai dengan luas yang diterima sebagai peserta transmigran. Namun tampaknya tidak semua peserta transmigran, walaupun telah berdiam sekitar 20 tahun, dapat menambah luas lahan awal di lokasi tersebut. Hal ini terlihat dari jawaban responden, bahwa sebesar 96 persen mengatakan hanya memiliki lahan seluas 2 hektar. Dengan luas lahan demikian, pendapatan yang diterima petani perkebunan kelapa sawit pada satu bulan terakhir berkisar antara satu hingga empat juta rupiah. Di antaranya ada 18 persen rumah tangga mempunyai pendapatan di bawah satu juta rupiah dan 59,4 persen antara satu hingga empat juta rupiah. Jumlah pendapatan tersebut masih sulit untuk menambah luas lahan karena kebutuhan hidup dan pendidikan anak masih perlu perhatian. Tingkat pendapatan ini sangat menentukan untuk keberlangsungan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani plasma; terutama dalam menghadapi masa peremajaan (*re-planting*). Apabila tidak mempunyai lahan lebih dari 2 hektar, maka pada saat peremajaan petani plasma tidak mempunyai dana untuk modal hidup; kecuali mempunyai pekerjaan di luar kegiatan perkebunan. Namun situasi ini dapat berdampak pada kegiatan di perkebunan yang bisa saja terlantar.

Petani plasma yang berhasil meningkatkan luas lahannya lebih dari 2 hektar sebesar 35 persen. Berdasarkan tahun kedatangan, rumah tangga yang telah dapat meningkatkan lahan adalah petani plasma yang datang pada awal program (tahun 1985) dan satu orang tahun 1991. Pada umumnya petani plasma yang berhasil menambah lahannya adalah mereka yang membawa modal dari daerah asal dan melihat prospek komoditi kelapa sawit cukup menjanjikan. Seperti

diungkapkan seorang informan (bapak A) di bawah ini yang berhasil mengembangkan lahan plasmanya:

“ saya beli lahan plasma sawit karena ada dai pulang ke Jambi lalu menjual rumah dan plasmanya, ya saya beli. Pada tahun 1987 harga jual di pasaran sekitar satu setengah juta rupiah hingga dua juta rupiah untuk lahan plasma dua hektar ditambah pekarangan rumah seperempat hektar dan lahan pertanian tiga perempat hektar. Waktu itu tanah di sini sangat murah disini. Ada orang sini, orang asli, butuh uang, jadi ya saya beli. Per kavling seluas dua hektar hanya Rp. 50.000,-. Kebetulan saya ada membawa modal dari Jawa. “

Petani plasma yang telah berhasil memperluas lahan perkebunan kelapa sawit umumnya tidak hanya di sekitar lokasi ini, bahkan di luar Provinsi Riau. Luasnya lahan yang dimiliki berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja karena tidak dapat lagi mengerjakan sendiri bersama anggota keluarganya. Karena itu, lahan-lahan tersebut umumnya dikerjakan orang lain atau diberikan kepada anak yang telah dewasa untuk dikelola. Pada kelompok petani plasma yang telah berhasil menambah lahan perkebunannya tidak akan khawatir menghadapi masa peremajaan, karena kelangsungan hidup rumah tangga dapat diperoleh dari lahan yang lain.

- *Kepemilikan Rumah*

Kepemilikan dan kondisi rumah petani plasma perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang menggambarkan tingkat kehidupan dan status sosial mereka. Keikutsertaan mereka pada program transmigrasi secara langsung petani plasma tersebut telah memiliki rumah; walaupun kondisi awal umumnya tidak layak huni. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun berdiam di lokasi ini, bangunan perumahan para petani plasma perkebunan kelapa sawit di lokasi ini telah banyak mengalami perubahan. Dilihat dari dinding rumah belum banyak berubah karena

baru sekitar 41 persen rumah responden yang dindingnya terbuat dari tembok, sedangkan lainnya masih terbuat dari papan seperti pertama kali tinggal di lokasi ini. Namun lantai rumah telah terjadi perubahan besar, yaitu sebesar 76,8 persen telah dipleset atau bertegel. Bahkan telah ada yang memasang lantai keramik, terutama rumah tangga pedagang pengumpul kelapa sawit atau petani yang memiliki lahan cukup luas. Kondisi fisik bangunan rumah tersebut menunjukkan, bahwa sebagian petani plasma kelapa sawit telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

- *Kepemilikan Barang Berharga*

Pada kajian ini yang dimaksud dengan barang berharga seperti perhiasan, kendaraan bermotor, elektronik dan ternak. Penduduk di perkebunan kelapa sawit plasma ini tingkat kepemilikan barang-barang tersebut cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jawaban responden, yaitu sekitar 33 persen rumah tangga responden memiliki jenis barang yang termasuk dalam kategori tersebut. Di antara responden yang memiliki barang-barang tersebut, ada 32,5 persen yang memiliki barang elektronik dan kendaraan bermotor dan 23,8 persen memiliki ternak. Barang perhiasan yang dimiliki rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit umumnya adalah emas, yang fungsinya tidak hanya sebagai barang perhiasan namun juga tabungan bila tiba-tiba membutuhkan uang dapat dijual.

Kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, tampaknya hampir dimiliki oleh sebagian besar rumah tangga karena merupakan sarana transportasi paling fleksibel bila tinggal di lokasi ini yang sulit memperoleh sarana transportasi umum. Jenis barang elektronik yang dimiliki penduduk antara lain adalah televisi dan radio. Seiring dengan perkembangan alat komunikasi telepon genggam (HP), maka di masyarakat petani plasma perkebunan kelapa sawit ini telah banyak dijumpai, terutama pada kalangan generasi muda. HP bagi sebagian masyarakat telah dianggap sebagai kebutuhan untuk memudahkan berkomunikasi dengan masyarakat luar. Salah satu

dampak dari kepemilikan HP adalah tidak berfungsinya lagi wartel (warung telpon) yang diusahakan oleh KUD setempat.

Gambaran kepemilikan barang-barang berharga tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan, bahwa telah terjadi peningkatan pada kesejahteraan petani plasma perkebunan kelapa sawit. Namun tampaknya kepemilikan barang yang berbentuk asset untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit masih belum terpikirkan oleh penduduk. Hal ini terlihat dari kepemilikan alat-alat perkebunan yang masih dapat dikatakan sederhana, walaupun dengan alat tersebut mereka masih dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, perkembangan IPTEK di bidang perkebunan kelapa sawit perlu disosialisasikan kepada petani yang akan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan mereka di masa datang.

Strategi Kelangsungan Hidup

Dalam mengatasi permasalahan kehidupan mereka yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para petani plasma perkebunan kelapa sawit. Usaha yang dilakukan para petani tersebut antara lain dengan mencari pekerjaan tambahan, memperluas lahan dan mencari pinjaman. Gambaran tentang strategi tersebut akan diuraikan pada alinea selanjutnya dengan mengacu kepada hasil wawancara dari 115 responden.

Pekerjaan Tambahan

Pada waktu baru tiba di lokasi ini sebagai masyarakat transmigrasi sangat membutuhkan pekerjaan tambahan, karena lahan sawit belum menghasilkan dan jatah yang diterima tidak mencukupi. Pada saat ini pekerjaan tambahan yang dilakukan di luar kegiatan di perkebunan sendiri merupakan salah satu usaha untuk dapat menambah keuangan rumah tangga yang tidak cukup, terutama untuk rumah tangga petani yang memiliki 1 kavling lahan sawit. Apalagi bila jumlah anggota

keluarganya besar dan masih banyak anak-anak yang bersekolah, sehingga membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, dengan mempunyai pekerjaan tambahan mereka berharap dapat memperluas lahan sawit agar dapat mencukupi kebutuhan rumahtangganya. Seorang ibu mengungkapkan, pekerjaan tambahan yang dilakukan sejak awal kedatangan hingga saat ini sebagai berikut :

“ saya datang tahun 1985 sebagai transmigran lokal. Waktu datang ke sini lahan kelapa sawit belum dibagi, baru dua tahun kemudian dibagi tapi belum bisa dipanen. Saya memperoleh 1 kavling. Sebelum ada hasil, saya dan suami kerja sebagai BHL pada PTP. Pekerjaan yang kami lakukan nyiang kelapa sawit yang masih kecil-kecil. Empat tahun kemudian setelah waktu penyerahan baru tanaman bisa dipanen. Karena anak saya 6, pendapatan dari kelapa sawit tidak mencukupi maka saat ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya berusaha mencari pekerjaan tambahan dengan memburuh di tempat orang. Pekerjaan yang saya lakukan nyiang, babat, mupuk dan ngisi bibit kelapa sawit dalam polybag yang dilakukan secara borongan. Upah nyiang per kavling Rp. 350.000,- - Rp. 400.000,- dikerjakan berdua, selesai sekitar satu minggu per kavling. Mupuk Rp. 3.000,- untuk 1 zak pupuk, 1 kavling cukup 20 sak. Tidak ada kerjaan nyiang atau mupuk, saya cari kerjaan lain ngisi bibit kelapa sawit dalam polybag. Upahnya Rp. 25,- per polybag, sehari paling dapat Rp. 800,- “.

Pada saat penelitian berlangsung, responden yang mempunyai pekerjaan tambahan lebih dari 50 persen yang meliputi bidang sektor *informal* seperti pedagang sebesar 17,9 persen, buruh perkebunan sawit plasma 9,9 persen dan tata usaha 7,3 persen. Jenis pekerjaan lain adalah guru, penjahit dan operator pabrik. Dari sisi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan tersebut sebulan terakhir mayoritas (85,4 persen) di bawah 1 juta rupiah, dan sisanya di atas 1

juta rupiah. Namun ada tujuh responden yang mengaku mempunyai pendapatan tambahan lebih besar daripada pendapatan pokok dari kebun kelapa sawit. Di antaranya adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tambahan seperti pengusaha mebel, pengusaha bengkel, pengusaha kerupuk, guru, penjahit dan pemilik toko.

Memperluas Lahan

Strategi petani plasma perkebunan kelapa sawit yang cukup menjaminkan untuk kelangsungan hidup rumahtangganya adalah dengan cara pengembangan lahan yang telah ada. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membeli kavling yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Transaksi jual-beli lahan ini banyak terjadi pada awal berdiam di lokasi tersebut yang disebabkan oleh adanya mereka tidak tahan tinggal di sana. Pada waktu itu ganti-rugi lahan perkebunan, rumah dan pekarangan yang diterima berkaitan dengan program transmigrasi berkisar antara satu setengah juta hingga dua juta rupiah. Namun bila dapat membeli tanah penduduk sekitar akan lebih murah, yaitu Rp. 50.000,- per kavling (2 hektar). Dalam perkembangannya dengan melihat keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit, nilai lahan perkebunan pun makin meningkat. Pada saat ini harga plasma kelapa sawit per kavling sekitar empatpuluh juta hingga limapuluh juta rupiah.

Diperkirakan ada sekitar 35 persen rumah tangga di lokasi penelitian yang telah mampu memperluas luas lahan plasmanya menjadi lebih dari 2 hektar. Perluasan lahan plasma sawit tidak hanya terbatas di lokasi penelitian, namun berkembang di luar desa yang masih dalam Kabupaten Siak. Bahkan petani plasma yang cukup berhasil telah memperluas lahan perkebunan kelapa sawit hingga di luar Provinsi Riau, misalnya Provinsi Jambi dan Lampung.

Mencari Pinjamam Uang

Strategi lain agar kelangsungan hidup rumahtangga tetap berlangsung adalah dengan mencari pinjaman bila memperoleh kesulitan keuangan. KUD merupakan tempat meminjam uang yang

diungkapkan oleh 78,8 persen responden. Lembaga perbankan belum menjadi prioritas untuk meminjam uang, karena hanya 8,8 persen responden yang pernah meminjam uang ke Bank yang terletak di pusat Kota Kabupaten Siak, yang lokasinya cukup jauh dari lokasi penelitian. Pada umumnya meminjam uang ke KUD atau Bank apabila memerlukan uang dalam jumlah besar, dengan syarat menyerahkan surat jaminan seperti kepemilikan surat tanah perkebunan plasma kelapa sawit. Sedangkan bila memerlukan pinjaman uang dalam jumlah yang tidak terlalu besar, cukup pinjam pada keluarga, teman atau tetangga.

3.4. Penutup

Pada saat ini petani plasma perkebunan kelapa sawit baru dapat menikmati hasil kelapa sawit pada tingkat pemanfaatan buah sawit (TBS). Namun gambaran kesuksesan yang dialami petani yang awalnya adalah transmigran mendorong pendatang untuk berusaha di perkebunan kelapa sawit, baik yang mencari lahan dari transmigran gagal dengan cara mengganti maupun sebagai pekerja di tempat petani yang telah membuka lahan lebih luas. Di samping itu, munculnya lapangan kerja baru yang dibutuhkan di lokasi tersebut seperti perdagangan, pegawai koperasi, jasa, dan tenaga produksi/operator. Dari sisi ketenagakerjaan, sebagai dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat di lokasi tersebut adalah terbukanya peluang kerja baik untuk penduduk lokasi perkebunan Sei Buatan, maupun dari luar lokasi.

Peningkatan kehidupan ekonomi petani berdampak juga terhadap pola pemikiran penduduk terhadap pendidikan yang terlihat dari tingkat pendidikan penduduk usia muda dibanding penduduk usia tua. Walaupun masih tinggi keinginan orangtua agar anak-anak dapat memperoleh peluang kerja di luar pertanian, namun melihat kondisi sulitnya mencari kerja di luar lokasi dan tingginya pendapatan yang dapat diperoleh dari perkebunan maka tidak masalah anak-anak kerja di perkebunan. Apalagi bila petani tersebut telah dapat memperluas

lahan sehingga juga mengharapkan anak-anak dapat melanjutkan perkebunan mereka.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rumahtangga petani, tampaknya sektor hilir dari komoditi kelapa sawit perlu dikembangkan. Dalam hal ini perlu pemikiran dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah daerah dan pengusaha yang dapat memunculkan inovasi baru bagi peningkatan di sektor hulu maupun pengembangan sektor hilir yang akan memberi lapangan kerja yang bernilai ekonomi. Dari sisi sumber daya manusia perlu ditingkatkan pendidikan anak-anak yang sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan kedua sektor tersebut, sehingga dapat mengisi peluang kerja yang tersedia.



BAB IV

KINERJA PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

4.1. Pengantar

Pengembangan sektor perkebunan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Di antara berbagai peran yang dijalankan dalam pengembangan perkebunan adalah sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyedia devisa negara, dan peran penting dalam mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu komoditi perkebunan terpenting dalam perekonomian nasional adalah kelapa sawit. Dari sudut pandang ekonomi, kelapa sawit adalah salah satu komoditi non migas yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan devisa dan perolehan pajak, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Selain itu, kelapa sawit juga berperan sebagai pemasok utama bahan baku industri pengolahan minyak sawit dan merupakan komoditi yang menghasilkan satu dari sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat, yaitu minyak goreng.

Di bidang ketenagakerjaan, perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang cukup besar dalam penyediaan kesempatan kerja. Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan wilayah yang sangat luas dan terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dari berbagai bidang keahlian dan keterampilan. Dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini yang mencapai 5,2 juta hektar, diperkirakan telah menyerap tiga juta tenaga kerja (Dirjen

Perkebunan, 2003). Suatu jumlah yang signifikan dalam upaya pemerintah melakukan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk, ditengah tingginya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran setiap tahunnya.

Berdasarkan perkembangannya secara global, dalam beberapa dekade terakhir, industri kelapa sawit dunia telah mengalami kenaikan produksi yang sangat pesat. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kontribusi perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, yang diakui mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit relatif luas dibandingkan negara-negara lain di dunia. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1990 mencapai 1,1 juta hektar dengan tingkat produksi minyak sawit sebesar 2,4 juta ton. Jumlah tersebut meningkat cukup tajam pada tahun 2003 menjadi 5,2 juta hektar dengan tingkat produksi minyak sawit mencapai 9,8 juta ton (Dirjen Perkebunan, 2003).

Sementara di Malaysia pada tahun 1990 lahan perkebunan kelapa sawit di negara ini mencapai luas sekitar 1,7 juta hektar dengan jumlah produksi minyak sawit sebesar 6,4 juta ton. Pada tahun 2002 luas perkebunan kelapa sawit di Malaysia meningkat menjadi 3,3 hektar dengan tingkat produksi minyak sawit mencapai sekitar 9,2 juta ton (Statistik Perkebunan, 2004). Secara global peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit selama periode tersebut mencapai 43 persen, yaitu dari sekitar 6 juta hektar pada tahun 1990 menjadi 10 juta hektar pada tahun 2002 (WWF Indonesia, 2003:2). Selain faktor luasnya lahan, dominasi Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit dunia juga disebabkan oleh keuntungan letak geografis kedua negara tersebut⁹. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika saat ini Indonesia dan Malaysia menjadi penghasil 80 persen dari produksi CPO di dunia.

Sub sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan akan semakin berkembang lebih pesat di masa datang. Pengembangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit akan menjadi pilihan utama

⁹ Tanaman kelapa sawit sangat sesuai atau tumbuh subur di sepanjang garis khatulistiwa, tepatnya di negara yang berada di antara 30° LS dan 30° LU.

maupun alternatif dalam pemanfaatan potensi SDA di setiap daerah, terutama bagi daerah yang masih memiliki lahan cukup luas seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah ditengarai juga akan semakin mendukung pengembangan kelapa sawit, karena pada kenyataannya pengembangan kelapa sawit dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan PAD cukup besar, terutama bagi daerah (kabupaten) baru yang sedang gencar mencari alternatif sumber dana pembangunan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pemerintah merasa optimis, pada tahun 2010 yang akan datang, Indonesia akan mampu menggeser posisi Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia.¹⁰

Bab keempat pada buku ini adalah untuk membahas kinerja pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tingkat petani yang analisisnya terdiri dari empat inti pembahasan. Pada sub bagian pertama uraian diawali dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian. Sub bagian kedua membahas kinerja pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tingkat petani fokus pada lokasi penelitian. Sub bagian ketiga menjelaskan peran kelembagaan pertanian di tingkat desa, yaitu KUD dan kelompok tani dalam pengembangan kelapa sawit. Sub bagian ke empat menguraikan kemandirian petani kelapa sawit dilihat dari perspektif kecenderungan hubungan inti dan plasma. Sedangkan sub bagian kelima merupakan penutup yang merangkum keseluruhan uraian dari tulisan ini.

4.2. Perkembangan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Lokasi Penelitian

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau pada awalnya dikembangkan dengan pola PIR-Bun/NES ADB. Pola tersebut kemudian dilanjutkan dengan pola PIR-Trans dengan memanfaatkan

¹⁰ Malaysia saat ini adalah produsen terbesar minyak sawit, dengan kontribusi 50,9 persen dari total produksi dunia. Indonesia adalah produsen kedua terbesar di dunia dengan 32, 3 persen dari total produksi dunia di tahun 2002.

Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta sebagai perusahaan inti. Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pengembangan perkebunan pola PIR-Trans adalah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1986. Data tentang perusahaan inti di Propinsi Riau yang menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit menggunakan kedua pola tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.
Perusahaan Penyelenggara Program PIR Di Propinsi Riau

Perusahaan Inti	Luas (Ha)	Petani (KK)	Keterangan
PT. Nusantara V (PTP V)	52.000	26.000	PIR BUN dan PIR Trans
PT. Inti Indosawit Subur	23.500	11.750	PIR Trans
PT. Sari Lembah Subur	8.000	4.000	PIR Trans
PT. Surya Bratasena Plantation	5.300	2.650	PIR Trans
PT. BuanaWira Lestari	6.000	3.000	PIR Trans
PT. Ramajaya Pramukti	4.400	2.200	PIR Trans
PT. Winasari Nusantara	8.800	4.400	PIR Trans
PT. Rigunas Agri Utama	5.194	2.597	PIR Trans
PT. Perdana Intisawit Perkasa	6.659	3.328	PIR Trans
	118.050	59.025	

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Siak. 2004.

Dalam perkembangannya, setelah Bank Indonesia menutup Skim Kredit PIR-Trans, pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Propinsi Riau menggunakan beberapa pola, yaitu Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA), pola swadaya dan pola Program Pinjaman Bantuan Modal Ekonomi Kerakyatan. Pola KPPA merupakan bentuk penyaluran dana bergulir kepada koperasi di tingkat desa dimana pemerintah daerah berperan sebagai pemberi modal awal. Hingga saat ini pola KPPA di Propinsi Riau telah melibatkan sekitar 23 perusahaan mitra koperasi dengan luas pengembangan lahan mencapai 141,597 hektar dan mencakup 70.798

KK petani. Khusus untuk pola ini, di Propinsi Riau pengelolaannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 tahun 2001 tentang tata cara pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan Skim KKPA.

Pola pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola Swadaya merupakan bentuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bersifat mandiri. Menurut keterangan staff Dinas Perkebunan Propinsi Riau, pola swadaya dalam pengembangan kelapa sawit di Propinsi Riau berkembang cukup pesat karena banyak masyarakat yang melihat keberhasilan petani plasma pada pola PIR di daerah ini, serta prospek pengembangan kelapa sawit yang sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari lokasi berkembangnya perkebunan kelapa sawit pola swadaya yang berdampingan dengan perusahaan perkebunan yang telah ada. Berdasarkan data statistik perkebunan Riau, keseluruhan pengembangan kelapa sawit pola swadaya di Propinsi Riau arealnya lebih luas dibandingkan dengan pola PIR dan KPPA yaitu mencapai 618,272 hektar dengan areal terluas terdapat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 219,424 hektar.

Sementara itu, untuk pola lain yang lebih menguntungkan terus diupayakan dengan berbagai cara, termasuk pola dengan Program Pinjaman Bantuan Modal Ekonomi Kerakyatan. Program ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.286/VII/2002. Berdasarkan data terakhir, luas perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun melalui program Ekonomi Kerakyatan di Propinsi Riau meliputi 13 daerah kabupaten/kota seluas 7.459 ha.

Di lokasi penelitian, tepatnya di wilayah perkebunan kelapa sawit Sei Buatan Kecamatan Dayun, Kabupten Siak, pertama kali pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dilakukan pada sekitar awal tahun 1980-an. Pembukaan lahan tersebut terkait dengan pelaksanaan program pengembangan perkebunan pola PIR-Bun/NES yang dibiayai sepenuhnya oleh bantuan dana *Asian Development Bank* (ADB). Pembukaan lahan perkebunan pertama di lokasi ini adalah di Desa Sialang Sakti, sedangkan di desa lain yang termasuk perkebunan ini kegiatan pembukaan lahan dimulai pada sekitar tahun 1986-1989. Perbedaan waktu dalam pembukaan lahan perkebunan tersebut

tergantung dari asal pendanaan PIR tersebut, sehingga masyarakat di lokasi perkebunan mengenal pembagian wilayah kebun dengan sebutan PIR ADB, PIR Bank Dunia, PIR Swadaya dan sebutan lainnya.

Pelaksanaan program PIR di lokasi penelitian melibatkan pengiriman ratusan keluarga transmigran yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Transmigran dari Pulau Jawa di antaranya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara transmigran dari wilayah Sumatera sebagian besar berasal dari Sumatera Utara yang disebut sebagai peserta PIR transmigran lokal (translok) yang terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok asal Jawa-Medan dan kelompok asal Suku Batak yang ditandai dengan sebutan marga pada nama mereka.

Pada awalnya sebagian besar peserta PIR dari Pulau Jawa belum memahami teknik budidaya kelapa sawit dengan baik. Bahkan di antara mereka mengakui baru mengenal budidaya tanaman kelapa sawit pada saat tiba di lokasi penempatan. Untuk memperoleh pengetahuan teknik pengelolaan kelapa sawit, selain melalui bimbingan perusahaan inti, mereka juga banyak mendapatkan pengetahuan tersebut dari para translok asal Sumatera Utara. Hal tersebut karena peserta PIR asal Sumatera Utara tersebut telah memiliki pengetahuan tentang teknik pengelolaan kelapa sawit dengan baik, karena sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga petani kelapa sawit. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri jika saat ini mereka yang dikenal sebagai petani kelapa sawit yang “sukses” di daerah penelitian selalu dikaitkan dengan petani asal Sumatera Utara tersebut.

Dalam perkembangannya peserta PIR asal Jawa, khusus dari Jawa Barat, sebagian besar telah meninggalkan daerah ini di tengah jalan. Dari sekitar 107 KK peserta PIR asal Jawa Barat, pada saat penelitian dilakukan hanya tinggal 7 KK yang masih bertahan sebagai petani kelapa sawit. Pada umumnya alasan kepindahan mereka karena kondisi lahan yang harus diusahakan terasa berat sementara hasil yang diperoleh belum bisa diandalkan. Sebagian besar dari mereka

ada yang kembali ke daerah asal atau mengikuti program transmigrasi di lokasi lainnya.

Dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan kelapa sawit di lokasi ini dapat dijadikan salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi yang mengikuti Pola PIR perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan petani plasma yang semakin baik. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari: a) Peningkatan luas kepemilikan lahan kebun kelapa sawit, rata-rata di atas 2 ha; b) Bentuk rumah yang lebih mapan, ditandai dengan rumah tembok, lantai keramik, atap genteng dan perabotan rumah yang cukup lengkap; c) Kepemilikan barang elektronik dan kendaraan bermotor seperti TV, radio tape, VCD, motor hingga mobil; dan d) Peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan, seperti anak yang lulus diploma dan sarjana.

4.3. Kinerja Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit : Studi Kasus di Tingkat Petani

Pada dasarnya pembangunan pertanian khususnya pada sub sektor perkebunan yang berbasis pada pengembangan agribisnis dan agroindustri merupakan cabang usaha ekonomi yang beresiko cukup tinggi. Di tingkat makro keberhasilan kegiatan pertanian dengan sistem ini memerlukan perencanaan kebijakan dan program pembangunan yang menyeluruh, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang mulai dari kegiatan *on farm* hingga *off farm*, serta sangat tergantung pada kestabilan harga yang dipengaruhi pasar internasional. Sedangkan di tingkat mikro, dengan mengandalkan pada pengembangan perkebunan rakyat, resiko tersebut akan diperbesar oleh daya simpan hasil produk yang terbatas, luasnya sebaran areal tanaman yang harus dikembangkan, pengelolaan perkebunan yang relatif tradisional, sistem kepemilikan lahan yang tidak seragam, hingga terbatasnya ketersediaan infrastruktur pembangunan.

Menurut Pitono (2002) kelemahan utama pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah masih terkonsentrasinya kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada usaha untuk menghasilkan CPO sebagai produk akhir. Padahal dengan kondisi tersebut kenyataannya Indonesia dirugikan dari hilangnya nilai tambah lebih besar yang dapat diperoleh dari pengolahan produk turunan kelapa sawit tersebut. Menurut hasil penelitian LIPI (2000), kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki banyak produk turunan dari buah, daun, batang hingga akarnya. Berbagai industri pengolahan seperti kosmetika, makanan, rekayasa kimia, dan pengolahan lainnya sebenarnya dapat memanfaatkan nilai tambah dari kelapa sawit tersebut. Untuk itu dibutuhkan modal yang sangat besar dalam melakukan investasi dari kegiatan industri tersebut. Pada tataran ini harus diakui bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Malaysia.

Kondisi di atas tidak berbeda pada pengelolaan di tingkat petani. Kegiatan pertanian kelapa sawit yang dikembangkan masih sebatas pada pemanfaatan tanaman kelapa sawit sebagai penghasil tandan buah segar (TBS) untuk memenuhi kebutuhan pabrik kelapa sawit (PKS). Padahal dengan sebaran luas lahan yang tersedia, para petani dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk peningkatan pendapatan mereka. Misalnya aktivitas pengembalaan hewan ternak sebagai alternatif pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada sub bagian selanjutnya akan dibahas pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tingkat petani dengan melihat kinerja kegiatan produksi, kegiatan pemasaran dan perkembangan hubungan plasma – inti dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian

4.3.1. Kinerja Kegiatan Produksi

Pada dasarnya sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan petani plasma di lokasi penelitian cenderung masih bersifat tradisional. Aspek pengembangan kualitas SDM (petani kebun) tampaknya merupakan aspek yang memegang peran penting bagi upaya untuk menciptakan keberhasilan dalam pengembangan

produksi kelapa sawit. Pada saat ini, walaupun pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tingkat petani dikembangkan secara tradisional, namun tidak perlu dikhawatirkan mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka yang relatif baik. Bahkan di luar berbagai permasalahan yang dihadapi, keberhasilan petani dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di perkebunan ini patut dibanggakan dan dapat dijadikan contoh bagi petani kelapa sawit di daerah lain.

Mengacu kepada kondisi tersebut, satu hal yang perlu diupayakan dan tidak menutup kemungkinan untuk diprioritaskan adalah memberdayakan petani kelapa sawit agar menjadi petani yang berkarakteristik maju dan mempunyai daya saing ekonomi yang semakin meningkat. Upaya tersebut terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi produksi yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan menjamin pengelolaan perkebunan. Pemanfaatan teknologi dalam pengertian ini tidak hanya teknis budidaya dan penggunaan alat, namun juga termasuk pengetahuan dan strategi dalam pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai usaha agribisnis modern yang lebih menguntungkan. Sementara kesinambungan pengelolaan perkebunan sangat terkait dengan peningkatan motivasi petani untuk melakukan peremajaan tanaman perkebunan dan perluasan lahan perkebunan yang dimiliki.

Dilihat dari tingkat produktivitas petani plasma di Perkebunan Sei Buatan (Desa Sialang Sakti) menunjukkan, bahwa produktivitas rata-rata petani kelapa sawit per hektar mencapai 1,5 ton TBS untuk sekali panen. Jumlah ini masih berada di bawah kemampuan optimal yang dapat dihasilkan, karena sebenarnya petani plasma di desa tersebut mampu menghasilkan sekitar 2 ton TBS /ha/sekali panen. Minimal terdapat dua faktor yang diperkirakan menyebabkan penurunan produksi TBS di tingkat petani, *pertama* adalah relatif besarnya proporsi tanaman kelapa sawit yang tidak produktif dan *kedua* adalah tidak maksimalnya kegiatan pemeliharaan kebun di tingkat petani.

Pada umumnya tanaman kelapa sawit yang dikembangkan oleh petani di perkebunan ini merupakan “generasi pertama” sejak daerah tersebut dibuka sebagai perkebunan kelapa sawit. Artinya umur tanaman kelapa sawit yang dikembangkan sudah berusia puluhan

tahun, yaitu berusia sekitar hampir 22 tahun, sehingga tergolong tidak produktif. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi TBS yang dihasilkan¹¹. Dengan umur tanaman kelapa sawit yang tidak produktif tersebut, tentunya sangat sulit untuk mengharapkan terciptanya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi petani seperti yang pernah dicapai pada beberapa tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi keterbatasan produktivitas tanaman kelapa sawit di tingkat petani, perlu dilakukan peremajaan (*re-planting*) terhadap pohon kelapa sawit yang telah melalui masa produktif tersebut. Upaya untuk mendukung persiapan *re-planting* sebenarnya sudah menjadi bagian dalam perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian ini. Bahkan mayoritas petani sebenarnya telah memahami pentingnya kebutuhan melakukan *re-planting* bagi tanaman kelapa sawit yang mereka kembangkan. Namun demikian upaya ini dihadapkan pada kendala besarnya permodalan yang harus disediakan, serta belum siapnya petani menerima resiko berhentinya pendapatan dari perkebunan kelapa sawit. Kendala ini terutama dihadapi oleh sebagian besar petani kelapa sawit yang memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektar dan tidak memiliki alternatif pendapatan lain kecuali kelapa sawit.

Dalam kaitannya dengan *re-planting*, pihak perusahaan perkebunan PTPN V telah mengantisipasi untuk melakukan *re-planting* yang telah diupayakan sejak 10 tahun yang lalu, yaitu melalui penyediaan fasilitas tabungan Iuran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan (Idapertabun). Program ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga Asuransi Bumiputera. Namun disayangkan, program ini tidak berjalan baik karena di lokasi penelitian hanya sebagian kecil petani plasma yang tertarik untuk ikut serta dengan program tersebut. Dalam perjalannya program Idapertabun itu sendiri tidak berjalan maksimal karena dihadapkan pada kendala besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk

¹¹ Menurut informasi dari PTPN V, tingkat produktivitas kelapa sawit memiliki kisaran terbaik pada saat tanaman berumur 8-15 tahun.

melakukan *re-planting*, sementara kemampuan pendanaan yang sudah terkumpul relatif sangat terbatas.

Bagi beberapa petani kelapa sawit tertentu di lokasi penelitian (masyarakat lokal menyebutnya “boss”), masalah *re-planting* sebenarnya tidak menjadi kendala yang serius dalam pengembangan kebun kelapa sawit mereka. Hal ini karena umumnya para petani telah mengantisipasinya melalui perluasan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit, baik dengan cara membeli di sekitar lokasi perkebunan maupun membuka perkebunan baru di daerah lain. Bahkan di antara para petani tersebut ada yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit hingga puluhan hektar jumlahnya dan tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan, saat ini alternatif mengurangi resiko penurunan pendapatan (akibat penurunan produksi) di tingkat petani dilakukan melalui perluasan kepemilikan lahan perkebunan. Asumsinya dengan kepemilikan lahan yang semakin luas maka *re-planting* dapat dibiayai dengan subsidi silang dari peningkatan sangat diuntungkan dengan harga jual TBS yang relatif tinggi dan stabilnya harga di pasaran, serta kemudahan pemasaran produk kelapa sawit yang diusahakannya.

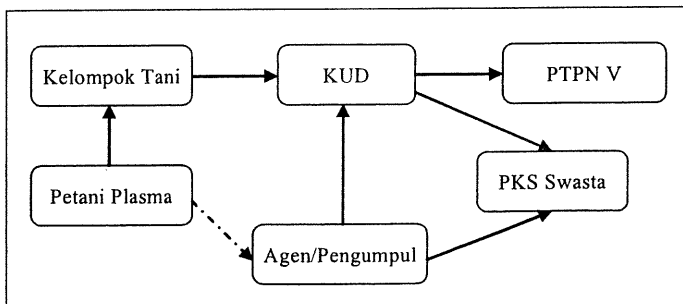
Selain kendala usia tanaman kelapa sawit yang tergolong tidak produktif, penurunan produktivitas petani kelapa sawit juga berkaitan dengan pemeliharaan kebun di tingkat petani yang kurang optimal. Keadaan ini berkaitan dengan anggapan sebagian besar petani bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan ladang investasi yang sepanjang waktu selalu dapat menghasilkan buah. Tanaman kelapa sawit tanpa pengelolaan yang rutin tetap berbuah dan menghasilkan TBS, dan kondisi ini berbeda dengan budidaya tanaman pangan. Padahal walaupun kelapa sawit tetap menghasilkan buah sepanjang musim, namun tetap memerlukan pemeliharaan yang intensif terutama dalam hal pemupukan dan pembersihan lahan.

4.3.2. Kinerja Kegiatan Pemasaran

Selain kegiatan produksi, salah satu faktor kunci keberhasilan kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah kelancaran pemasaran TBS dari tingkat petani hingga ke pabrik kelapa sawit. Secara umum kegiatan pemasaran TBS dari petani tampaknya lebih sederhana dan tidak melibatkan banyak pihak. Hal tersebut berkaitan dengan upaya mempercepat jalur distribusi TBS dari petani ke pabrik kelapa sawit dalam waktu yang relatif singkat.

Kelancaran pemasaran menjadi penting karena sifat fisik dari TBS yang tidak tahan lama. Maksimal setelah 24 jam setelah dipanen, TBS harus segera di kirim ke pabrik kelapa sawit untuk kemudian diolah agar menghasilkan minyak sawit (CPO). Jika pengiriman terlambat maka nilai jual TBS akan berkurang sebagai akibat dari menurunnya kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Pada kasus petani plasma di wilayah perkebunan Sei Buatan, pemasaran TBS yang dihasilkan dari tingkat petani melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah kelompok tani, KUD, PKS milik PTPN V, PKS milik Swasta, dan pedagang pengumpul di tingkat desa. Gambaran tentang jalur pemasaran kelapa sawit dari tingkat petani dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 4.1.
Rantai Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit di
Lokasi Penelitian



Sumber : Data Primer Penelitian Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit, PPK – LIPI, oleh 2004.

Setiap pihak yang terkait dalam skema di atas memiliki peran tersendiri sesuai dengan fungsi dan kegiatannya masing-masing. Posisi petani plasma dalam skema di atas merupakan pihak pertama yang menentukan jalur pemasaran kelapa sawit. Dari studi kasus di lokasi penelitian, TBS yang dihasilkan oleh petani umumnya dikelola oleh kelompok tani, kemudian diserahkan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) selanjutnya dijual kepada pabrik kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi perkebunan PTPN V. Pada kasus ini petani akan menerima pendapatan dari penjualan TBSnya setelah dikurangi berbagai biaya operasional seperti biaya pengiriman (pengangkutan) dan kewajiban pembayaran pinjaman dari petani di KUD. Pembayaran hasil penjualan juga membutuhkan waktu relatif lama, biasanya dibayarkan dalam satu periode masa panen (setiap dua minggu).

Alternatif penjualan TBS juga dapat dilakukan petani kelapa sawit di lokasi penelitian dengan menjual TBSnya kepada pedagang pengumpul di tingkat desa. Jalur pemasaran seperti ini umumnya dilakukan oleh petani yang membutuhkan uang tunai dan biasanya TBS yang dijual berasal dari tanaman kelapa sawit yang ditanam di sekitar pekarangan rumah. Konsekuensi dari jalur pemasaran seperti ini biasanya harga jual yang diterima petani lebih rendah dari harga pasar, karena selisihnya merupakan keuntungan pendapatan bagi para pedagang pengumpul tersebut.

Salah satu hal menarik yang dapat dijelaskan lebih lanjut dari skema pemasaran tersebut adalah begitu dominannya posisi dan peran KUD dalam rantai pemasaran TBS di lokasi penelitian. Tampak dalam skema tersebut KUD memiliki bargaining power yang besar untuk menjual TBS ke pabrik kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi perkebunan. Untuk menentukan pilihan penjualan TBS ke salah satu pabrik kelapa sawit, biasanya KUD berpatokan pada besarnya harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, pihak KUD cenderung memasarkan hasil TBS petani ke beberapa pabrik kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi penelitian. Argumennya adalah semakin tinggi harga beli yang ditawarkan oleh pabrik kelapa sawit maka keuntungan yang diperoleh KUD dan juga petani akan semakin besar.

Menurut informasi salah seorang pengurus KUD, ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi kecenderungan KUD menjual TBS ke pabrik kelapa sawit swasta, yaitu:

- a) Perbedaan penawaran harga yang lebih tinggi oleh pabrik swasta;
- b) Adanya jaminan pinjaman permodalan atau kredit keuangan;
- c) Penyediaan pupuk;
- d) Pembelian TBS secara tunai.

Beberapa keuntungan tersebut yang pada akhirnya melatarbelakangi KUD lebih tertarik menjual hasil TBS petani ke pabrik swasta dari pada ke PTPN V sebagai perusahaan inti di lokasi penelitian. Seperti terungkap dalam petikan wawancara sebagai berikut :

“memang betul saat ini KUD lebih tertarik untuk menjual TBS ke pabrik swasta dari pada ke PTPN. Ini bukan penghianatan, tetapi realitasnya memang mengharuskan seperti ini. Toh petani juga akan diuntungkan. Selain harganya juga lebih tinggi dari yang ditawarkan pihak PTPN, terkadang pihak pabrik swasta juga memberikan kemudahan bagi KUD stok pupuk yang dibutuhkan petani. Mereka juga sering menawarkan pinjaman modal untuk KUD. Bahkan terus terang saja kita sendiri juga bingung mereka sering membujuk kita sambil menawarkan uang puluhan juta rupiah sebagai DP agar kita mau menjual TBS ke pabrik mereka.”

Dari kondisi tersebut nampak bahwa terdapat bentuk persaingan tidak sehat pada pemasaran TBS, terutama antara pabrik swasta dengan PTPN V yang sebenarnya merupakan perusahaan inti bagi para petani plasma di lokasi penelitian. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa saat ini hubungan antar plasma dan inti tidak berjalan efektif dan lebih berdasarkan pada pertimbangan bisnis semata. Keuntungan bisnis nampaknya lebih berperan dibandingkan dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan kebijakan pemerintah membentuk PIR Bun di daerah ini. Untuk menanggapi permasalahan

tersebut, seyogyanya pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proyek pelaksanaan PIR Bun dapat belajar dari kasus tersebut. Sehingga jika di masa datang akan diterapkan proyek semacam PIR dapat dilakukan secara lebih baik dan keberhasilannya berlangsung secara lebih berkesinambungan.

4.4. Peran Kelembagaan Pertanian di Tingkat Desa

Keberhasilan pembangunan pertanian khususnya perkebunan tidak hanya tergantung dari penggunaan teknologi untuk memanfaatkan potensi yang ada, tetapi juga perlu di dukung faktor lainnya dalam tataran yang lebih luas. Menurut Sajogyo (1997) keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan dari jalannya keterkaitan antara empat faktor yaitu ketersediaan SDA, kemampuan SDM, penggunaan teknologi dan berjalannya fungsi kelembagaan pertanian. Setiap faktor tersebut fungsinya harus saling menunjang dengan faktor lainnya. Oleh karena itu penerapan teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan pertanian di lapangan (*level* petani) tetapi perlu diimbangi oleh pengelolaan SDA, manusia dan kelembagaan yang ada.

Dalam melihat peran kelembagaan pertanian di pedesaan paling tidak harus terkait dengan keragaan kelembagaan yang ada yaitu kelembagaan alih/transfer teknologi, permodalan (perkreditan), produksi (pengolahan) dan pemasaran hasil pertanian. Penguatan keseluruhan kelembagaan tersebut harus memiliki makna peningkatan daya saing usaha pertanian yang dikembangkan. Menurut Pranadji (1997), satu hal yang terpenting dalam membangun kelembagaan pertanian adalah ada kemauan dari setiap anggota dan pengurus kelembagaan untuk mendukung tata nilai (fungsi dan peran) dari kelembagaan tersebut. Jika kelembagaan pertanian diisi oleh tata nilai yang maju, maka dipastikan daya saing kelembagaan yang dikembangkan tersebut akan tinggi dan berkelanjutan. Begitu pula sebaliknya, untuk kelembagaan yang tidak mampu meningkatkan fungsi dan perannya dengan baik akan tersingkir dengan kelembagaan

lainnya yang juga memanfaatkan peluang yang tersedia dalam setiap aspek kegiatan usaha tani.

Menurut Mubyarto (1987) kelembagaan dalam suatu masyarakat mempunyai peranan penting dalam menopang perkembangan kehidupan masyarakat dalam suatu batasan tertentu, misalnya kelembagaan yang berada di tingkat desa. Kelembagaan tersebut biasanya dibentuk berawal dari kebutuhan bekerja sama sebagai makhluk sosial untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam masyarakat pertanian terdapat beberapa lembaga yang mempunyai peranan penting dan mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat petani dalam kegiatan sehari-harinya. Dari hasil studi kelembagaan pada petani plasma kelapa sawit di Desa Sialang Sakti, minimal terdapat 4 kelembagaan pertanian yang memiliki peran cukup besar dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Kelembagaan tersebut adalah kelompok tani, Koperasi Unit Desa, PTPN V dan Perusahaan Perkebunan Swasta, serta Pemerintah Daerah. Pada sub bagian ini selanjutnya akan dibahas tentang peran dan kinerja kelembagaan KUD dan kelompok tani yang ada di daerah penelitian. Sedangkan pada peran dan kinerja kelembagaan lainnya dapat dilihat pada matrik karakteristik kelembagaan pertanian pada bagian akhir tulisan ini.

4.4.1. Koperasi Unit Desa (KUD).

Kelembagaan KUD di Desa Sialang Sakti bernama KUD Mandiri Palma Jaya. Kelembagaan KUD ini berdiri sebagai bagian dari salah satu paket proyek pelaksanaan PIR kelapa sawit di desa tersebut. KUD Mandiri Palma Jaya telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi Provinsi Riau dengan Nomor Badan Hukum: 93/BH/PAD/KWK.4/5.1/II/1996 pada tanggal 15 Februari 1996. Perkembangan KUD Palma Jaya sejak saat menjadi binaan perusahaan inti hingga menjadi KUD mandiri sangat menarik untuk diperhatikan. Sebelum tahun 1998, menurut penjelasan salah seorang pengurus KUD tersebut, kinerja kelembagaan KUD masih sangat

terbatas. Operasional KUD masih sangat tergantung dari kucuran dana dan fasilitas yang diberikan perusahaan inti, sementara manajemen pengelolaannya masih sangat sederhana dan kegiatan usahanya terfokus pada penyediaan tenaga kerja kebun, terutama disaat panen kelapa sawit.

Setelah melalui rentang waktu yang cukup panjang perkembangan KUD Palma Jaya semakin meningkat terutama dengan adanya pemberian kredit permodalan yang cukup besar dari beberapa sumber, salah satunya dari lembaga perbankan. Unit usaha yang dikembangkan tidak hanya sebagai penyedia tenaga kerja kebun, tetapi telah meluas pada seluruh aspek kegiatan ekonomi yang ada di desa tersebut. Beberapa unit usaha yang menjadi kegiatan utama KUD Mandiri Palma Jaya sampai dengan akhir tahun 2003 diantaranya adalah Unit Pelayanan Simpan pinjam (USP), Unit Pelayanan Pangan dan Waserda melalui tempat-tempat Pelayanan Koperasi (TPK), Unit Angkutan Tandan Buah Segar, Unit Saprodi, dan Unit Pengadaan. Pada program kerja tahun 2004/2005 koperasi ini telah memperluas jaringan kegiatannya pada penyediaan barang-barang elektronik, *meubel dan furniture*, *dealer* sepeda motor dan pengembangan unit armada angkutan.

Pelayanan KUD juga tidak terbatas hanya pada kebutuhan setiap anggota, tetapi pada pemenuhan kebutuhan petani non plasma serta menjalin mitra kerjasama dengan KUD lainnya di lokasi penelitian. Menurut informasi Ketua Pengurus KUD Mandiri Palma Jaya, selain untuk meningkatkan kesejahteraan setiap anggota KUD, koperasi ini juga telah mengembangkan kegiatannya menjadi *supplier* kebutuhan pupuk dan saprodi bagi 6 KUD lainnya yang ada di Kecamatan Dayun. KUD Mandiri Palma Jaya juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa PKS swasta yang ada di sekitar Kecamatan Dayun sebagai mitra kerja, terutama dalam pemasaran TBS hasil produksi petani plasma Desa Sialang Sakti. Saat ini untuk pemenuhan kebutuhan permodalan, KUD ini telah bekerjasama dengan 3 lembaga perbankan yaitu Bank Bukopin, BRI dan Bank Permodalan Mandiri. Total aktiva yang dimiliki KUD Mandiri Palma Jaya pada tahun 2003 mencapai sekitar Rp 3,8 Miliar, jumlah ini mengalami peningkatan

dibandingkan total aktiva pada tahun 2002 yang mencapai Rp 2,9 Miliar:

Keberhasilan KUD Mandiri Palma Jaya mengembangkan berbagai kegiatan usahanya, tidak terlepas dari dukungan dan kemampuan pengurus KUD serta kepercayaan setiap anggotanya. Selain kemampuan manajerial yang didapatkan melalui berbagai pelatihan manajemen koperasi di tingkat daerah dan provinsi, pengurus KUD juga harus mampu menjadi *figure* baik di kalangan masyarakat. Menurut keterangan salah seorang pengurus KUD Mandiri Palma Jaya, latar belakang mengapa KUD di Desa Sialang Sakti bisa menjadi KUD mandiri karena:

- a) Pengurus bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- b) Transparansi administrasi terutama tentang laporan keuangan;
- c) Pengembangan usaha yang mendukung seluruh kebutuhan anggota;
- d) Kepercayaan dan rasa kebersamaan yang sangat kuat antara pengurus dengan anggota. Keempat aspek tersebut merupakan kunci pokok dalam membangun kesuksesan suatu KUD sebagai soko guru perekonomian khususnya di daerah pedesaan.

4.4.2. Kelompok Tani

Di Desa Sialang Sakti terdapat 28 kelompok tani kelapa sawit dengan jumlah anggota setiap kelompok sekitar 16 sampai 28 orang. Pembagian anggota dalam setiap kelompok tani berdasarkan pada lokasi kebun dari hasil pembagian lahan pada awal pelaksanaan proyek PIR. Struktur setiap kelompok tani terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Kelompok tani ini dalam struktur pengelolaan perkebunan kelapa sawit di desa ini mempunyai peran dalam:

- a) Penandatanganan surat perjanjian penjualan TBS ke KUD;

- b) Peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tani;
- c) Pengorganisasian kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, seperti pemupukan, pembersihan lahan dan panen TBS.
- d) Penanggulangan kebutuhan darurat anggota kelompok, seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, sakit dan pengembangan usaha;
- e) Pertanggungjawaban pemotongan biaya pembangunan dan pinjaman di KUD maupun Waserda.

Pertemuan anggota kelompok diadakan satu kali dalam sebulan dengan acara pembahasan permasalahan yang ada di antara anggota kelompok dalam pengelolaan tanaman kelapa sawit. Apabila permasalahan tersebut terkait dengan KUD seperti pupuk dan saprodi, maka pada saat pertemuan dihadirkan staf KUD yang dapat memberi penjelasan pada anggota kelompok tani yang bersangkutan.

Gambaran kelompok tani di atas, bahwa ketua kelompok tani merupakan penghubung antar petani kelapa sawit dengan KUD sebagai mitra kerja utama kelompok tani tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan sistem kerja pengelolaan perkebunan kelapa sawit, di mana sebagian besar pekerja kebun merupakan tenaga kerja kontrak/sewa yang harus dikoordinasikan dengan KUD Mandiri Palma Jaya agar tidak terjadi benturan jadwal kerja. Tugas lain dari kelompok tani adalah memonitor setiap perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit setiap anggota, dan pada kasus tertentu juga harus bersedia menerima tanggung jawab mengurus kebun salah satu anggota yang diatur melalui kesepakatan bersama; terutama dalam pembagian keuntungan di kelompok tersebut. Pemberian wewenang dalam pengelolaan kebun kepada pengurus kelompok tani biasanya dilakukan jika anggota tersebut tidak mampu mengurus kebun miliknya sendiri atau pindah ke desa lain. Sementara itu, tugas sekretaris dan bendahara adalah membantu pekerjaan ketua kelompok terutama dalam pengorganisasian kerja dan menjamin kelancaran kegiatan setiap anggota kelompok.

Gambaran kerja kelompok tani di perkebunan kelapa sawit tersebut memperlihatkan, walaupun bentuk kepengurusannya sangat sederhana namun cara kerja mereka sangat mengedepankan

manajemen usaha yang mandiri dan prinsip kebersamaan sebagai karakteristik masyarakat pedesaan. Dalam mata rantai kelembagaan pertanian di lokasi penelitian, keberadaan kelompok tani merupakan salah satu kelembagaan pertanian yang terpenting dalam menentukan keberhasilan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Kelompok ini merupakan lembaga yang terdekat dengan petani, terutama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam pemberdayaan petani seharusnya juga menyentuh peran dan fungsi kelompok tani. Sementara itu, prestasi kelembagaan kelompok tani seperti yang terjadi di lokasi ini dalam mengorganisasikan kepentingan petani seharusnya juga dapat menjadi contoh bagi setiap kelompok tani di daerah lain agar tujuan pembangunan pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani dapat dengan mudah diwujudkan.

4.5. Hubungan Kerja Plasma dan Inti : suatu kecenderungan

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, pelaksanaan program PIR pada hakeketnya bertujuan untuk membangun pengembangan dan pengelolaan perkebunan yang saling menguntungkan antara perusahaan perkebunan (inti) dan petani perkebunan (plasma) dalam suatu proses produksi. Dalam hubungan kerja tersebut secara konseptual perusahaan perkebunan (inti) dan petani perkebunan (plasma) sebagai lembaga primer memiliki posisi sebagai mitra kerja sejajar, sehingga dalam melakukan setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan perkebunan akan selalu saling membutuhkan dan tergantung satu dengan lainnya.

Pada perusahaan perkebunan, semua faktor produksi dan manajemen dipadukan untuk menghasilkan keuntungan usaha secara optimal. Upaya tersebut difungsikan dengan memberikan dukungan dan bimbingan kepada petani plasma dalam berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Sedangkan bagi para petani plasma, kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui penjualan hasil perkebunan kepada perusahaan inti sebagai timbal balik keterikatan

antar kedua belah pihak dalam pengelolaan perkebunan. Dalam jangka panjang kerjasama pengelolaan perkebunan melalui pola PIR tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan petani plasma dan jaminan keberlangsungan kegiatan pengelolaan perkebunan.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, dalam keberhasilan pelaksanaan PIR aspek kesinambungan kerjasama antar kedua pihak (inti-plasma) menjadi sangat penting dan relevan karena menyangkut keberlangsungan hubungan yang telah dibangun dan telah melibatkan pendanaan proyek yang cukup besar. Sementara di lain pihak, kesinambungan hubungan plasma dan inti menjadi relevan karena model pengembangan perkebunan melalui pola PIR telah menimbulkan berbagai kritik (positif atau negatif) dari berbagai pihak, baik menyangkut keberhasilannya maupun upaya perbaikan sebagai masukan bagi pemerintah. Namun tampaknya dari hasil studi kasus di perkebunan Sei Buatan, hubungan kerja antara perusahaan inti dan petani plasma cenderung semakin mengarah pada *bussiness as usual*. Artinya hubungan yang terbangun saat ini hanya pada tataran jual beli TBS yang mengedepankan aspek perolehan keuntungan secara ekonomis (*profitable*). Antara kedua pihak memiliki kepentingan dan pertimbangan tersendiri terutama dalam proses penjualan TBS. Di satu sisi, perusahaan inti sebagai pihak yang diakui telah memberikan banyak jasa dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, merasa “dilupakan” oleh petani plasma yang lebih memilih menjual TBS ke pabrik swasta. Sehingga konsentrasi pengembangan perkebunan yang dilakukan perusahaan inti lebih kepada upaya mengoptimalkan hasil perkebunan milik lahan perusahaan.

Sementara di sisi lain, petani plasma cenderung memilih untuk mengembangkan usaha perkebunannya (penjualan TBS) melalui kerjasama dengan lembaga lain di luar perusahaan inti. Kecenderungan tersebut semakin menguat terutama setelah selesainya akad kredit oleh petani plasma dan semakin besarnya *bargaining position* petani melalui KUD dan kelompok tani. Berdasarkan

wawancara dengan beberapa informan, kecenderungan tersebut tidak mungkin dapat dihindari karena pada dasarnya hubungan kerja antara plasma dan inti tidak terikat secara formal terutama setelah akad kredit. Oleh karena itu akan sulit untuk memadukan kedua pihak terikat dalam satu kerjasama pada jangka waktu yang relatif lama.

Namun demikian, terlepas dari kondisi dan perubahan yang terjadi dalam hubungan kerja plasma dan inti di lokasi penelitian, satu hal yang sangat penting adalah bahwa kecenderungan perubahan tersebut telah berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani plasma di lokasi penelitian. Pada aspek ini maka dapat dikatakan upaya yang selama ini dilakukan melalui pelaksanaan program PIR di lokasi penelitian telah mampu memperbaiki kehidupan petani plasma. Artinya salah satu dari tujuan pelaksanaan PIR dapat terealisasikan dan memungkinkan terciptanya perbaikan dalam hal model-model pengelolaan perkebunan di masa datang.

4.6. Penutup

Pada prinsipnya pengembangan sub sektor perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi yang banyak memberikan peluang di segala bidang. Pada aspek ketenagakerjaan, pengembangan kelapa sawit akan memberikan peluang terciptanya kesempatan kerja melalui keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar di setiap tahap pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Di bidang pengolahan hasil, kegiatan tersebut juga memberikan peluang penyerapan tenaga kerja terutama pada industri hulu dan hilir yang memanfaatkan produk dari kelapa sawit untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih menguntungkan.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit juga mempunyai peran besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat, baik yang menyangkut pendapatan keluarga petani, pendapatan masyarakat, serta pendapatan sebagai akibat *backward linkages* dan *inward linkages* dari aktivitas perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks pembangunan antara

wilayah yang lebih luas, aktivitas perkebunan kelapa sawit juga berperan dalam pengembangan wilayah, distribusi dan mobilitas penduduk antar daerah, hingga menciptakan pra kondisi ke arah industrialisasi dan perekonomian modern yang berbasis agribisnis dan agroindustri.

Untuk memaksimalkan peluang-peluang tersebut, dalam konteks makro dibutuhkan kinerja pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara terpadu dan didukung oleh berbagai faktor yang terintegrasi secara baik. Di antara faktor tersebut adalah kesesuaian kebijakan di tingkat pemerintah daerah, kelayakan iklim usaha, peningkatan kegiatan investasi, ketersediaan sarana dan prasaran kegiatan ekonomi pertanian, berjalannya peran kelembagaan pertanian, hingga terciptanya struktur pengembangan pertanian yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, di tingkat mikro perlu dilakukan reorientasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas para petani dan peningkatan efisiensi sistem agribisnis komoditi kelapa sawit. Kelembagaan pertanian di tingkat primer (petani) dan lembaga pedesaan perlu ditata dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan petani dan masyarakat pedesaan, disertai dengan pengembangan kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan KUD yang mandiri di segala aspek kebutuhan masyarakat petani.

Lampiran 1: Fungsi, Peran dan Karakteristik Kelembagaan Pertanian di Lokasi Penelitian

Kelembagaan	Fungsi dan Peran	Karakteristik
PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan inti 2. Pendamping bagi petani plasma dalam pengelolaan perkebunan 3. Penentu harga pasar TBS dan CPO 4. Pendamping bagi pemerintah daerah dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit milik Pemda 5. Sumber pendapatan pemerintah melalui pengoperasian perkebunan dan PKS 6. Penyedia lapangan kerja melalui tenaga kerja kontrak perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbentuk formal/BUMN • Berada dalam satu wilayah perkebunan dengan perkebunan rakyat (plasma) • Memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) • Mengelola banyak perkebunan di beberapa lokasi. • Setiap kebun dikelola oleh seorang manajer perkebunan yang dibantu oleh beberapa asisten kebun • Memiliki organisasi birokrasi dengan melibatkan kantor pusat dan cabang perkebunan
Perkebunan Kelapa Sawit Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan TBS dan produksi CPO untuk tujuan komersial perusahaan • Penyedia lapangan kerja yang cukup besar • Terlibat dalam penentuan harga TBS dan CPO • Menerima penjualan TBS dari petani • Mitra KUD dalam penyediaan kebutuhan pengelolaan perkebunan dan penjualan TBS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formal/Perseoran Terbatas • Mengembangkan perkebunan kelapa sawit milik sendiri atau tanpa perkebunan kelapa sawit • Mengoperasikan pabrik kelapa sawit milik sendiri • Memiliki cabang perusahaan di beberapa daerah • Memiliki jaringan dengan industri kelapa sawit di dalam dan luar daerah • Struktur organisasi profesional sesuai dengan manajemen perusahaan.
Koperasi Unit Desa (KUD)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengorganisasikan seluruh kegiatan pengelolaan kelapa sawit bersama kelompok tani (seperti pemupukan, pemeliharaan, panen, penyediaan tenaga kerja perkebun, pengangkutan TBS, penjualan TBS) • Menyediakan kebutuhan saprodi (pupuk, obat-obatan, peralatan) kebutuhan pokok (pangan) dan permodalan petani kelapa sawit (kredit simpan pinjam) • <i>Transfer of knowledge</i> dan <i>skills</i> kepada kelompok petani • Mitra kerjasama dengan perusahaan inti dan perusahaan perkebunan swasta • Menjalin mitra kerjasama dengan koperasi lain dan kelembagaan lain di tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbentuk formal/koperasi • Pendiriannya disahkan oleh surat keputusan resmi berbadan hukum • Memiliki pengurus yang dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota • Pengurus koperasi juga petani kelapa sawit • Keberhasilan kinerja ditentukan oleh kredibilitas pengurus, kelangsungan kegiatan dan kepercayaan para anggota. • Petanggungjawaban kegiatan dilakukan pada RTA yang dilaksanakan setiap akhir tahun • Bekerja berdasarkan AD ART yang sudah disetujui oleh seluruh anggota • Memiliki asset aktiva yang cukup besar

<p>Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulator kebijakan dan program pembangunan • Merencanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan <i>master plan</i> yang telah disusun • Sebagai penengah apabila terjadi <i>conflic interest</i> (pertanahan) • Pengorganisasian perizinan • Memberikan pendidikan dan pelatihan • Pemberdayaan kelembagaan pertanian di tingkat desa (KUD dan Kelompok tani) • Membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perkebunan • Menarik investor untuk menanamkan modal di bidang perkebunan kelapa sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan banyak instansi, terutama Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Deperindag, Bappeda dan lainnya • Operasional kegiatan berada di ibu kota kabupaten • Berkompeten dalam hal perencanaan kebijakan, pengawasan pelaksanaan program dan pendampingan bagi kelembagaan di seluruh tingkatan dari tingkat desa hingga kabupaten • Penghubung jalur komunikasi birokrasi dengan tingkat provinsi
--------------------------	--	---

Sumber : Data Primer, Penelitian Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit, PPK – LIPI (2004)

BAB V

PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA KOMODITI KELAPA SAWIT: Sektor Hulu dan Hilir

Pada saat ini, tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian pemerintah di tingkat Provinsi Riau umumnya, termasuk Kabupaten Siak. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, tampaknya kegiatan usaha kelapa sawit di sektor hulu maupun hilir sangat potensial untuk penyerapan tenaga kerja. Misalnya pada sektor hulu seperti pada pengelolaan 2 hektar perkebunan kelapa sawit dapat menyerap 1 orang tenaga kerja, sehingga untuk luas lahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Siak saat ini (131.128 hektar) dibutuhkan tenaga kerja sekitar 65.564 orang (BPS Kabupaten Siak, 2003). Jumlah pekerja ini belum termasuk mereka yang terserap di sektor produksi maupun bidang lain yang terkait dengan kegiatan komoditi kelapa sawit. Kebutuhan tenaga kerja di sektor kelapa sawit akan semakin meningkat bila Kabupaten Siak mengembangkan sektor hilir. Oleh karena itu perlu diantisipasi pengembangan sektor komoditi kelapa sawit dari tingkat industri hulu hingga industri hilir secara berkelanjutan yang diikuti dengan ketersediaan dan kesiapan SDM pada bidang-bidang di sektor tersebut.

Mengacu kepada tingginya peluang terciptanya kesempatan kerja pada komoditi kelapa sawit di Kabupaten Siak, maka pada bab ini akan membahas prospek penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Dalam hal ini akan dilihat dari kesiapan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait pada usaha komoditas kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir. Ada tiga hal yang akan menjadi pokok bahasan pada bagian ini, yaitu: 1) keberlangsungan pengelolaan kelapa sawit, 2) prospek pengelolaan kelapa sawit di

sektor hulu dan hilir; 3) prospek penyerapan tenaga kerja dilihat dari peluang dan tantangannya.

5.1. Keberlangsungan Usaha Kelapa Sawit: pemeliharaan, pemasaran dan peremajaan (*re-planting*)

Berdasarkan Visi Kabupaten Siak tahun 2020, fokus pembangunan Kabupaten Siak adalah untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di samping sebagai tujuan pariwisata budaya Melayu serta pusat budaya Melayu. Salah satu sektor perkebunan yang sedang dikembangkan dan menjadi primadona Kabupaten Siak, bahkan untuk Provinsi Riau, adalah kelapa sawit yang pada saat ini merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah minyak dan gas (*migas*). Perkembangan kelapa sawit di Kabupaten Siak diawali dalam bentuk pola PIR-BUN dengan dana ADB yang dikaitkan dengan program transmigrasi sekitar tahun 1984, yang kemudian dilanjutkan dengan dana Bank Dunia dan Swadana. Kondisi geografis yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit juga membuka keinginan pengusaha swasta, termasuk pengusaha dari Malaysia, untuk berusaha di perkebunan kelapa sawit. Akhirnya, pada tahun 2004 pemerintah Siak sendiri mulai membuka lahan baru yang direncanakan akan dikelola oleh penduduk lokal.

Melihat perkembangan usaha komoditas kelapa sawit di daerah ini menunjukkan, bahwa komoditi ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyediaan lapangan pekerjaan, yang secara langsung akan meningkatkan kebutuhan ekonomi penduduk. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari berbagai pihak yang langsung terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit agar usaha ini dapat berlangsung antara lain petani, koperasi, perusahaan, dan pemerintah daerah. Keempat komponen tersebut merupakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang seharusnya dapat menjembatani pengembangan usaha kelapa sawit ke arah agroindustri dan agribisnis, sehingga keberlangsungan usaha ini dapat terlaksana. Sub-bagian ini akan mendeskripsikan dan mengkaji peran para *stakeholders* di atas yang diperkirakan dapat mendukung usaha kelapa sawit agar stabil

dan meningkat sesuai dengan permintaan pasar, serta tidak merugikan satu dan lainnya sehingga memberi peluang dalam menciptakan kesempatan kerja.

Peran Petani

Perkembangan usaha kelapa sawit sangat ditentukan oleh kesiapan petani perkebunan kelapa sawit sebagai pemasok bahan dasar usaha tersebut. Hal ini karena petani merupakan tombak terdepan untuk keberlangsungan usaha kelapa sawit menuju sektor agroindustri maupun agribisnis di bidang ini. Berdasarkan data penduduk Kabupaten Siak tahun 2000, penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai lapangan pekerjaan di perkebunan adalah 16,7 persen dari 83.196 orang (Bappeda Siak, 2002:IV-6). Angka ini menunjukkan peningkatan dilihat dari data penduduk tahun 2002, di mana penduduk yang mempunyai lapangan pekerjaan di pertanian ada 50,35 persen dari 95.701 orang (BPS, 2003). Mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Siak yang akan menjadikan daerah ini sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, maka lapangan pekerjaan di sektor perkebunan termasuk kelapa sawit diharapkan akan lebih memberi peluang pekerjaan yang dengan sendirinya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk pencapaian keberhasilan penduduk yang bergerak di bidang pertanian, khususnya perkebunan, ada beberapa tahap yang perlu menjadi perhatian agar hasil yang dicapai dapat maksimal sesuai dengan kebutuhan pabrik untuk dijadikan CPO sebagai bahan dasar industri hilir, yaitu tahap pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen.

Wilayah perkebunan kelapa sawit Sei Buat, baik lahan PTPN V maupun perkebunan rakyat pola PIR, pada awal pembukaan lahan hingga penanaman dilaksanakan oleh PTPN V dengan mempekerjakan para transmigran sebagai pekerja harian lepas (PHL). Pada tahap pembukaan lahan dan penanaman yang terlibat adalah transmigran laki-laki mengingat pekerjaan ini cukup berat, sedangkan

perempuan umumnya dilibatkan pada kegiatan pembibitan¹². Keterlibatan calon petani kelapa sawit ini merupakan salah satu program transmigrasi dalam memberi kesempatan peserta transmigran untuk memperoleh pendapatan sebelum pohon sawit mereka menghasilkan. Dari sisi perusahaan merupakan program pelatihan secara langsung dalam tata cara pengelolaan kelapa sawit dari tahap awal hingga panen. Pengetahuan ini diharapkan akan memberi pembekalan dan bermanfaat bagi petani, terutama pada mereka yang akan melakukan pengembangan di masa datang. Namun pada tahap ini ada sebagian masyarakat transmigran merasa hanya sebagai buruh atau pekerja perusahaan karena masih belum yakin kalau tanah yang sedang dikerjakan kelak akan menjadi milik mereka.

Ketika pohon kelapa sawit berusia sekitar tiga tahun baru diserahkan kepada petani untuk dikelola, namun perawatan seperti pemupukan masih diawasi oleh PTPN. Pada tahun-tahun pertama setelah penyerahan, ada masyarakat yang belum siap dan biasa terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit, sehingga ada yang menjualnya kepada masyarakat yang paham dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit seperti kepada transmigran lokal asal Sumatera Utara yang di tempat asalnya juga berusaha di perkebunan. Kelompok yang gagal ini tidak besar dan umumnya adalah transmigran asal Jawa Barat atau mereka yang di daerah asal tidak bekerja di bidang pertanian sehingga kurang kuat untuk mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 2 hektar.

Perkebunan rakyat (PIR) kelapa sawit di Sei Buatan telah berjalan sekitar 20 tahun sehingga saat ini peran petani hanya pada tahap pemeliharaan (*nyiang* dan *nunas*) dan panen (*ngegrek* dan *ngebrodol*). Pada awal penyerahan lahan, para petani beserta anggota keluarga yang umumnya adalah transmigran sangat berperan pada setiap kegiatan dalam pengelolaan perkebunan miliknya. Namun peran tersebut mengalami perubahan ketika mereka telah berhasil secara ekonomi dan melakukan pengembangan lahan, baik di lokasi

¹² Kegiatan pembibitan adalah menanam biji kelapa sawit pada kantong plastik (binil) sebelum ditanam pada lahan perkebunan kelapa sawit.

perkebunan Sei Buatan maupun di luar Kabupaten Siak. Petani yang juga pemilik perkebunan kelapa sawit ada yang beralih profesi ke tingkat manajemen yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan di perkebunan, namun lebih luas ke masyarakat di luar perkebunan. Begitupula dengan anggota keluarga lainnya seperti isteri mulai tidak pergi ke perkebunan, dan beralih ke profesi lain seperti berdagang. Kegiatan di kebun lebih banyak dilakukan oleh buruh tani, yang umumnya adalah petani yang tidak memiliki kebun atau luas lahannya kecil. Hal yang menarik, akhir-akhir ini di masyarakat perkebunan Sei Buatan anak muda yang mau terlibat dalam kegiatan di perkebunan kelapa sawit memperlihatkan peningkatan karena prospek untuk memenuhi kehidupan lebih memungkinkan atau nyata.

Mengacu kepada peran petani kelapa sawit dan perkembangannya selama lebih kurang 20 tahun, tampaknya perlu pemikiran dalam peningkatan dan pemberdayaan petani kelapa sawit agar keberlangsungan pengembangan usaha kelapa sawit terus berlanjut, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit. Hal ini mengingat produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat atau pola PIR di Provinsi Riau masih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta besar maupun pemerintah. Pada tahun 1988 hasil yang dicapai oleh perkebunan rakyat 2.059 kg per hektar, perusahaan besar 4.386 kg per hektar, dan perusahaan pemerintah 6.800 kg (Dinas Perkebunan Prov. Riau, 2003). Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih lemahnya SDM petani kelapa sawit, dan kurangnya keinginan untuk meningkatkan pengetahuan yang dapat membangun usaha kelapa sawit, baik pada usaha di sektor hulu maupun sektor hilir.

Dalam kaitannya dengan peningkatan SDM pada usaha pengembangan kelapa sawit ke depan diperlukan pemberdayaan petani baik pada tingkat pengelolaan di perkebunan (tahap penanaman, pemeliharaan, panen), maupun pada usaha kelapa sawit pada sektor hilir. Seperti pada sektor agribisnis, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani kelapa sawit tidak hanya di bidang pengelolaan usaha kelapa sawit, namun juga di bidang

penangkaran benih atau bibit kelapa sawit, manajemen usaha kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, dan sistem pemasaran hasil pengolahan kelapa sawit. Pelatihan ini dapat diberikan secara komprehensif oleh Dinas Pertanian/Perkebunan, Tenaga Kerja, PTPN V yang mempunyai kaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Riau, dan pihak swasta yang bergerak di sektor hilir kelapa sawit. Pengetahuan ini tidak hanya diberikan kepada para petani sebagai usaha peningkatan dan pengulangan kembali (*revitalisasi*) pengetahuan yang pernah diterima pada awal dimulainya usaha perkebunan kelapa sawit, namun juga diberikan kepada para pemuda yang berminat melanjutkan usaha kelapa sawit. Sebagaimana yang pernah diungkapkan seorang pemuda yang melakukan kegiatan di perkebunan kelapa sawit:

“kelapa sawit memang dapat menghidupi kami, namun kami membutuhkan pengetahuan tentang penanaman kelapa sawit untuk menghadapi masa re-planting agar dapat melakukannya sesuai dengan dasar penanaman yang baik. Selain itu, kami juga ingin mengetahui cara pemupukan yang baik agar hasil sawit (rendemen) sesuai dengan kebutuhan pabrik atau dapat setara dengan hasil yang ditanam oleh perusahaan inti (PTPN V). Hal lain adalah usaha lain yang dapat kami lakukan selama menunggu pohon kelapa sawit menghasilkan kembali setelah dilakukan penanaman ulang “.

Ungkapan di atas memperlihatkan, bahwa di satu sisi para pemuda di daerah perkebunan kelapa sawit memandang adanya gambaran masa depan dalam usaha kelapa sawit, namun di sisi lain muncul kekhawatiran bila tiba masa *re-planting* karena belum ada bayangan apa yang akan dilakukan untuk menutupi masa-masa kelapa sawit belum menghasilkan. Untuk menghadapi situasi ini tampaknya perlu partisipasi berbagai pihak agar petani tetap berperan dalam melestarikan maupun mengembangkan usaha kelapa sawit agar sektor hulu tidak mati, di samping keberlangsungan sektor hilir. Di samping

itu, permasalahan pengangguran di kalangan pemuda dapat teratasi apabila peluang kerja yang ada di bidang kelapa sawit tetap terbuka.

Peran Koperasi

Koperasi Unit Desa (KUD) mempunyai peran sangat strategis dalam menunjang keberhasilan petani kelapa sawit dalam pengembangan usahanya. Hal ini sangat nyata terlihat di wilayah perkebunan Sei Buatan, yang awalnya dibentuk sebagai sarana penghubung pendistribusian tandan buah segar (TBS) ke pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dan pendistribusian pupuk dari Inti ke petani Plasma. Pada masa sebelum konversi kinerja kelembagaan ini masih terbatas dengan manajemen sangat sederhana, serta dana operasional dan fasilitas lembaga sangat tergantung dari pemberian PTPN V. Setelah konversi peran KUD makin berkembang yang tidak hanya terbatas dengan PTPN V namun juga para *stakeholders* yang berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit seperti pabrik pengolahan kelapa sawit swasta, pihak pemerintah, agen pengumpul TBS, pengusaha saprodi, pengusaha peralatan kebun dan petani yang tergabung dalam kelompok tani. Dalam usaha untuk pengembangan sektor hulu kelapa sawit peran KUD tidak hanya penghubung pada jalur pemasaran namun juga kepada para pengambil kebijakan di sektor perkebunan, khusus kelapa sawit, dan pengusaha penyediaan kebutuhan untuk pengelolaan kegiatan di perkebunan kelapa sawit.

Pada dasarnya hubungan KUD dengan PTPN V merupakan hubungan yang telah dibangun sejak awal lokasi perkebunan dibuka, khususnya dalam proses produksi. Sifat dari hubungan tersebut mengacu kepada hubungan antara perusahaan inti dengan perkebunan plasma (petani). Secara konseptual, kedua lembaga tersebut mempunyai posisi sebagai mitra kerja sejajar pada kegiatan pengelolaan perkebunan. Pada awal dimulainya kegiatan perkebunan atau sebelum konversi, hubungan PTPN dan KUD lebih menonjol karena satu sama lain saling membutuhkan dan ketergantungan karena KUD merupakan penghubung antara inti dan plasma. Pada saat itu KUD berperan dalam mengkoordinir tenaga kerja yang dipekerjakan pada tahap awal di perkebunan seperti menanam bibit kelapa sawit dan pemeliharaan

awal (memberi pupuk dan menyangi rerumputan), menyalurkan saprodi jatah petani dari PTPN ke petani Plasma, dan mengkoordinir pelatihan bagi petani tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Setelah konversi, hubungan kerja KUD dengan PTPN V ada kecenderungan makin sempit yang lebih mengacu kepada hubungan komersial (*business as usual*) seperti penentuan harga TBS, pengurusan pembayaran hasil penjual TBS petani plasma, dan mengatasi permasalahan yang muncul antar petani plasma dan perusahaan. Situasi ini disebabkan karena setelah konversi KUD dapat dikatakan sebagai lembaga yang menggantikan peran PTPN V sebelumnya. Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pada tingkat petani plasma tidak lagi harus menunggu apa yang diputuskan oleh PTPN V, misalnya dalam pembelian pupuk dan kemana TBS akan dijual, karena semua telah dikelola oleh KUD. Situasi ini memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis antara petani plasma dan Inti karena memunculkan berbagai persoalan ketidakpuasan dari PTPN V karena merasa ditinggalkan oleh para petani plasma. Hubungan yang secara konseptual antara petani plasma dan perusahaan inti yang seharusnya berkelanjutan mulai 'kabur'. Untuk itu, peran KUD sangat diperlukan agar dapat menjembatani kembali hubungan kedua unit dari perkebunan kelapa sawit tersebut.

Di samping tetap menjalin hubungan kerja dengan PTPN V, KUD juga meningkatkan hubungan dengan *stakeholders* lainnya yang dapat meningkatkan kehidupan petani kelapa sawit. Untuk itu, KUD harus dapat mengembangkan unit usaha yang dikelola KUD dengan cara membina hubungan dengan para *stakeholders* terkait dengan usaha tersebut. Dalam kaitannya untuk peningkatan kesejahteraan petani, KUD diharapkan mampu menjalin hubungan dengan pihak swasta yang bergerak di sektor hilir dan berminat terhadap TBS petani.

Peran Perusahaan

Keberadaan perusahaan yang bergerak dalam usaha kelapa sawit sangat diperlukan bagi keberlangsungan sektor perkebunan tersebut, terutama perusahaan yang mengembangkan industri hilir untuk

menampung TBS petani. Selain perusahaan negara BUMN (PTPN V), di Kabupaten Siak terdapat 10 buah perusahaan swasta yang bergerak aktif di sektor perkebunan kelapa sawit yang berskala besar maupun dalam bentuk swadana. Khusus untuk perusahaan Negara, pada masyarakat perkebunan kelapa sawit di lokasi Sei Buatan mempunyai peran penting pada awal perkebunan tersebut dibuka. Dalam mengawali kegiatan program transmigrasi di Provinsi Riau, khusus di Kabupaten Siak, PTPN V diserahkan untuk mengelola berbagai jenis perkebunan termasuk kelapa sawit yang dianggap berhasil. Secara garis besar, PTPN V sebagai pelaksana sistem perkebunan dengan Pola PIR mempunyai peran dalam memberikan pelatihan dan pengembangan perkebunan seperti pemeliharaan, produksi, pemasaran dan peremajaan.

Pada awal kegiatan di perkebunan kelapa sawit Sei Buatan, Kabupaten Siak, PTPN V yang melakukan pembukaan hutan hingga menjadi lahan yang siap tanam, penanaman dan pemeliharaan bibit hingga siap ditanam, pemeliharaan dan kegiatan paska panen hingga pembuatan sarana jalan. Peran PTPN V tersebut masih terlihat setelah konversi, yaitu dalam bentuk pelatihan yang berkaitan dengan perawatan sawit seperti pemberian obat, pengembangan kelapa sawit dan manajemen usaha kelapa sawit. Kemudian, tahun 1989 hingga tahun 1993 untuk setiap desa masih ada satu orang asisten yang memberikan penyuluhan kepada petani. Kemudian sejak tahun 1993 hingga tahun 1997 asisten yang disediakan PTPN V adalah satu orang untuk tiga desa. Setelah akad kredit dilaksanakan peran PTPN V terhadap pengelolaan perkebunan Plasma makin berubah dan dapat dikatakan makin sempit. Asisten yang disediakan untuk membantu kegiatan petani makin kecil perannya; bahkan dapat dikatakan kurang menjangkau kebutuhan masyarakat. Untuk petani plasma yang 'aktif' dalam melaksanakan pekerjaannya akan menunjukkan hasil cukup memuaskan, namun bagi mereka yang biasa menunggu bantuan PTPN V akan menurun.

Berkurangnya peran PTPN V pada kegiatan petani plasma makin terlihat setelah akad kredit terjadi karena secara formal hubungan kerja antara perkebunan plasma dan perkebunan inti tidak terikat,

sehingga petani bebas untuk melakukan transaksi dengan siapa pun. Dari sisi PTPN V yang merasa ditinggalkan tidak mempunyai kewajiban lagi untuk mengawasi atau memberitahu kepada petani isu baru yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan, dan kalau mereka ingin tahu harus mempunyai inisiatif sendiri atau datang ke PTPN V. Lemahnya hubungan perusahaan Negara ini dengan petani Plasma sangat terkait dengan faktor eksternal, antara lain:

- Meningkatnya jumlah pabrik kelapa sawit yang memberi kesempatan dan alternatif bagi petani untuk menjual TBS yang dihasilkan;
- Meningkatnya jumlah dan kebutuhan TBS di tingkat perusahaan swasta akibat harga jual dan permintaan CPO yang cenderung meningkat;
- Terjadinya persaingan harga dan pemasaran yang tidak sehat antara perusahaan/pabrik kelapa sawit;
- Meningkatnya peran kelembagaan pertanian di tingkat desa seperti KUD dan Kelompok Tani yang dapat menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh perusahaan inti.

Mengacu kepada faktor faktor di atas terlihat bahwa perusahaan swasta mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit. Peran tersebut makin nyata ketika panen raya di mana PTPN V tidak dapat menampung TBS petani, sehingga petani melalui KUD akan menjual ke perusahaan swasta yang telah menjadi mitra kerjanya. Tindakan ini diambil untuk menghindari pembusukan yang dapat mengurangi tingkat *rendemen* TBS karena tidak langsung diolah. Keberadaan perusahaan swasta ini sangat membantu meningkatkan kehidupan petani plasma, walaupun dari sisi PTPN V merugikan. Apalagi perusahaan swasta ini mendatangi petani/KUD untuk membeli TBS dan membayar secara kontan; bahkan ada perusahaan yang telah memberi panjar terlebih dahulu ke dalam rekening KUD.

Seiring dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak, maka peran perusahaan swasta makin dibutuhkan untuk menampung TBS petani rakyat atau petani

plasma. Perusahaan tersebut tidak hanya yang dapat menghasilkan CPO namun jauh ke depan pada pengembangan industri hilir lainnya. Pengembangan industri ini tidak hanya mensejahterakan petani yang bergerak di kegiatan pertanian, namun juga penduduk Siak secara keseluruhan yang ingin bergerak di sektor pertanian yang bukan di perkebunan seperti agroindustri dan agribisnis.

Peran Pemerintah Daerah

Mengacu kepada Visi pembangunan daerah Kabupaten Siak yang akan menjadikan daerah ini sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, maka usaha perkebunan kelapa sawit merupakan 'primadona' yang dapat dikembangkan baik dari sektor hulu maupun hilir. Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintah daerah Siak mempunyai peran yang sangat menentukan, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan usaha kelapa sawit. Terutama pada era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersama dinas terkait telah menyusun kebijakan dan program yang diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Siak menuju tahun 2020. Di antaranya adalah pengembangan usaha kelapa sawit yang meliputi kebijakan untuk pengembangan lahan perkebunan, kebijakan pengembangan usaha industri hilir dan kebijakan peningkatan SDM sehingga dapat memenuhi syarat untuk pembangunan usaha agroindustri dan agribisnis yang sedang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak:

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak saat ini telah mencapai 131.168 hektar. Pada tahun 2004 luas areal perkebunan kelapa sawit tersebut diproyeksikan akan mencapai 168.665 hektar (BPS, 2002). Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit yaitu dengan menggunakan pola kerja sama antara pemerintah Kabupaten Siak dengan PTPN V. Pola ini mengikuti pola dasar PIR Trans, namun khusus untuk penduduk lokal yang masuk kategori miskin dengan menggunakan sistem saham. Salah satu tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan membuka kebun kelapa sawit tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

penduduk miskin di Kabupaten Siak. Kebijakan ini akan berlanjut untuk program tahun 2005 dengan membuka lahan perkebunan kelapa sawit seluas 5.182 hektar.

Di samping pengembangan lahan perkebunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diharapkan mulai mengantisipasi perkebunan yang telah berumur tua dan beberapa tahun lagi akan menghadapi masa *re-planting* agar keberlangsungan perkebunan kelapa sawit dapat dipertahankan. Petani di perkebunan Sei Buatan sangat merisaukan permasalahan *re-planting* ini karena saat itu akan tiba dalam waktu yang tidak lama lagi. Terutama pada petani yang hanya memiliki lahan sempit atau sekitar 2 hektar di samping tidak adanya dana yang cukup untuk menghadapi masa tersebut. Apabila hal ini tidak diperhatikan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, maka akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan penduduk.

Kemudian, dalam menghadapi keberadaan industri hulu dan industri hilir peran pemerintah sangat penting, terutama untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Misalnya kesiapan SDM sesuai dengan kebutuhan industri yang akan dibangun. Untuk itu pemerintah sangat berperan dalam merencanakan ketrampilan yang harus dipersiapkan oleh angkatan kerja berkaitan dengan industri yang akan dikembangkan, misalnya:

- Ketrampilan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit (pemeliharaan, pemupukan dan *re-planting*) dan manajemen pemasaran;
- Ketrampilan pada sektor agroindustri (industri pengolahan) yang akan dikembangkan di Kabupaten Siak;
- Ketrampilan pada sektor agribisnis seperti penangkaran benih, manajemen usaha perkebunan dan pemasaran;

Program pelatihan atau penyuluhan yang pernah diberikan oleh Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan PTPN V adalah pada kegiatan di perkebunan yang diberikan pada awal perkebunan tersebut dibuka. Pada saat ini masih ada PPL dari PTPN V namun penyuluhan yang diberikan sangat terbatas. Padahal banyak petani perkebunan yang

masih muda mengharapkan adanya penyuluhan secara intensif, terutama pada sistem perawatan yang dapat menghasilkan mutu *rendemen* kelapa sawit yang baik dan tinggi. Hal ini disebabkan para petani muda yang ada saat ini hanya bekerja berdasarkan 'pengalaman' dari orangtua mereka dan kurang mendapat informasi bagaimana meningkatkan mutu dari kelapa sawit tersebut.

Mengacu kepada bidang pendidikan yang dilalui para pemuda di desa dalam lingkungan Perkebunan Sei Buatan, tampaknya sangat jarang yang mengambil bidang pertanian, khususnya perkebunan. Misalnya di Desa Sialang Sakti tidak ada anak muda yang mempunyai pendidikan pertanian. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Siak mempersiapkan sekolah-sekolah kejuruan baik di tingkat SLTA maupun perguruan tinggi pada bidang-bidang yang terkait dengan sektor perkebunan, agroindustri dan agribisnis agar pencapaian Visi dan Misi pembangun daerah ini tercapai.

5.2. Prospek Pengelolaan Kelapa Sawit: Hulu dan Hilir

Memperhatikan peran *stakeholders* yang terkait dalam pengembangan usaha sektor perkebunan kelapa sawit di atas menunjukkan, bahwa bila peran tersebut dikelola dengan baik maka prospek untuk pengembangan ke sektor hulu maupun hilir dapat berlangsung. Dalam hal ini, para *stakeholders* harus dapat menduduki tempatnya sesuai dengan peran yang dimiliki sehingga tercipta suatu hubungan *win-win solution* di antara mereka. Di samping itu jenis dan struktur tanah Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Siak, yaitu *alluvial* dan *latosol* sangat tepat untuk tanaman kelapa sawit. Pada sub bagian ini akan menggambarkan prospek atau kemungkinan-kemungkinan pengembangan usaha kelapa sawit di Kabupaten Siak, baik pada sektor industri hulu maupun industri hilir.

Prospek Pengembangan Industri Hulu

Mengacu kepada ketersediaan lahan di Indonesia yang masih luas, Indonesia berusaha untuk dapat menyaingi Malaysia dalam usaha

komoditas kelapa sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor industri hulu makin meluas yang sebagian besar ada di wilayah Sumatera, yaitu Provinsi Nangro Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Di luar daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua Barat. Pada awal perkembangannya, perkebunan kelapa sawit dimulai oleh perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan (PTPN) sebagai bagian dari program transmigrasi. Lahan selusa 2 hektar diserahkan kepada peserta program transmigrasi untuk ditanami kelapa sawit. Hasil dari perkebunan tersebut (TBS) direncanakan akan menjadi pemasok industri hulu pembuatan minyak kelapa sawit mentah, yang dikenal dengan sebutan CPO (*Crude Palm Oil*) milik PTPN. Pola ini dikenal dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) di mana perkebunan besar (PTPN) sebagai 'inti' dan perkebunan rakyat sebagai 'plasma'. Kemudian, pada daerah yang memperlihatkan perkembangan pesat akan bermunculan perkebunan-perkebunan baru milik swasta maupun rakyat.

Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah berkaitan dengan sub-sektor perkebunan kelapa sawit akan berdampak terhadap pengembangan industri hulu pada usaha ini. Situasi ini makin mencuat pada era otonomi di mana daerah berusaha meningkatkan PAD agar dapat membangun daerahnya. Pada daerah yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit akan mengambil jalur alternatif ini yang dapat dijadikan sumber PAD cukup besar di luar migas. Pengembangan sektor industri hulu selain sub-sektor perkebunan adalah pendirian pabrik yang akan menjadikan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebagai pemasok bahan baku industri hilir (pengolahan), yaitu pabrik CPO. Pada umumnya pengusaha yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit akan mendirikan pabrik CPO sebagai sarana pengolahan awal TBS. Pendirian pabrik ini merupakan salah satu syarat bagi pengusaha yang akan membuka perkebunan kelapa sawit. Namun pada kenyataannya ada juga pengusaha yang hanya mendirikan pabrik CPO dan bahan bakunya dibeli dari petani. Hubungan ini lah yang sering

menimbulkan konflik antara PTPN V dan petani plasma (KUD), karena pada dasarnya keberadaan perkebunan plasma adalah sebagai pemasok pabrik perusahaan inti (PTPN V).

Gambaran perkembangan industri hulu dari kelapa sawit di atas juga terdapat di Kabupaten Siak. Keberadaan perkebunan kelapa sawit ini selain komoditi yang menjanjikan sebagai sumber PAD di samping dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan perluasan kesempatan kerja selain di perkebunan. Situasi ini dengan sendirinya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu Misi dari Kabupaten Siak. Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, bahwa sampai saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit telah mencapai 131.168 hektar, yang menurut rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak akan mencapai 168.665 hektar pada akhir tahun 2004 (BPS, 2002).

Pada saat penelitian lapangan dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sedang mengembangkan pola perkebunan kelapa sawit sistem baru, yaitu pola swadaya menggunakan sistem saham. Pola dasar sistem ini adalah pola PIR Trans, namun khusus untuk penduduk lokal yang bertujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Siak. Pelaksana awal (pembukaan/pembersihan lahan, penyediaan bibit dan penanaman) adalah PTPN V sebagai mitra kerja sama antar lembaga tersebut. Pelaksanaan pengembangan perkebunan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pembukaan tahap pertama tahun 2004 dan tahap kedua tahun 2005.

Bertambah luasnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak berdampak terhadap industri hulu CPO yang diperkirakan untuk 1 hektar kebun kelapa sawit akan menghasilkan 2 hingga 3 ton CPO. Dilihat dari CPO yang dihasilkan oleh pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Siak menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai produksi pada tahun 2001 sebesar 400.639 ton yang diperkirakan akan meningkat sebanyak 25 persen per tahun. Adanya rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk memperluas areal perkebunan kelapa sawit, tentu harus diikuti dengan membangun pabrik CPO agar dapat menampung TBS dari perkebunan tersebut.

Apabila diperkirakan untuk 1 pabrik akan menghasilkan 10.000 hektar, maka dibutuhkan biaya sekitar 50 milyars (US\$ 40 juta)¹³.

Pada saat ini, di Kabupaten Siak selain pabrik CPO milik perusahaan negara terdapat sekitar 10 perusahaan pengolahan CPO berskala besar. Keberadaan perusahaan swasta mempunyai manfaat yang sangat besar bagi petani perkebunan rakyat maupun petani Plasma, karena umumnya pihak swasta akan membeli TBS dengan harga tinggi. Apabila kondisi ini dapat dipertahankan, bahkan makin meningkat, maka keberadaan kelapa sawit di Kabupaten Siak dapat menjadi pengganti devisa yang dihasilkan oleh SDA minyak yang makin lama makin berkurang. Oleh karena itu, untuk keberlanjutan usaha kelapa sawit ini sangat terkait dengan bagaimana pemerintah bersama masyarakat dapat membangun pabrik CPO untuk menghadapi pesaing-pesaing dari luar, terutama memasuki era globalisasi. Secara langsung keberadaan pabrik CPO sangat diperlukan baik oleh petani perkebunan kelapa sawit maupun industri hilir yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. Apabila tidak terdapat pabrik CPO, maka pengembangan perkebunan pun akan terhambat. Di samping itu, ada beberapa hal lainnya yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten, yaitu akses pengetahuan yang berbeda, keahlian dalam pengelolaan lahan, kualitas benih dan faktor faktor lain antara petani rakyat dengan petani perusahaan negara dan perusahaan swasta yang dapat menghambat kualitas *rendemen* kelapa sawit yang dihasilkan. Situasi ini terutama pada usaha perkebunan rakyat, karena dilihat dari tingkat produktivitas yang dihasilkan dari tiga bentuk usaha perkebunan tersebut, maka *rendemen* dari perkebunan rakyat sangat rendah. Hal ini mengingat perkebunan yang ada tidak hanya yang dikelola oleh pemerintah melalui PTPN V, namun juga perusahaan swasta dan rakyat.

¹³ Provinsi Riau berencana selama 20 tahun mendatang akan dibangun sekitar 160 pabrik CPO, yang biaya terdiri dari 70 persen nilai import dan 30 persen nilai lokal (Master Plan Riau 2020).

Prospek Pengembangan Industri Hilir

Perkembangan industri hulu kelapa sawit yang demikian pesatnya di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak, tampaknya tidak diikuti dengan pembangunan industri hilir agroindustri yang menggunakan bahan baku CPO. Bahkan industri minyak goreng saja belum ada sehingga CPO yang dihasilkan dibawa ke luar Provinsi Riau untuk pengolahan selanjutnya, yaitu Provinsi Sumatera Utara bahkan Malaysia dan Singapura. Kondisi ini walaupun memperlihatkan tingginya tingkat devisa yang dihasilkan CPO, namun dalam perhitungan ekonomi akan lebih berpotensi bila dapat dikembangkan pada industri hilir siap pakai yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. Misalnya industri minyak goreng, sabun, kosmetik dan sebagainya. Selain dapat menambah devisa negara atau PAD Kabupaten Siak, pengembangan industri hilir ini akan lebih memberikan peluang bagi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, keberadaan industri ini memperlihatkan, bahwa penguasaan IPTEK bangsa Indonesia tidak kalah dengan negara luar sehingga dapat bersaing dalam memproduksi kebutuhan dalam negeri.

Kabupaten Siak sebagai kabupaten yang masih muda namun mempunyai potensi untuk pengembangan sektor agroindustri, baik dilihat dari sumberdaya alam dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Letak Kabupaten Siak di kawasan *hinterland area*, yaitu daerah kerjasama regional Singapura, Johor dan Riau (SIJORI), serta termasuk dalam kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle (IMS-GT)* sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri di daerah tersebut. Dengan melihat peluang yang menjanjikan bagi pembangunan Kabupaten Siak, pemerintah daerah membuat strategi dengan menjadikan daerah Buton sebagai kawasan industri terpadu (*integrated industry*). Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai tanda kesiapan Kabupaten Siak dalam pengembangan ekonomi regional di daerah tersebut yang sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan daerah dalam pengembangan sektor agroindustri dan agribisnis.

Melalui kawasan industri terpadu tersebut, pengembangan industri hilir diharapkan akan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Siak akan mengembangkan sektor pertanian modern yang berwawasan agribisnis dan agroindustri sebagai *leading sector* di daerahnya. Pemikiran ini karena sektor agroindustri atau pengolahan produk pertanian dan perkebunan mempunyai peluang pasar yang cukup tinggi, terutama untuk konsumen negara terdekat Malaysia dan Singapura.

Peluang tersebut di atas harus cepat ditanggapi agar tidak 'kecolongan' dari pihak investor asing yang mulai menjajaki untuk menanam investasinya di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Siak. Sampai saat ini investor asing yang ada di Kabupaten Siak adalah Malaysia dalam usaha perkebunan kelapa sawit berikut dengan industri pengolahan CPO nya. Oleh karena itu, dalam menghadapi keberadaan investor asing pemerintah daerah Kabupaten Siak harus waspada agar daerahnya tidak hanya untuk dijadikan lahan perkebunan saja, namun juga pengembangan ke arah industri hilir di mana Kabupaten Siak menjadi mitra yang sejajar. Kebijakan ini diperlukan mengingat Indonesia saat ini sangat membutuhkan peluang dalam penyediaan lapangan pekerjaan mengingat semakin tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Keberadaan kawasan industri terpadu yang berfokus pada pengembangan agroindustri dan agribisnis ini tampaknya juga mendukung terciptanya Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan investasi di kawasan Sumatera. Salah satu langkah strategis dari kegiatan ini adalah terjalannya kontak dagang dan mitra investasi antara produsen, *trader*, *buyer*, pemilik modal, dan mitra lokal di daerah. Dengan adanya kawasan industri ini memperlihatkan, bahwa Kabupaten Siak telah siap untuk melakukan kontak dagang dengan dunia luar. Di samping itu, karena Buton jauh dari lingkungan kota dan penduduk diharapkan tidak akan berdampak terhadap lingkungan alam. Namun yang perlu diantisipasi dengan keberadaan kawasan ini adalah perubahan lingkungan sosial yang disebabkan oleh kedatangan pendatang yang mencari pekerjaan.

Dalam kaitannya dengan pendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak perlu mengantisipasi konflik konflik yang mungkin terjadi di kawasan tersebut. Namun demikian dilihat dari kesiapan dan dukungan berbagai pihak, pemerintah daerah Kabupaten Siak optimis kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Kawasan Barat Indonesia, khususnya bagi usaha agroindustri dan agribisnis. Pada saat ini peluang yang sudah terlihat adalah dalam usaha kelapa sawit, yaitu dengan mengintegrasikan industri hulu (perkebunan kelapa sawit) dengan kegiatan industri hilir yang menggunakan bahan baku komoditi kelapa sawit.

5.3. Prospek Penyerapan Tenaga Kerja: peluang dan tantangan

Mengacu kepada prospek pengelolaan sub sektor industri kelapa sawit di atas, baik di industri hulu maupun hilir menunjukkan, bahwa prospek penyerapan tenaga kerja cukup potensial dilihat dari kedua sisi industri tersebut. Dalam menghadapi kegiatan yang begitu besar, Kabupaten Siak sebagai daerah yang baru berdiri tentu menghadapi tantangan di samping peluang yang ada. Peluang dan tantangan yang kemungkinan dihadapi Kabupaten Siak datang dari luar (eksternal) maupun dalam (internal) daerah itu sendiri. Sub bagian ini akan menggambarkan dan mengkaji peluang dan tantangan yang kemungkinan muncul dalam penyerapan tenaga kerja di sektor hulu maupun hilir dalam usaha kelapa sawit dilihat dari sisi internal dan eksternal.

Faktor Internal

Gambaran prospek industri kelapa sawit yang sedang menjadi primadona Kabupaten Siak dalam pencapaian Visi dan Misi untuk menjadi daerah agroindustri dan agribisnis, diharapkan dapat menciptakan peluang kerja bagi penduduk Siak khususnya, dan pendatang dari daerah lain umumnya. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor perkebunan yang dapat diandalkan

untuk mengisi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Siak tersebut. Dilihat dari faktor internal ada beberapa peluang dan tantangan yang mempengaruhi perkembangan komoditi kelapa sawit yang secara langsung akan berpengaruh terhadap prospek penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. *Faktor peluang* antara lain adalah potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sedangkan *faktor tantangan* yang harus dihadapi petani berkaitan dengan permodalan dan kurangnya informasi tentang teknologi yang makin berkembang.

Potensi SDA, khususnya tanah, sangat mendukung keberadaan kelapa sawit di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Siak. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak sampai tahun 2003 telah mencapai 10 persen dari total perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau, yaitu 131.168 hektar. Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah Kabupaten Siak, luas perkebunan kelapa sawit akan mencapai 168.655 hektar. Dalam pencapaian target tersebut masih tersedia tanah yang dapat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Selain lahan kering/tidur yang belum dimanfaatkan, juga lahan konversi dari perkebunan karet yang tidak produktif dan tanah/hutan tanaman rakyat yang tidak digunakan. Hutan tanaman rakyat yang ada di sekitar desa wilayah Kabupaten Siak (per desa sekitar 1.000 hingga 2.000 hektar), dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit akan menggunakan pola *agroforestry* yang diperkirakan dapat mencapai sekitar 50.000 hingga 100.000 hektar.

Di samping itu, berdasarkan usulan masing-masing kecamatan pada tahun 2003 maka ketersediaan lahan untuk pengembangan kelapa sawit diperkirakan ada sekitar 118.349 hektar. Di antaranya Kecamatan Dayun yang telah memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Kabupaten Siak, yaitu mencapai 23.224 hektar (3 persen dari luas kabupaten), dan yang menggunakan pola PIR Trans kelapa sawit pertama dikembangkan di Provinsi Riau melalui program transmigrasi yang dikelola oleh PTPN V. Untuk pengembangan selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Siak dengan mengambil (*adopt*) pola dasar PIR Trans namun menggunakan sistem saham, khususnya untuk masyarakat lokal yang tingkat hidupnya masuk kategori miskin.

Dalam pelaksanaan program ini menggunakan dana APBD yang diprioritaskan untuk penduduk yang tanahnya digunakan dalam usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pemilik tanah dianggap sebagai pemilik saham awal dari perkebunan tersebut. Sistem ini diambil dengan pemikiran agar masyarakat lokal dapat memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari lahannya sendiri, yang karena tidak memiliki modal tidak pernah diolah. Apalagi gambaran secara umum masyarakat yang berhasil pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah pendatang, khususnya transmigran, sehingga pemerintah daerah mulai berfikir untuk meningkatkan ekonomi penduduk lokal pada sub sektor tersebut.

Pada tahap pertama (2003/2004) akan dibangun perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar, dan selanjutnya (2004/2005) akan dibuka 5.000 hektar. Pada saat ini di Kabupaten Siak diperkirakan ada 10.000 rumah tangga penduduk miskin. Tujuan dari program ini adalah: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) adanya kejelasan kepemilikan tanah dengan memberi sertifikat dan keharusan membayar PBB; 3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui perkebunan kelapa sawit dan industri hilir sebagai turunan dari usaha perkebunan tersebut. Mengacu kepada perhitungan, bahwa 1 hektar dapat menyerap tenaga kerja 1 orang, berarti total perkebunan yang akan dikembangkan untuk keluarga miskin ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 8.500 orang dan menghidupi sekitar 34.000 jiwa dengan perincian satu rumah tangga didiami empat jiwa. Potensi penyerapan tenaga kerja ini tidak hanya di sub sektor perkebunan kelapa sawit, namun juga bila dikembangkan industri hilir (agroindustri) yang menggunakan bahan baku dari kelapa sawit atau agribisnis di sub sektor kelapa sawit. Apabila usaha ini berhasil maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada saat ini, yang diperkirakan pada tahun 2005 mencapai lebih dari 19.000 jiwa.

Potensi SDA yang ada di Kabupaten Siak bila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja tentu seharusnya juga diimbangi dengan potensi sumber daya manusia yang mendukung kegiatan tersebut. Dilihat dari komposisi umur penduduk di Kabupaten Siak mayoritas

berusia 15 tahun ke atas. Kondisi ini juga terdapat di masyarakat perkebunan kelapa sawit Sei Buatun, khususnya di lokasi penelitian, yaitu dari 714 orang ART sebesar 73 persen berusia antara 15 – 59 tahun. Sedangkan penduduk yang tidak termasuk usia kerja, yaitu di bawah 15 tahun hanya 24,5 persen. Gambaran usia penduduk ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Siak secara kuantitas memiliki sumber daya manusia cukup memadai.

Sumber daya manusia ini bila dilihat dari tingkat pendidikan pun menunjukkan angka yang menggembarakan karena lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi. Kondisi ini juga tercermin di lokasi penelitian perkebunan Sei Buatun atau Kecamatan Dayun, terutama anak-anak umumnya dapat mencapai tingkat SLTA dan ada yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Penduduk di lokasi ini terjadi perubahan pada tingkat pendidikan orang tua dan anak-anak mereka, di mana anak-anak akan melanjutkan pendidikan di atas SLTP sedangkan orang tua mayoritas tamat SLTP. Perubahan ini karena selain tersedianya sarana pendidikan hingga tingkat SLTA di lokasi tempat tinggal, juga kesadaran orang tua tentang pendidikan anak agar dapat ke jenjang yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan di antara anak-anak mereka ada yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi. Perbaikan tingkat pendidikan ini tentunya sangat mendukung peningkatan sumber daya manusia yang tersedia untuk pembangunan daerah, khususnya di daerah perkebunan kelapa sawit dan umumnya di Kabupaten Siak.

Pada keluarga petani perkebunan kelapa sawit, tampaknya arah pendidikan anak-anaknya ada kecenderungan tidak ke pertanian yang dianggap sebagai pekerjaan keras, sehingga lebih diarahkan ke jurusan non pertanian. Sempitnya kesempatan kerja di luar bidang pertanian membuat anak-anak tersebut kembali memasuki dunia perkebunan kelapa sawit, walaupun dengan alasan "*sambil menunggu kesempatan pekerjaan di luar pertanian*". Kondisi ini banyak terjadi pada keluarga petani yang berhasil dengan pemilikan luas lahan lebih dari dua hektar, dan telah membagi lahan tersebut untuk dikelola kepada anak-anak mereka. Keberhasilan orangtua dalam mengelola

perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu cerminan bagi anak-anak tersebut untuk turut berusaha di perkebunan kelapa sawit.

Potensi-potensi SDM yang ada ini tentunya harus dipertahankan di samping meningkatkan kemampuan petani dalam penguasaan dan penerapan IPTEK serta sikap mental yang kurang adaptif dalam menghadapi perubahan IPTEK di kegiatan perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak atau kelompok muda masyarakat perkebunan kelapa sawit, baik yang berkaitan dengan pengembangan di sektor hulu maupun hilir. Hal ini diperlukan agar keberlangsungan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan, yang dengan sendirinya akan mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam pengembangan sektor agroindustri dan agribisnis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tantangan yang dihadapi petani sangat terkait dengan masih *rendahnya pemanfaatan IPTEK* dalam usaha meningkatkan mutu TBS dan *modal untuk perluasan lahan* yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar. Dalam kaitannya dengan IPTEK, sistem pengelolaan yang dimiliki petani perkebunan kelapa sawit masih sederhana dibandingkan dengan perusahaan negara maupun swasta. Kondisi ini tentu saja merupakan kendala bagi petani perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan hasilnya, baik dari jumlah maupun kualitas *rendemen*. Ada dua permasalahan yang menjadi tantangan petani dalam hal ini, yakni bibit dan sistem pemeliharaan yang umumnya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan terhadap dua hal tersebut.

Permasalahan *pertama* adalah dalam pemilihan bibit apabila petani akan membuka lahan baru atau peremajaan pohon yang sudah tua. Penentuan bibit kelapa sawit yang digunakan akan sangat menentukan hasil *rendemen* kelapa sawit dalam pengolahan CPO. Pada perkebunan negara atau swasta akan memilih bibit yang paling baik dari pusat penelitian kelapa sawit di Medan. Bahkan ada perusahaan swasta yang saat ini dikelola bersama perusahaan Malaysia atau kebun yang disewakan kepada perusahaan Malaysia

akan mendatangkan bibit dari Malaysia. Sedangkan perkebunan rakyat dalam pemilihan bibit kadang kala kurang memperhatikan mutu bibit dan cenderung memilih pada tingkat harga yang murah¹⁴. Berdasarkan pengalaman seorang petani, tingkat kegagalan dari bibit yang dibeli tanpa sertifikat sekitar 20 persen. Bentuk kegagalan tersebut, misalnya walaupun pohonnya sudah tinggi namun tidak menghasilkan buah.

Permasalahan *kedua*, sistem pengolahan dan pemeliharaan kebun umumnya masih berdasarkan pengetahuan yang diberikan pihak PTPN V pada awal kegiatan ini dilaksanakan. Perkembangan IPTEK di bidang pengelolaan kelapa sawit tentunya sudah cukup jauh dibandingkan pada awal kegiatan tersebut berlangsung, yaitu hampir 20 tahun. PTPN V sebagai mitra awal mulai mengurangi keikutsertaannya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dulu ada di bawah asuhannya; kecuali bila ada permintaan dari petani. Petani muda hanya melakukan kegiatan perkebunan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat terbatas, yaitu hanya dari orangtuanya. Persoalan persoalan yang berkaitan dengan ketidakberhasilan kebun, misalnya disebabkan oleh faktor pemeliharaan/perawatan atau jenis tanah tidak pernah diketahui sehingga sering menimbulkan pertanyaan pada mereka. Situasi ini pun perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu dalam pensosialisasian perkembangan IPTEK di bidang kelapa sawit kepada kelompok petani muda. Walaupun tingkat pendidikan mereka meningkat dibandingkan dengan orangtuanya, namun umumnya mereka tidak ada yang mengambil pendidikan dalam bidang pertanian atau perkebunan.

¹⁴ Sampai saat ini bibit kelapa sawit masih didatangkan dari Medan. Mutu bibit terbaik dan dianggap *asli* adalah dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan yang menggunakan sertifikat kelayakan dan harganya Rp. 1.000,- per biji. Kemudian ada bibit yang dibeli melalui 'jalan belakang' dengan harga Rp. 500,- per biji namun tanpa sertifikat, sering disebut bibit 'aspal' (asli tapi palsu). Lainnya adalah bibit yang dibuat oleh karyawan pembibitan yang keluar dari perusahaan dijual Rp. 300,- per biji.

Dari sisi permodalan, kemampuan petani untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit bervariasi dan sangat tergantung dari aset investasi yang dimiliki. Bagi petani kelapa sawit yang terbilang sukses (berhasil), tampaknya permasalahan permodalan bukan merupakan kendala yang mendasar. Hal ini terbukti dari kemampuan para petani sukses tersebut untuk memperluas kebun kelapa sawit. Pengembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan tidak hanya di sekitar lokasi penelitian, namun telah meluas di luar kecamatan dan kabupaten. Selain mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki, para petani yang terbilang sukses (berhasil) tersebut juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan mereka melalui berbagai usaha, seperti membuka bengkel, warung/toko, dan usaha pembibitan kelapa sawit.

Berbeda dengan petani dengan kepemilikan lahan terbatas, kemampuan permodalan mereka untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya terlihat sangat rendah. Luas kebun kelapa sawit yang dimiliki biasanya tidak bertambah seperti pada awal pembagian lahan oleh PTPN V; bahkan pada beberapa kasus ada yang menjual sebagian dari lahan yang dimilikinya karena alasan kebutuhan ekonomi. Untuk menutupi kekurangan permodalan tersebut, biasanya para petani mensiasatinya dengan melakukan pinjaman kepada pihak KUD setempat. Dalam hal ini, peran KUD untuk membantu permodalan agar petani dapat mengembangkan kebun kelapa sawitnya terlihat sangat besar. Apabila petani perkebunan kelapa sawit mempunyai modal dan dapat memperluas kebunnya, maka terbuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja di sector hulu atau perkebunan.

Faktor Eksternal

Prospek penyerapan tenaga kerja pada sub sektor perkebunan kelapa sawit selain dipengaruhi oleh faktor faktor internal di atas, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berdasarkan kerangka pikir dari penelitian ini, faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan di perkebunan kelapa sawit adalah kebijakan pemerintah, kelembagaan pertanian, iklim investasi, pemasaran dan kondisi sosial

budaya lingkungan masyarakat tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut ada yang menunjukkan sebagai peluang dan ada pula tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, termasuk masyarakat pendukung dalam pengembangan komoditi kelapa sawit.

Dalam rangka pengembangan usaha kelapa sawit, dilihat dari faktor-faktor internal di atas seperti potensi SDA dan SDM yang tersedia di Kabupaten Siak khususnya, maka faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah daerah seharusnya mendukung peningkatan faktor internal tersebut di atas. Pemikiran ini diperlukan mengingat Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Siak yang akan menjadikan daerah ini sebagai pusat agroindustri dan agribisnis, di mana kelapa sawit merupakan primadonanya. Jalan ke arah tersebut telah terbuka dengan melihat tingginya prosentase penduduk yang bekerja sebagai petani yaitu sekitar 48 persen, baik sebagai petani di perkebunan maupun pertanian tanaman pangan. Hal ini menunjukkan, bahwa sektor tersebut harus lebih diintensifkan dengan pertumbuhan yang signifikan agar mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

Menurut Yasin (2002:148), dalam usaha pengembangan sektor agribisnis di Provinsi Riau seharusnya memperhatikan faktor eksternal baik dari aspek pemerintah maupun swasta. Faktor faktor tersebut adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan kestabilan nasional, sehingga kepentingan konsumen dan pihak swasta diutamakan. Hal ini dapat berdampak terhadap kelompok petani berskala kecil yang sulit menempatkan kedudukannya pada posisi sejajar dengan pengusaha besar;
- 2) Pemerintah dan swasta masih terbatas dalam menghasilkan teknologi pertanian dan pengalihan teknologi tersebut kepada petani yang terbatas daya penguasaan dan penerapan IPTEK. Kondisi ini akan mempengaruhi perolehan produksi dan keuntungan usahanya;
- 3) Pelayanan pemerintah dan swasta dalam mendukung pembangunan agribisnis masih terbatas atau kurang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh pengusahatani. Hal

ini disebabkan karena suatu kegiatan umumnya bukan mengutamakan kepentingan ekonomi pengusahatani, namun untuk keperluan kegiatan tersebut saja;

- 4) Perencanaan pembangunan agribisnis selalu mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek sehingga persoalan mendatang jarang diantisipasi lebih awal;
- 5) Dalam memacu pembangunan agribisnis hanya dilakukan pendekatan secara parsial, sedangkan masalah pembangunan agribisnis berkaitan erat secara sistem dengan aspek teknis, sosial budaya dan ekonomi, kelembagaan, manusia, lingkungan dll.;
- 6) Pemerintah tidak konsisten menetapkan suatu wilayah pertanian dalam perwilayahan komoditas untuk mengembangkan suatu komoditas agribisnis;
- 7) Kebijakan pemerintah, terutama pada masa krisis ekonomi, untuk mengantisipasi perdagangan bebas belum memberikan keadilan kepada para pelaku ekonomi sektor agribisnis, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik, maupun internasional.

Khusus di pemerintahan Kabupaten Siak yang baru memasuki era otonomi daerah dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan usaha sub sektor perkebunan. Pada dasarnya kebijakan di bidang ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan penduduk sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Siak, yaitu tentang:

- 1) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- 2) peningkatan kualitas tenaga kerja;
- 3) pendayagunaan tenaga kerja produktif;
- 4) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk pencapaian kebijakan tersebut, strategi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2000 hingga 2005, khusus berkaitan dengan ketenagakerjaan tertuang dalam Renstra Kabupaten Siak, yaitu:

- 1) Pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, profesionalisme, daya saing, dan kompetisi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja produktif sebagai dasar pembangunan produktivitas masyarakat;
- 2) Kesadaran dan motivasi terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas, kewirausahaan, disiplin dan etos kerja positif serta berdaya saing tinggi dan berwawasan luas;
- 3) Pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
- 4) Perlindungan tenaga kerja yang bertumpu pada hak-hak dasar pekerja sesuai dengan hubungan industrial Pancasila;
- 5) Kebijakan pengupahan dan pengkajian didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, prestasi dan produktivitas kerja, keahlian dan profesionalisme kerja;
- 6) Peran serta dan tanggung jawab pekerja dan serikat pekerja dalam mewujudkan produktivitas daerah terus ditingkatkan untuk lebih memantapkan keikutsertaan pekerja dan serikat pekerja didalam kegiatan perusahaan.

Di samping kebijakan tersebut di atas, pemerintah daerah Kabupaten Siak juga mengeluarkan kebijakan yang tidak langsung berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti kebijakan investasi dan pendidikan. Kebijakan investasi yang kondusif terhadap pembangunan industri atau usaha di daerah tersebut akan berdampak terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Sedangkan kebijakan pendidikan yang searah dengan pembangunan industri yang akan dibangun di Kabupaten Siak secara tidak langsung akan memudahkan penduduk mengisi lapangan pekerjaan yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan investasi daerah Kabupaten Siak telah dirumuskan dalam rencana investasi yang akan dikembangkan dengan memperhatikan produk unggulan daerah, baik di bidang pertanian maupun non pertanian. Tentu saja hal ini sangat terkait dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai produk unggulan Kabupaten Siak. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini. Dalam

rangka untuk mengejar kekurangan di bidang IPTEK, khusus di bidang perkebunan, pemerintah daerah menyusun program pelatihan dan penyuluhan melalui Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan PTPN V. Program ini umumnya diberikan pada awal pembukaan perkebunan. Sedangkan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme dan ketrampilan di bidang pertanian/perkebunan yang dikembangkan antara lain adalah: a) penangkaran bibit/benih, b) manajemen usaha tani, c) pengolahan hasil pertanian, d) pemasaran hasil pertanian, e) sarana produksi.

Gambaran secara umum Kabupaten Siak baik dari sisi sosial maupun ekonomi menunjukkan, bahwa sub sektor perkebunan kelapa sawit mempunyai prospek yang menjanjikan bagi pembangunan daerahnya. Kondisi ini tidak hanya dilihat dalam perspektif domestik namun juga secara global dengan meningkatnya permintaan pasar pada komoditi ini. Hal ini disebabkan kebutuhan akan kelapa sawit sebagai bahan baku pengolahan industri lainnya juga meningkat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kabupaten Siak juga memiliki posisi tawar yang cukup baik dalam hal pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut terkait dengan kemudahan akses pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Peran KUD, PTPN V dan pihak swasta selama ini dalam pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit ternyata telah menciptakan kompetisi harga yang cukup *fair* dalam mata rantai pemasaran. Para petani kelapa sawit yang biasanya selalu berada pada *bargaining position* rendah, tampak memiliki posisi tawar cukup baik (melalui KUD) dalam menjual hasil kebun kelapa sawitnya. Kondisi ini diharapkan akan semakin mendorong motivasi petani untuk lebih mengembangkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di masa mendatang.

Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Siak berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan komoditi kelapa sawit adalah ditetapkannya Buton sebagai kawasan industri terpadu. Keberadaan kawasan industri ini diharapkan akan memunculkan industri-industri yang terkait dengan sektor agroindustri dan agribisnis, termasuk yang menggunakan bahan baku kelapa sawit, sehingga tercipta lapangan pekerjaan sektor non

pertanian bagi penduduk Kabupaten Siak khususnya. Keberadaan kota industri ini pada masa datang diharapkan usaha kelapa sawit yang ada di Kabupaten Siak tidak hanya terfokus pada sektor perkebunan dan penghasil CPO, namun lebih berkembang pada industri industri hilir lainnya yang menggunakan bahan baku kelapa sawit.

Kemudian, prospek lapangan kerja yang kemungkinan terbuka sangat terkait dengan adanya rencana membuka hubungan kerja sama industri pengolahan maupun perkebunan kelapa sawit dengan negara tetangga Malaysia dan Singapore. Kerjasama dengan Malaysia dalam usaha perkebunan kelapa sawit, sedangkan dengan Singapura dalam pengembangan industri pengolahan (industri hilir). Kerjasama ini merupakan gambaran dari kesiapan Kabupaten Siak dalam menangkap peluang keberadaannya di kawasan terjadi tentu tidak terlepas dari letak Kabupaten Siak yang termasuk dalam *hinterland area* yaitu daerah kerjasama regional SIJORI (Singapura, Johor, Riau), dan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*).

Letak geografis Kabupaten Siak yang sangat strategis menunjukkan, bahwa prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit di masa datang akan sangat menjanjikan. Apalagi jika didukung oleh realisasi rencana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang akan menjadikan Kawasan Buton sebagai kawasan industri terpadu di daerah ini. Dalam jangka panjang, diharapkan pembangunan kawasan tersebut akan mampu meningkatkan *multiplier effect* dari kegiatan perkebunan kelapa sawit, yaitu tidak hanya dalam pengolahan TBS menjadi CPO, tetapi akan terbangun industri ikutan lainnya seperti industri minyak goreng, sabun, kosmetika, dan aneka kimia. Dampak selanjutnya adalah terciptanya peluang kesempatan kerja yang lebih besar bagi angkatan kerja di daerah ini. Untuk mendukung hal tersebut, maka telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di daerah ini.

Namun demikian perlu disadari bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak, terutama berkaitan dengan pelaksanaan otonomi

daerah, juga mensyaratkan adanya tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut diyakini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak serta sekaligus jaminan kesuksesan pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai primadona perekonomian daerah ini. Salah satu tantangan tersebut adalah penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan kemudahan perizinan, kepastian hukum dan jaminan kestabilan keamanan dan ketertiban lingkungan di Kabupaten Siak. Merujuk pada hasil penelitian Bank Indonesia tahun 2003 tentang daya saing daerah dapat ditegaskan, bahwa salah satu alasan yang sangat mendasari para investor menanamkan modal di daerah adalah prosedur perizinan yang mudah dan transparan. Oleh karena itu, untuk mendukung gairah investasi di Kabupaten Siak maka pemerintah daerah harus cepat tanggap dalam memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik, terutama dalam menarik kegiatan investasi di daerah ini. Di samping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga harus mampu menghindari terjadinya berbagai pungutan, walaupun dengan dalih pemasukan kas daerah, sehingga menyebabkan *inefisien* dalam pelaksanaan pembangunan karena menimbulkan *high cost economy*, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan daerah.

Di samping faktor faktor eksternal di atas, faktor budaya para *stakeholders* pendukung komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak, turut mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan sub sektor perkebunan kelapa sawit. Pola kebiasaan atau budaya dalam bekerja umumnya adalah monoton, sehingga sulit untuk berubah atau menerima inovasi berkaitan dengan komoditi kelapa sawit. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada kelompok petani plasma, namun juga di perusahaan Inti. Permasalahan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pengembangan usaha komoditi kelapa sawit dari sektor hulu ke sektor hilir. Hal ini terungkap dari pernyataan seorang staf PTPN V yang mengatakan:

“.....budaya PTP baru di hulu yang terkait dengan budaya kerja mereka. Perobahan dapat dilakukan bila pengelola perusahaan hilir bukan dari hulu, namun

baru yang memahami usaha hilir. Untuk pengembangan industri hilir, dapat dibentuk aliansi pengelola hulu dan hilir, dan kelompok hulu belajar dari kelompok hilir. Kelemahan SDM dapat diatasi dengan mempersiapkan SDM untuk usaha hilir, namun banyak orang yang di hulu tidak mau belajar tentang usaha hilir karena dianggap usaha tersebut tidak ada kepastian untuk sukses”.

Mengacu kepada pernyataan tersebut di atas, maka untuk tercapainya visi dan misi Kabupaten Siak mungkin sudah seharusnya pemerintah daerah membuat strategi dan kebijakan yang mengarah kepada *core competency* masing masing *stakeholders* sesuai dengan perannya di sub sektor komoditi kelapa sawit. Kebijakan, strategi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2000 – 2005 dalam bidang kesejahteraan sosial dan ketahanan budaya mengenai ketenagakerjaan (lihat halaman 148), mungkin perlu lebih diimplementasikan dan disosialisasikan kepada *stakeholders* yang berperan dalam komoditi kelapa sawit.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dinamika dan prospek penyerapan ketenagakerjaan terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit Pola PIR di Provinsi Riau dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan. Besarnya perkebunan kelapa sawit yang meliputi hampir semua kabupaten di wilayah provinsi tersebut, maka fokus kajian hanya dilakukan di Kabupaten Siak dengan mengambil lokasi Perkebunan Sei Buatan di Kecamatan Dayun. Ada tiga permasalahan yang dikaji pada buku ini, yaitu: *Pertama*, hubungan inti-plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi kemandirian petani plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai permasalahannya; *Ketiga*, prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Bagian keenam ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan alternatif kebijakan bagi keberlangsungan perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir.

6.1. Kesimpulan

Dinamika perkebunan di Indonesia, khususnya kelapa sawit, di Sumatera Timur telah ada sejak tahun 1911 yang diprakarsai oleh Maskapai Perdagangan Hindia Belanda. Usaha perkebunan ini meluas ke daerah lain yakni Aceh, Sumatera Selatan dan Jawa dengan melibatkan pengusaha Belanda, Perancis, Inggris dan Belgia. Tahun 1960 pemerintah Indonesia menetapkan UU Pokok Agraria tentang Hak Guna Usaha Perkebunan, di mana PTPN bertindak sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit. Adanya kredit perkebunan Bank Indonesia untuk perusahaan swasta berdampak terhadap makin luasnya perkebunan kelapa sawit yang melebihi perkebunan negara.

Kemudian, pada tahun 70'an pemerintah mengembangkan perkebunan dengan pola PIR dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi petani perkebunan. Pada pola PIR ini perusahaan yang mengelola adalah PT Perkebunan Nusantara milik pemerintah, yaitu dengan cara mengintegrasikan perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti) sebagai proses produksi. Dalam perkembangannya, Pola PIR ini menciptakan konsep baru seperti PIR-Bun, PIR-Trans dan PIR-lokal untuk membedakan bentuk pengelolaan perkebunan dan status asal peserta PIR.

- ***Hubungan Inti – Plasma Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit***

Hubungan kerja inti-plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Sei Buatan cenderung mengarah pada hubungan jual beli TBS yang mengedepankan unsur keuntungan (*bussiness as usual*). Pihak perusahaan inti sebagai pihak yang diakui telah memberikan banyak jasa dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, merasa “dilupakan” oleh petani plasma yang lebih memilih menjual TBS ke pabrik swasta. Sehingga konsentrasi pengembangan perkebunan yang dilakukan perusahaan inti lebih kepada upaya mengoptimalkan hasil perkebunan milik lahan perusahaan. Sedangkan petani plasma cenderung memilih untuk mengembangkan usaha perkebunannya dengan menjual TBS ke perusahaan swasta. Kecenderungan tersebut semakin menguat terutama setelah selesainya akad kredit oleh petani plasma dan semakin besarnya *bargaining position* petani melalui KUD dan kelompok tani. Situasi ini terjadi karena pada dasarnya hubungan kerja antara plasma dan inti tidak terikat secara formal setelah akad kredit. Oleh karena itu akan sulit untuk memadukan kedua pihak saling terikat dalam satu kerjasama seperti yang diharapkan dari pola kerjasama PIR selama ini.

Ada beberapa faktor eksternal yang membuat hubungan kerjasama antara inti dan plasam dalam Pola PIR sulit berjalan, diantaranya adalah:

- a) Meningkatnya jumlah pabrik kelapa sawit sehingga memberikan kesempatan dan alternatif bagi petani untuk menjual TBS yang dihasilkannya;
- b) Meningkatnya jumlah dan kebutuhan TBS di tingkat perusahaan swasta dan permintaan CPO yang cenderung meningkat;
- c) Terjadinya persaingan harga dan pemasaran yang tidak sehat di antara perusahaan/pabrik kelapa sawit;
- d) Meningkatnya peran kelembagaan pertanian di tingkat desa (seperti KUD dan Kelompok tani) sehingga dapat menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh perusahaan inti; dan
- e) Kondisi harga jual TBS yang relatif stabil yang memungkinkan petani semakin tertarik mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya.

Terlepas dari kondisi dan perubahan yang terjadi dalam hubungan kerja plasma dan inti di lokasi penelitian, satu hal yang sangat penting adalah bahwa kecenderungan perubahan tersebut telah berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani plasma di lokasi penelitian. Pada aspek ini maka dapat dikatakan upaya yang selama ini dilakukan melalui pelaksanaan program PIR di lokasi penelitian telah mampu memperbaiki kehidupan petani plasma. Kondisi ini menunjukkan, bahwa salah satu dari tujuan pelaksanaan PIR dapat terealisasi dan memungkinkan terciptanya perbaikan dalam hal model-model pengelolaan perkebunan di masa datang.

- ***Kondisi Kemandirian Petani Plasma Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit***

Ketergantungan petani plasma terhadap pihak inti nampaknya telah mengalami banyak perubahan dan cenderung memperkuat kemandirian petani. Pesatnya perubahan kondisi eksternal yang terjadi di sekitar perkebunan kelapa sawit diduga merupakan faktor utama yang menyebabkan petani memiliki *bargaining position* yang lebih besar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Disamping itu, dengan adanya kekuatan baru dari kelembagaan KUD dan kelompok tani yang berasal dari 'akar rumput' dan selalu

mengedepankan kepentingan petani kelapa sawit, diduga semakin menguatkan posisi petani kelapa sawit di lokasi penelitian. Petani kelapa sawit di Sei Buatan semakin realistis dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya yang selalu didorong oleh kesempatan memperoleh keuntungan ditengah meningkatnya permintaan dan harga jual TBS.

Namun demikian tampaknya kecenderungan perubahan tersebut akan mengalami banyak persoalan dalam kurun waktu sekitar 5 tahun ke depan. Hal ini terkait dengan keharusan dilakukannya *replanting* terhadap hampir sebagian besar tanaman kebun kelapa sawit milik petani yang ada di perkebunan kelapa sawit Sei Buatan. Mayoritas tanaman kelapa sawit yang ditanam di daerah ini adalah 'generasi pertama' dan tentunya sudah berusia tua dan mulai tidak produktif. Ini artinya petani harus merelakan dalam kurun waktu tertentu (masa penanaman) untuk mencari alternative baru sumber pendapatan yang sebelumnya berasal dari kelapa sawit. Masalah ini semakin berat dirasakan terutama oleh petani kelapa sawit dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 ha. Belum lagi biaya yang harus ditanggung ketika pengolahan awal perkebunan yang diperkirakan cukup besar dibandingkan biaya perawatan ketika pohon kelapa sawit sudah menghasilkan TBS.

Dalam hal ini, nampaknya peran KUD dan Kelompok Tani menjadi sangat sentral, terutama dalam mengakomodir permasalahan terkait dengan kebutuhan permodalan yang harus ditanggung para petani kelapa sawit di Sei Buatan. Pihak KUD dan Kelompok tani dapat melakukan berbagai terobosan, antara lain dengan membangun kerjasama dengan pihak swasta, baik itu pabrik kelapa sawit swasta maupun lembaga perkreditan yang ada di lokasi penelitian. Upaya ke arah tersebut lebih realistis dan menjanjikan dengan melihat hubungan kerjasama yang telah berkembang diantara ketiga kelembagaan tersebut selama ini. Karena untuk kembali mengandalkan pada kerjasama dengan pihak perusahaan inti (PTP V) nampaknya sulit diwujudkan. Mengingat pihak inti sendiri sedang mengalami berbagai permasalahan internal perusahaan dan cenderung

terkonsentrasi dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang masih dimiliki.

- ***Prospek Penyerapan Tenaga Kerja Di Masa Datang***

Potensi sumber daya alam Kabupaten Siak sangat mendukung keberadaan komoditi kelapa sawit di daerah ini. Berdasarkan proyeksi Pemda Kabupaten Siak, luas perkebunan kelapa sawit akan mencapai 168.655 hektar dengan memanfaatkan lahan kering/tidur, lahan konversi perkebunan karet yang tidak produktif dan tanah/hutan tanaman rakyat yang tidak digunakan. Jika diasumsikan 2 ha luas lahan perkebunan kelapa sawit dapat dikelola oleh 1 tenaga kerja, maka terdapat sekitar 84,327 tenaga kerja yang dapat terserap secara langsung. Belum lagi prospek penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung yang timbul akibat adanya kegiatan di perkebunan kelapa sawit. Bidang kegiatan yang dapat terserap misalnya jasa angkutan, jasa penyediaan bibit, jasa pengelolaan, peralatan perkebunan, koperasi dan kelembagaan keuangan lainnya.

Dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, pada umumnya sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak mempunyai prospek yang menjanjikan bagi pembangunan daerahnya, karena meningkatnya permintaan pasar domestik maupun global terhadap komoditi ini. Dalam hal ini, peran berbagai *stakeholders* terkait seperti petani, KUD, pemerintah (PTPN V) dan swasta sangat menentukan dalam pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit dalam menciptakan kompetisi harga yang cukup adil sebagai mata rantai pemasaran. Kondisi ini diharapkan akan semakin mendorong motivasi petani untuk lebih mengembangkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di masa mendatang.

Di samping itu, faktor budaya kerja baik di lingkungan petani maupun industri pengolahan CPO turut mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan komoditi kelapa sawit. Pola kebiasaan atau budaya atau menerima inovasi berkaitan dengan komoditi kelapa sawit. Permasalahan ini dapat menjadi kendala bagi pengembangan usaha komoditi kelapa sawit baik di sektor hulu maupun hilir. Oleh karena

itu, pemerintah bersama *stakeholders* terkait lainnya perlu menciptakan budaya kerja yang mau menerima perubahan atau inovasi sesuai dengan perkembangan IPTEK pada bidang-bidang yang dapat mendukung keberlangsung usaha komoditi kelapa sawit pada jangka panjang.

Gambaran tersebut di atas, apabila dilihat dari sisi ketenagakerjaan maka keberadaan komoditi kelapa sawit sangat potensial memberi peluang kesempatan kerja yang dapat mensejahterakan penduduknya. Dilihat dari ketersediaan luas lahan perkebunan kelapa sawit memperlihatkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini cukup tinggi, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup keluarga. Peningkatan kesejahteraan ini akan lebih bila anggota keluarga petani tersebut mempunyai peluang kesempatan kerja non pertanian, baik yang terkait dengan komoditi kelapa sawit maupun tidak.

Adanya rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk membuka hubungan kerja sama industri pengolahan perkebunan kelapa sawit di sektor hulu maupun hilir dengan Negara Malaysia dan Singapore akan membuka peluang kerja yang cukup menjanjikan di kabupaten ini. Peluang ini akan makin terbuka dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam penetapan Buton sebagai kawasan industri terpadu yang diharapkan dapat menarik investor membuka industri yang dapat menciptakan lapangan kerja di sektor non pertanian, namun tetap mengacu kepada agroindustri dan agribisnis sebagai tujuan pembangunan Kabupaten Siak. Dalam jangka panjang, pembangunan kawasan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan *multiplier effect* dari kegiatan perkebunan kelapa sawit. Untuk mendukung program tersebut, maka Pemda Kabupaten Siak harus dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif seperti kemudahan perizinan, kepastian hukum, jaminan kestabilan keamanan dan ketertiban lingkungan di daerah ini.

6.2. Rekomendasi dan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan kenyataan yang ditemui di lokasi penelitian, dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja pada perkebunan kelapa

sawit di masa datang diperlukan kebijakan yang mendukung ke arah tersebut. Beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain yang berkaitan dengan SDA, SDM, dan prospek komoditi kelapa sawit dalam jangka panjang.

Gambaran keberhasilan petani plasma perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari peran berbagai pihak yakni petani, pengurus KUD, pemerintah, pengurus dan staf PT Perkebunan Nusantara V dan pengusaha swasta. Keberlangsungan dan peningkatan usaha petani kelapa sawit tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu dalam menghadapi era globalisasi diperlukan kebijakan yang dapat mendukung keberlangsungan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Antara lain alternatif kebijakan yang diusulkan adalah dalam:

- Pemanfaatan lahan perkebunan yang ada secara optimal dan efisien;
- Pengoptimalisasian pendayagunaan fungsi KUD dan kelompok tani melalui pemberian pelatihan manajemen koperasi dan tata niaga pertanian secara professional;
- Peremajaan (*re-planting*) tanaman kelapa sawit di tingkat petani terhadap pohon yang telah melalui masa produktif. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan KUD, PTPN V, Perusahaan swasta dan pemerintah;
- Pengembangan kelembagaan pertanian di tingkat petani dan lembaga di pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan petani atau masyarakat perkebunan kelapa sawit. Misalnya yang dilakukan oleh salah satu koperasi pertanian di Jepang dengan memberi informasi perkembangan iptek dari tanaman yang dikelola petani di lingkungannya tentang musim tanam, pemeliharaan hingga panen. Informasi ini sangat bermanfaat,

sehingga petani dapat memproduksi hasil tanaman yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen¹⁵;

- Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KUD dan kelompok tani agar lebih mandiri di segala aspek kebutuhan masyarakat perkebunan kelapa sawit;
- Perbaikan mekanisme penentuan harga jual TBS yang mencakup kepentingan petani plasma, perusahaan inti dan PKS Swasta.

Keberadaan komoditi kelapa sawit dilihat dari aspek ketenagakerjaan akan memberikan peluang terciptanya kesempatan kerja, baik di tingkat pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun pengolahan hasil di sektor hulu dan hilir. Alternatif kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam usaha peningkatan penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan antara lain dalam:

- Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan anggota keluarga petani kelapa sawit sesuai dengan perkembangan IPTEK di bidang komoditi kelapa sawit melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan pelatihan non formal;
- Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan memaksimalkan perluasan lokasi yang tidak merusak lingkungan alam maupun sosial;
- Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang dapat mendorong masyarakat perkebunan kelapa sawit untuk membuka usaha non pertanian yang dapat memberi peluang kerja bagi penduduk di perkebunan kelapa sawit.
- Pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui reorientasi peningkatan produktivitas petani dan efisiensi sistem agribisnis komoditi kelapa sawit;
- Pengembangan sektor agroindustri dan agribisnis di kawasan industri terpadu Buton dengan memprioritaskan bahan baku kelapa sawit/CPO.

¹⁵ Informasi ini diperoleh pada saat penulis melakukan penelitian pada salah satu desa di Pulau Kikai, Jepang Selatan Tahun 1987, yaitu Desa Oasato dan Desa Takigawa.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit mempunyai peran besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani atau pedesaan, maka perlu dibuka peluang-peluang yang dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas di sektor hulu maupun hilir. Untuk itu diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang diperkirakan dapat menumbuhkan peningkatan kesempatan kerja di dua sektor tersebut, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Alternatif kebijakan tersebut antar lain dalam:

- Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilakukan secara terpadu dengan melibatkan *stakeholders* terkait dan didukung oleh berbagai faktor eksternal dan internal secara terintegrasi;
- Peningkatan produksi dan pemanfaatan hasil kelapa sawit melalui pengembangan industri hulu dan hilir yang *intergrated*;
- Percepatan realisasi kawasan industri terpadu Buton sebagai barometer terintegrasinya berbagai industri di Kabupaten Siak;
- Pemudahan layanan birokrasi pemerintah dalam perizinan dan penyediaan data base perkebunan yang lengkap dan akurat, sehingga dapat menjadi daya tarik investor menanamkan modal di Kabupaten Siak;
- Peningkatan penguasaan IPTEK yang mendukung pengembangan sektor agroindustri dan agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga. 1994. *Studi Pelaksanaan Pola PIR di Beberapa Jenis Perkebunan Indonesia*. Bandung:Akatiga.
- Agus Pakpahan, 2004. *Petani Menggugat*. Jakarta:Max Havelaar Fondation.
- Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Siak. 2003. *Data Monografi Desa/Kelurahan Sialang Sakti*.
- Bagoes, Ida Mantra. 2000. *Demografi Umum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappeda Provinsi Riau, 2003. Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Provinsi Riau Tahun 2002. Pekanbaru:Bappeda Provinsi Riau & BPS Prov. Riau
- BPS. 2002. *Statistik Indonesia 2001*. Jakarta:BPS.
- _____. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2002*. Berita Resmi Statistik No. 08/VI/17 Februari 2003. Jakarta:BPS.
- BPS Kabupaten Siak. 2003. *Siak dalam Angka 2002*. Siak: BPS Kabupaten Riau dan Bappeda Kabupaten Siak.
- _____. 2003. *Pendapatan Regional Siak Menurut Lapangan Usaha, 1998 – 2002*. Siak:BPS Kabupaten Siak dan Bappeda Kabupaten Siak.
- _____. 2003. *Kecamatan Dayun Dalam Angka 2002*. Siak: BPS Kabupaten Siak dan Bappeda Kabupaten Siak.
- BPS Provinsi Riau. 2003. *Riau dalam Angka 2003*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau dan Bappeda Provinsi Riau.

- Bungin, Burhan. 2003. **Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial.** *Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (ed. Burhan Bungin). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (halaman 83 – 105).
- Bungin, Burhan. 2003. **Focus Group Discussion untuk Analisis Data Kualitatif.** *Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (ed. Burhan Bungin). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (halaman 131 – 140).
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli : Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad Ke-20.* Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Daliyo, dkk. 2000. *Pengembangan Ketenagakerjaan Subsektor Agroindustri Kalimantan Timur: Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Global.* Jakarta. PPK – LIPI.
- Dam, Syamsumar. 1998. *Menyongsong Kawasan Investasi ASEAN: Relokasi Industri Kelapa Sawit.* Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI).
- Direktorat Jendral Perkebunan, 1996, Himpunan Peraturan/Ketentuan untuk Landasan Operasional Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi di Kawasan Timur Indonesia (PIR-Trans KTI). Jakarta: Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian.
- Direktorat Bina Produksi Perkebunan. 2003. *Statistik Perkebunan.* Jakarta: Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Siak. 2002. *Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Di Kabupaten Siak Komoditi Kelapa Sawit.* Siak:Dinas Perkebunan Kab. Siak.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2003. *Master Plan 2020 bidang Perkebunan.* Pekanbaru:Dinas Perkebunan & Bappeda Provinsi Riau.

- Dirjenbun, 1992. *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Dwinita, L. 1999. **Identifikasi strategi global dan generik komoditas kelapa sawit di Indonesia dalam Media Perkebunan**, Nomor 27, April 1999. Jakarta:
- Chan, Fidber. 2000. *Potensial of Oil Palm Downstream Industries inn Riau Province*. (Tesis Universty Putra Malaysia, Kuala Lumpur).
- Kanto, Sanggar. 2003. **Sampling, Validitas dan Reabilitas dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi** (ed. Burhan Bungin). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (halaman 51 – 63).
- KUD Mandiri “Palma Jaya”. 2004. *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD Palma Jaya serta Program Kerja dan RAPBK KUD Palma Jaya Tahun Buku 2004*. Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten. Siak.
- KPDE Kabupaten Siak. 2003. *Geomorfologi Kabupaten Siak*. Pemerintahahaan Kabupaten Siak. Siak Sri Indrapura. <http://www.siak.go.id/profil/morfo.php>
- Lubis, U Adlin. 1992. *Kelapa Sawit di Indonesia*. Pematang Siantar:Pusat Penelitian Perkebunan Marihat, Bandar Kuala.
- Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IPB. 2002. *Renstra Sektor Ketenagakerjaan Kabupaten Siak 2002 – 2020 dan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Balai Latihan kerja (BLK) di Kabupaten Siak*. (draft Laporan akhir)
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. KPG:Jakarta.
- Mubiyarto. 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.

- Nuhung, Iskandar A. 2003. *Perusahaan Inti Rakyat dan Pembangunan Ekonomi Keraykatan Studi Kasus PIR-BUN Sumatera Selatan*. Jakarta:Penerbit Yarsif Watampone.
- Pemerintahan Provinsi Riau. 2002. *Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Riau, Tahun 2001-2003*. Pekanbaru.
- Pitono, Joko. 2002. *Peran Industri Manufaktur Sebagai Penghela Pembangunan Nasional Berkelanjutan Dengan Sumber Daya Alam Sebagai Platform Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kasus : Kelapa Sawit Sebagai Penggerak, Pemicu dan pemacu Pembangunan Iptek*. Ringkasan Tim Kerja Manufakture DRN. 25 November 2002.
- Pranadji, Tri., Satiaji.I, dan N. Syafaat, 1997. *Kajian Kelembagaan Ekonomi dalam Menunjang Pertanian Rakyat Terpadu di Kawasan Timur Indonesia: Kasus di Provinsi Maluku dan Timor Timur*. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI, No.5. 1997, Jakarta.
- Sajogjo, 1997. *Mengenal Pertanian Kontrak (Kata Pengantar)*. Bandung:Akatiga.
- Sastrosayono, Selardi. 2003. *Budidaya Kelapa Sawit*. Cetakan Pertama. (Penyunting: Fuad Izzudin). Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Suwardi. 2002. **Pendidikan Kewirausahaan sebagai Upaya Perberdayaan Orang Melayu dalam** Isjori Ishaq (penyunting), *Orang Melayu : Sejarah, Sistem, Norma dan Nilai Adat*. Pekanbaru. Unri Press.
- Sawit Wath, 2004.
- Simanjuntak, Payaman J.. 2001. **Investasi bidang ketenagakerjaan untuk membangkitkan perekonomian nasional**. *Berita IPTEK, Th. Ke 42. No.1, 2001*. Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Simatupang, Pancar. 2003. **Analisi Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan dalam Analisis Kebijakan Pertanian.**

Yasin, Achmad Z. F. 2002. *Masa Depan Agribisnis Riau.* Penyunting Djamil Bakce. Pekanbaru: Unri Press.

WWF Indonesia, 2003. *Menuju Pengelolaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang lestari dengan Penerapan Better Management Practices (BMPs):* Forest Conversion INFO.

INDEKS

A

ADB, 26, 42, 73, 75, 76, 98
age dependency ratio, 29
Agrarian Arch, 19
agribisnis, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 77, 79, 93, 98, 99, 101, 107, 108, 109,
113, 114, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 134, 136, 137, 143
agroindustri, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 77, 93, 98, 99, 107, 108, 109, 113, 114,
115, 117, 119, 122, 125, 134, 136, 137, 140
akad kredit, 23, 91, 92, 105, 130
angka melek huruf, 30, 31
angka partisipasi angkatan kerja, 29
angka putus sekolah, 31, 32
angkatan kerja, 8, 29, 30, 72, 108, 126
angkong, 53, 56, 57, 58

B

backward linkages, 4
Badan Usaha Milik Negara, 21
Bank Indonesia, 21, 74, 127, 129
bargaining position, 91, 125, 130, 131
bargaining power, 83
Belanda, 2, 18, 19, 20, 21, 129
Belgia, 20, 21, 129
BHL, 66
boss, 81
Botanical Garden Buitenzorg, 20
BUMN, 21, 74, 105
buruh perkebunan, 51, 59, 60, 66,
bussiness as usual, 91
buyer, 114

C

CPO, 1, 3, 6, 10, 12, 24, 25, 53, 72, 78, 82, 99, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 126, 131, 133, 136

D

data base, 137

dodos, 55, 56, 57, 58, 59

E

egrek, 57, 58, 59

F

Faktor eksternal, 9, 106, 121, 122, 127, 130, 137

faktor internal, 8, 9, 115, 116, 121, 122

Federal Land Development Authority, 22

fresh market, 4

G

ganco, 57, 58

H

Hak Guna Usaha Perkebunan, 129

Hinterland Area, 17, 113, 126

I

Idapertabun, 80

imprealisme, 18

IMS-GT, 113, 126

Indeks Pembangunan Manusia, 28, 32

Indeks Pemberdayaan Jender, 32

industri hilir, 1, 4, 6, 40, 71, 97, 99, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 126, 128

industri hulu, 1, 4, 92, 97, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 137

industri terpadu, 113, 114, 125, 126, 134, 136, 137
Inggris, 20, 21, 129
integrated industry, 113
inward linkages, 92

J

janjang, 59
Jawa Barat, 27, 42, 76, 100
Jepang, 20, 135
Johor, 17, 113, 126

K

kelompok tani, 45, 51, 52, 55, 73, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 103,
106, 130, 131, 132, 135, 136
kondisi geografis, 17, 40, 98
konversi, 23, 24, 35, 103, 104, 105, 116, 133
Koperasi Unit Desa, 37, 83, 86, 103
KUD Mandiri Palma Jaya, 51, 86, 87, 88, 89

L

leading sector, 114
letak geografis, 16, 72, 126

M

Malaysia, 17, 72, 73, 78, 98, 109, 113, 114, 119, 120, 126, 134, 141
Maskapai Perdagangan Hindia Belanda, 2, 20, 129
Master Plan Riau, 112
multiplier effect, 4, 126, 134
mupuk, 52, 55, 56, 57, 60, 66

N

ngebrodol, 100
ngegrek, 55, 56, 59, 60, 100
non market, 4

nunas, 52, 54, 55, 56, 60, 100
Nusantara, 7, 18, 19, 21, 74, 130, 135
nyiang, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 66, 100

O

off farm, 77
on farm, 77
onderneming, 19
ornament, 20

P

parang babat, 57, 58
PDRB Kabupaten Siak, 34, 35
pedagang pengumpul, 64, 82, 83
peluang, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 25, 34, 35, 39, 40, 47, 54, 68, 69, 86, 92,
93, 97, 98, 99, 103, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 126, 129, 134,
136, 137, 140
pemasaran, 5, 7, 8, 9, 14, 22, 40, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 98,
102, 103, 105, 106, 108, 121, 125, 131, 133
pemeliharaan, 8, 9, 22, 23, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 79, 81, 98, 99, 100,
101, 103, 105, 108, 119, 120, 135
pencari kerja, 30
pengangguran, 8, 30, 44, 72, 97, 103, 111, 114, 117, 124
Perancis, 20, 21, 129
Perusahaan Inti Rakyat, 1, 4, 22, 140, 141, 142
PHL, 99
PIR ADB, 26, 76
PIR Bank Dunia, 26, 76
PIR Swadana, 26
PIR-Trans, 22, 73, 74, 130, 140
PKS, 36, 37, 78, 82, 87, 103, 136
pola PIR, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 22, 23, 25, 26, 39, 42, 50, 52, 73,
74, 75, 77, 91, 98, 99, 101, 105, 110, 111, 116, 129, 130, 139
produksi kelapa sawit, 39, 79
produktivitas kelapa sawit, 80

profitable, 91

prospek, 1, 6, 7, 8, 14, 41, 62, 75, 97, 98, 101, 109, 113, 115, 116,
121, 125, 126, 129, 133, 135

R

re-planting, 7, 37, 62, 80, 81, 98, 102, 108, 135

S

sex ratio, 28

SIJORI, 17, 113, 126

Singapore, 129, 134

sosio-demografi, 41

struktur tanah, 16, 40, 109

Sumatera Utara, 2, 10, 27, 28, 39, 42, 76, 100, 110, 113

Sumber Daya Alam, 8, 13, 15, 35, 71, 133, 142

Sumber Daya Manusia, 8, 13, 15, 16, 28, 30, 69, 117, 118, 124

supplyer, 87

T

tajak, 57, 58

tantangan, 6, 12, 98, 108, 115, 116, 119, 122, 127, 129, 140

TBS, 5, 9, 24, 36, 37, 40, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 103, 104, 105, 106, 110,
111, 112, 119, 126, 130, 131, 132, 136

Terusan Suez, 19

topografi, 8, 40

transmigran, 3, 7, 27, 39, 41, 42, 44, 50, 52, 61, 66, 68, 76, 99, 100,
117

transmigrasi, 2, 3, 25, 26, 41, 42, 44, 61, 63, 65, 67, 77, 98, 100, 105,
110, 116, 140, 141

trek, 47, 49

U

UU Pokok Agraria, 21, 129

V

VOC, 18

W

win-win solution, 109